

**AUSTRALIA-INDONESIA
BASIC EDUCATION PROGRAM**

**PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
AUSTRALIA INDONESIA**

**KERANGKA KERJA TAHUNAN (AWP)
Managing Contractor Program Management (MCPM)
1 Januari 2009 – 30 Juni 2010**

**Disahkan oleh AIBEP PSC
12 Desember 2008**



Australia Indonesia Partnership

Kemitraan Australia Indonesia



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Akronim dan Singkatan	3
1.Pengantar	6
2.Latar Belakang AWP 2009-2010	8
2.1. Prinsip-prinsip yang Mendasari AWP	8
2.2. Strategi Pengembangan Kapasitas	9
2.3. Mitra Program Pendidikan Dasar	9
2.4. Pendanaan oleh Counterpart	10
2.5. Program Close	10
3.Ruang Lingkup AWP 2009-2010	12
3.1. Fokus Area Utama	12
3.2. Ringkasan Usulan Fokus Area untuk 2009-2010	17
3.3. Monitoring dan Evaluasi	17
4.Ringkasan Outcome dan Output Utama	21
5.Ringkasan Rencana Pencairan Dana untuk AWP 2009-2010	27
6.Resiko	28
7.Isu Kebijakan Khusus	30
Lampiran	34
Lampiran A: Rincian Kegiatan yang Diusulkan	34
i) Pilar 1: Peningkatan Akses	34
ii) Pilar 2: Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	39
iii) Pilar 3: Tata Kelola	56
Lampiran B: Matriks Kegiatan dan Tanggung Jawab M&E	66
Lampiran C: Jadwal Penyusunan AWP MCPM 2009	76
Lampiran D: Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Penyusunan AWP	77
Lampiran E: Daftar Direktorat dan Unit Mitra MCPM	78
Lampiran E: Daftar Penasihat MCPM (per 27 Oktober 2008)	80
Lampiran G: Kebijakan MCPM – <i>Making Advisers Effective</i>	82
Lampiran H: Kerangka Kerja Individual untuk Penasihat	84

Akronim dan Singkatan

Akronim/ Singkatan	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
AAFCP	Audit & Anti Fraud/Corruption Plan	Rencana Audit & Anti Korupsi
ACM	Asbestos Containing Material	Bahan bangunan bermuatan asbestos
AIP	Australia Indonesia Partnership	Kemitraan Australia Indonesia
AIPRD	Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development	Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
AusAID	Australian Agency for International Development	Badan Australia untuk Pembangunan Internasional
AUD	Australian Dollar	Dolar Australia
AWP	Annual Work Plan	Kerangka Kerja Tahunan
Balitbang	Office of Educational Research and Development	Badan Penelitian dan Pengembangan
BAST	Handing Over Notary Deed	Berita acara Serah Terima
BERMUTU	Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading	
BET	Board for Education and Training (MoRA)	Balai Pendidikan dan Latihan (DEPAG)
Bindiklat	Education and Training	Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Direktorat DEPDIKNAS)
BSNP	National Education Standards Board (MoNE)	Badan Standar Nasional Pendidikan
BPK	Supreme National Audit Agency	Badan Pemeriksa Keuangan
CDC	Construction and Development Consultant	Penasihat Konstruksi dan Pembangunan
CET	Centre for Education and Training (MoRA)	Pusat Pendidikan dan Latihan (DEPAG)
CHS	Complaint Handling System	Sistem Penanganan Keluhan
CPD	Continuing Professional Development	Pengembangan Profesi Berkelanjutan
CRS	Construction Reporting System	Sistem Pelaporan Pembangunan
CSAS	Contractor Strategic Advisory Services	Penasihat Layanan Nasehat Strategis
Dirjen	Director General	Direktur Jenderal
DG / Ditjen	Directorate General	Direktorat Jenderal
DIPA	Development Budget of a Central Ministry	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EFA	Education for All	Pendidikan Untuk Semua
EMIS	Education Management Information System	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
EQAIS	Education Quality Assurance and Improvement System	Sistem Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pendidikan
EQAM	Education Quality Assurance Management	Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan
FMIS	Financial Management Information System	Sistem Informasi Manajemen Keuangan
FY	Financial Year	Tahun Anggaran
GER / APK	Gross Enrolment Rate	Angka Partisipasi Kasar

Akronim/ Singkatan	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
GIS	Global Information System	Sistem Informasi Global
GoA	Government of Australia	Pemerintah Australia
GoI	Government of Indonesia	Pemerintah Indonesia
ICT	Information and Communication Technology	Teknologi Informasi dan Komunikasi
ICW	Indonesian Corruption Watch	Pengawasan Korupsi Indonesia
IDR	Indonesian Rupiah	Rupiah Indonesia
Irjen	Inspector General	Inspektur Jenderal
IG / Itjen	Inspectorate General	Inspektorat Jenderal
KKG	Teachers Working Group	Kelompok Kegiatan Guru
KKM	Madrasah Working Group	Kelompok Kerja Madrasah
KPK	Corruption Eradication Committee	Komisi Pemberantasan Korupsi
LPMP	Education Quality Assurance Institution at provincial level	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
M&E	Monitoring and Evaluation	Monitoring dan Evaluasi
MANDIKDASMEN	Directorate General of Management of Primary and Secondary Education	Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
MCPM	Managing Contractor Program Management	Kontraktor Pengelola Manajemen Program
MDG	Millennium Development Goals	Pencapaian Pembangunan di Era Milenium
MEF	Monitoring and Evaluation Framework	Kerangka Kerja Pengawasan dan Evaluasi
MGMP	Teachers Meeting on School Subject	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	Islamic Primary School	Madrasah Ibtidaiyah
MoF / DEPKEU	Ministry of Finance	Departemen Keuangan
MoHA / DEPDAAGRI	Ministry of Home Affairs	Departemen Dalam Negeri
MoNE	Ministry of National Education	Departemen Pendidikan Nasional
MoRA / DEPAG	Ministry of Religious Affairs	Departemen Agama
MTs	Islamic Junior Secondary School	Madrasah Tsanawiyah
MTs-PB	New Islamic Junior Secondary School	Madrasah Tsanawiyah – Pesantren Baru
MTs-PSA	One-roof Islamic Junior Secondary School	Madrasah Tsanawiyah – Pesantren Satu Atap
MTR	Mid Term Review	Kajian Tengah Semester
NER / APM	Nett Enrolment Rate	Angka Partisipasi Murni
NFIE	Non-Formal and Informal Education	Pendidikan Non-formal dan Infromal
NGO	Non Governmental Organisation	Organisasi Non Pemerintah
NU		Nahdlatul Ulama
P4TK	Centre for Development and Empowerment for Teachers and Educational Staff	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PADATI	Data and Information Centre	Pangkalan Data dan Informasi
PAS	School Application Package	Paket Aplikasi Sekolah
PCMU	Program Coordination and Management Unit	Unit Koordinasi dan Pengelola Program

Akronim/ Singkatan	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
PISA	International Student Assessment Program	Program Penilaian Siswa Internasional
PMF	Performance Monitoring Framework	Kerangka Kerja Pengawasan Kinerja
PMPTK	Quality Improvement for Teachers and Educational Personnel	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PMU	Program Management Unit	Unit Pengelola Program
PSC	Program Steering Committee	Komite Pengarah Program
PSMP	Development of Junior Secondary Education	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
PSP	Education Statistic Centre	Pusat Statistik Pendidikan
PUSBUK	Book Centre	Pusat Perbukuan
Pengawas	School Supervisor	
Pesantren	Islamic boarding school (may include Madrasah)	Sekolah Islam berasrama (bisa mencakup Madrasah)
RENSTRA	Strategic Plan	Rencana Strategis
SATAP	One-roof School	Satu Atap
Satker	Work Unit	Satuan Kerja
SD	Primary School	Sekolah Dasar
SD-SMP	Primary and Junior Secondary School	Sekolah Dasar – Sekolah Menengah Pertama
Sekjen	Secretary General	Sekretaris Jenderal
Setjen	Secretariat General	Sekretariat Jenderal
SISWA	System Improvement through Sector Wide Approaches	
SKB	Learning Activities Center	Sanggar Kegiatan Belajar
SMA	Junior High School	Sekolah Menengah Atas
SMIS	School Management Information System	Sistem Manajemen Informasi Sekolah
SMP	Junior Secondary School	Sekolah Menengah Pertama
SPPB	Block Grant Agreement (between MoNE and each School Construction Committee; or MoRA and each Pesantren Foundation and each Madrasah Infrastructure Committee)	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
SRM	Supplementary Reading Materials	Bahan Bacaan Tambahan
TIMSS	Trends in International Mathematics and Science Study	
ToT	Training of Trainers	Pelatihan Untuk Pelatih
Watsan	Water and Sanitation	Air dan Sanitasi
WDD	Whole District Development	Perencanaan Kabupaten Terpadu
WSD	Whole School Development	Perencanaan Sekolah Terpadu
Yayasan	Foundation	

1. Pengantar

Dokumen ini adalah Kerangka Kerja Tahunan (AWP) untuk Managing Contractor Program Management (MCPM).¹

Pada pertemuan khusus Komite Pengarah Program (PSC) pada bulan September 2008, telah diputuskan bahwa Program Pendidikan Dasar (BEP) akan diperpanjang dari 6 April 2009 hingga 30 Juni 2010.

Untuk itu, MCPM bekerjasama dan bermitra dengan AusAID dan Departemen Pendidikan Nasional serta Departemen Agama Republik Indonesia, menyusun AWP untuk jangka waktu 18 bulan hingga tanggal 30 Juni 2010.

Kerangka Kerja 18 bulan ini secara efektif mengintegrasikan bantuan MCPM terhadap rencana dan anggaran Depdiknas dan Depag untuk perencanaan dan penyusunan anggaran oleh AusAID.

15 bulan masa perpanjangan tersebut memungkinkan untuk:

- penyelesaian 2000 SMP termasuk 1500 SMP untuk Depdiknas dan 500 Madrasah Tsanawiyah untuk Depag;
- perpanjangan kegiatan Perencanaan Sekolah Terpadu (WSD) dan Perencanaan Kabupaten Terpadu (WDD) untuk seluruh sekolah BEP dan kabupaten-kabupaten tempat dimana sekolah tersebut dibangun;
- memfokuskan pengembangan kapasitas melalui alih sistem, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh para penasihat teknis MCPM kepada counterpart mereka di Depdiknas dan Depag dan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan;
- pencapaian oleh Depdiknas dan Depag atas Outcome Utama yang ingin dicapai dalam bidang Mutu dan Tata Kelola; dan bidang lainnya secara luas;
- pembentukan suatu landasan yang kuat untuk program bantuan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan di masa mendatang.

Sebelumnya, bantuan dalam bidang pendidikan, utamanya, adalah melalui bantuan yang bersifat *project-type* yaitu penyediaan konsultasi/nasihat teknis dalam jumlah yang signifikan. Sedangkan, pendekatan yang bersifat program adalah pendekatan yang lebih tepat untuk penyaluran bantuan dalam bidang pendidikan bagi Pemerintah Indonesia dan lebih sesuai dengan *Paris Declaration on Aid Effectiveness*. Pendekatan program menggunakan serangkaian pendekatan yang lebih fleksibel untuk:

- mendorong dan mengembangkan rasa kepemilikan yang lebih besar dari pemerintah mitra atas upaya-upaya pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil yang berkesinambungan;
- mendukung penggunaan sistem dan proses milik pemerintah mitra; dan
- mendukung pemerintah mitra untuk menerima tanggung jawab untuk meneruskan strategi nasional di bidang pendidikan secara sistematis dan mengimplementasikan perubahan institusional.

Mengingat agenda reformasi yang sangat beragam dan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas dalam bidang pendidikan di Departemen pelaksana, diperlukan pendekatan implementasi yang berbeda untuk mendukung prioritas Pemerintah Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhannya secara spesifik. Melalui pendekatan program, pemerintah mitra akan memiliki keterlibatan yang tinggi dalam proses perencanaan dan upaya untuk membangun rasa kepemilikan akan ditempatkan sebagai prioritas utama.

¹ Setelah Draft MCPM AWP 2009-2010 disetujui oleh AIBEP PCMU pada bulan November 2008, dokumen AWP ini mendapatkan pengesahan AIBEP PSC pada pertemuannya yang ke-5 tanggal 12 Desember 2008. Final Annual Work Plan (AWP) 2009-2010 – Managing Contractor Program Management (MCPM) Disahkan oleh AIBEP PSC pada tanggal 12 Desember 2008, rev/fin PCMU-Jun2009

Meskipun bantuan teknis telah memainkan peranan utama sebelumnya, namun ada wacana yang meningkat untuk mempertimbangkan input dan mekanisme lainnya, termasuk penggunaan program bantuan sektoral (*sector support program*), dan pendekatan sektor dan program. Khusus untuk sektor pendidikan, diupayakan adanya suatu keterlibatan yang progresif. Untuk itu, selama periode 2009/10 MCPM akan meningkatkan fokusnya kepada pendekatan program dan penggunaan sistem dan proses yang telah dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

2. Latar Belakang AWP 2009-2010

2.1. Prinsip-prinsip yang Mendasari AWP

Prinsip dan strategi utama yang memberikan panduan bagi MCPM dalam menyusun AWP ini adalah bahwa kegiatan dan proses yang tercakup didalamnya haruslah:

- Secara bersama diprioritaskan dan dikoordinasikan antara Pemerintah Indonesia dan Australia melalui suatu kemitraan yang berkesinambungan untuk mendorong adanya perbaikan yang signifikan dalam sektor pendidikan dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu “Peningkatan kesetaraan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu dengan tata kelola yang lebih baik, terutama untuk daerah tertinggal yang menjadi sasaran”².
- Sedapat mungkin mencerminkan ‘pendekatan program’ dimana kepemimpinan dan kepemilikan dari seluruh kegiatan adalah oleh Pemerintah Indonesia melalui Depdiknas dan Depag dan peranan MCPM adalah untuk mendukung Departemen dan Direktorat terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran ‘mereka’ dan tidak memaksakan suatu tujuan, sasaran maupun solusi tertentu.
- Memahami secara mendalam konteks sosial dan budaya sektor pendidikan di Indonesia.
- Fokus pada inisiatif yang dapat menghasilkan Outcome dan Output yang signifikan untuk jangka menengah dan panjang dan meninggalkan ‘jejak’ yang berkesinambungan yang dapat dijadikan landasan berpijak untuk pembangunan di masa mendatang.
- Sebagaimana telah direkomendasikan dalam *Mid-Term Review*³, memberikan pendekatan yang lebih menyempit dan intensif, dengan fokus area yang lebih sedikit dan pengurangan jumlah aktivitas untuk memungkinkan adanya peningkatan dalam hal pengelolaan, pencapaian outcome dan mutu pengawasan yang lebih baik.
- Fokus lebih kuat lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam membantu Depdiknas dan Depag untuk mengembangkan kapasitas individual, organisasi dan institusional (poin 2.3) melalui alih pengetahuan dan keterampilan dari para penasihat teknis kepada personil pemerintah dan juga kepada pemangku kepentingan lainnya dalam bidang pendidikan, sehingga memastikan adanya transisi yang tepat berawal dari sebuah program bantuan menjadi proses peningkatan dan pembangunan yang berkesinambungan.
- Bergerak dengan kecepatan yang dapat mendorong adanya kesinambungan dan rasa kepemilikan Pemerintah Indonesia terhadap perubahan, dan realistis terhadap hasil yang dapat dicapai hanya dengan bantuan eksternal.
- Mengembangkan kegiatan yang bersifat inovatif dengan mengulang dan memperbaiki pengalaman sukses yang didapat.
- Memasukkan M&E dalam setiap kegiatan yang diusulkan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi jangka panjang dan berkelanjutan untuk melihat efektifitas suatu kegiatan, sambil mengidentifikasi Outcome dan Target yang bisa menjadi bahan analisa yang lebih intensif dan longitudinal untuk menilai suatu perubahan.

² Program Manual 2007, Par 2.1, Hal 25.

³ Mid-Term Review, April 2008.

Perubahan dan penyempurnaan dari implementasi Q3 dan Q4 2008 dan kegiatan AWP yang diusulkan untuk 2009-2010 mencerminkan prinsip-prinsip tersebut diatas (Bagian 3).

2.2. Strategi Pengembangan Kapasitas

Sebagian besar pekerjaan MCPM difokuskan untuk pengembangan kapasitas sistem-sistem, proses dan staf Depdiknas dan Depag, sehingga kedua Departemen tersebut dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Untuk memperkuat MCPM dalam hal ini, diperlukan suatu Strategi Pengembangan Kapasitas. Strategi ini akan menjadi panduan internal yang jelas bagi para Penasihat MCPM mengenai pendekatan yang mereka gunakan untuk bekerjasama dengan institusi sektor dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan mereka.

Tujuan dari Strategi Pengembangan Kapasitas ini adalah untuk menstimulasi kegiatan refleksi dan diskusi, yang dapat mengarah kepada upaya pengembangan kapasitas. Strategi tersebut disusun berdasarkan pertanyaan yang kerap muncul sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas?
2. Apa pentingnya Pengembangan kapasitas?
3. Bagaimana pengembangan kapasitas memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi?
4. Pada tingkatan mana yang menjadi sasaran pengembangan kapasitas?
5. Bagaimana berbagai organisasi mengembangkan kapasitas mereka dan apa saja peran institusi eksternal?
6. Apa saja alat (tools) utama dalam pengembangan kapasitas?
7. Apa yang membuat sebuah upaya pengembangan kapasitas berhasil atau gagal?
8. Bagaimana seharusnya upaya pengembangan kapasitas direncanakan dan dikelola?
9. Mengapa dan bagaimana seharusnya upaya pengembangan kapasitas dievaluasi?
10. Hingga kapan suatu upaya pengembangan kapasitas harus didukung?

2.3. Mitra Program Pendidikan Dasar

Dalam mendukung pengembangan dan implementasi dari BEP, MCPM bekerjasama dengan AusAID, BAPPENAS dan Pemerintah Indonesia. Program tersebut dikelola melalui beberapa komite, termasuk Komite Pengarah Program (PSC), Unit Koordinasi dan Pengelola Program (PCMU), Unit Pengelola Program (PMU) dan kelompok-kelompok teknis yang dibentuk di berbagai Direktorat Depdiknas dan Depag.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Paris Declaration, PSC memiliki peran utama untuk mengarahkan program, sementara PCMU bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dan monitoring yang berkelanjutan. Kegiatan harian dilaksanakan oleh PMU dan kelompok-kelompok teknis (sub PMU) dari Direktorat dan dengan pihak inilah tim teknis MCPM bekerjasama secara langsung⁴.

Peran dan tanggung jawab dari berbagai komite diuraikan di dalam Program Manual⁵.

Sejak permulaan program, PCMU telah beberapa kali menerima laporan dari berbagai Direktorat Jenderal terkait Fokus Area dan kegiatan Mutu dan Tata Kelola, tetapi ini tidak menghasilkan suatu pendekatan yang terpadu atau menyeluruh dalam menyusun perencanaan. Selama periode AWP ini dan sebagai bagian dari proses pengembangan

⁴ Lihat Lampiran 3 untuk Direktorat Mitra.

⁵ Program Manual 2007, Bab A, Bagian 4.

kapasitas dan alih sistem dan keahlian, MCPM akan bekerja secara erat dengan PMU untuk memperkuat fokus dari program secara keseluruhan.

2.4. Pendanaan oleh Counterpart

Dalam pendekatan proyek, lazim dilakukan, bahkan sebelum penandatanganan perjanjian, bagi para donor dan negara penerima untuk menyetujui jenis dan jumlah sumber daya yang harus disediakan oleh pihak negara penerima donor sebagai counterpart. Input dari counterpart ini dapat berupa finansial dan/atau semacamnya. Biasanya sumber daya yang diperlukan ini bisa ditentukan secara akurat.

Dalam konteks AIBEP yang memberikan bantuan dalam cakupan yang luas namun masih dalam kerangka pembangunan Pemerintah, maka perincian mengenai pendanaan oleh counterpart tampaknya tidak bisa terlalu akurat.

Kurangnya akurasi tersebut disebabkan karena banyak kegiatan yang dibantu oleh donor sebenarnya hanya merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan satu-satunya sumber finansial yang digunakan secara langsung untuk beberapa kegiatan kemungkinan besar datang dari donor. Sebagai contoh inisiatif EQAIS, meskipun penting, adalah hanya salah satu bagian dari program pembangunan yang dilakukan oleh Depdiknas untuk penjaminan mutu guru. Beberapa bagian dibantu secara langsung oleh Bank Dunia melalui BERMUTU dan elemen lainnya yang didanai langsung oleh Pemerintah Indonesia. Tingkat pendanaan langsung oleh counterpart untuk kegiatan-kegiatan EQAIS mungkin minimal, utamanya melalui co-funding untuk workshop, tetapi kontribusi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan penjaminan mutu secara keseluruhan adalah sangat substansial dan oleh karenanya merupakan bantuan secara tidak langsung untuk EQAIS.

Pada umumnya, sebagian besar input langsung dari Pemerintah Indonesia adalah pengadaan personil untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dan pengembangan sistem baru melalui bantuan penasihat teknis yang diberikan oleh donor, dalam hal ini MCPM. Dukungan dari Pemerintah untuk program pengembangan kapasitas melalui alih keterampilan, pengetahuan dan sistem dari penasihat teknis kepada personil pemerintah secara jelas dapat dilihat dari kemauan mereka untuk mengirimkan staf dari setiap tingkatan – pusat, propinsi, kabupaten dan sekolah – untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya. Karena fokus BEP selama 18 bulan sebagian besar terletak pada pengembangan kapasitas, maka sangat penting bagi Pemerintah Indonesia melalui berbagai Direktoratunya untuk terus menyediakan sumber daya manusia yang dapat menerima alih pengetahuan tersebut dan dapat memastikan kesinambungan pembangunan yang dilakukan. Ini merupakan tantangan besar pada setiap upaya pembangunan karena banyak diantara mereka yang diutamakan untuk menerima alih keterampilan dan pengembangan kapasitas tersebut juga memiliki tugas lainnya dalam pelayanan pendidikan. Menyeimbangkan antara kegiatan rutin pelayanan pendidikan dengan kegiatan pengembangan kapasitas merupakan suatu tantangan besar.

Tentu saja, ada input yang bersifat non finansial dan non personil, termasuk pengadaan ruang kantor yang sangat membantu MCPM dan kelancaran program, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan sekolah di Depdiknas dan Depag, penjaminan mutu guru dan sekolah dan EMIS, FMIS dan kegiatan-kegiatan RENSTRA di Depdiknas.

Rincian dana pendamping (counterpart funding) akan diberikan kepada PCMU pada bulan Nopember 2008.

2.5. Program Close

Berdasarkan masukan dari AusAID, AWP ini dibuat dengan asumsi kontrak antara AusAID dan MCPM diperpanjang hingga 30 Juni 2010. Jelas, sebagaimana diperkirakan pada kontrak aslinya, hal ini berarti bahwa periode penutupan dimulai pada akhir Q1 2010

dengan laporan penuntasan akhir yang jatuh tempo dalam 90 hari sebelum masa periode kontrak berakhir.

MCPM telah mempertimbangkan persyaratan penutupan yang baik saat membuat rincian akhir AWP ini. Walau demikian, rincian 'exit plan' baru akan diberikan kepada AusAID dan pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk mendapatkan masukan dan persetujuan mereka, paling telat akhir Januari 2009.

3. Ruang Lingkup AWP 2009-2010

3.1. Fokus Area Utama

Berbagai prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan dasar bagi perpanjangan BEP terutama terkait dengan kegiatan Mutu dan Tata Kelola dan telah mengarah kepada, melalui pembahasan dengan AusAID dan Pemerintah Indonesia, pengurangan jumlah Fokus Area dan penyempurnaan dari berbagai kegiatan yang tengah berlangsung. Namun demikian, usulan Fokus Area dan kegiatan untuk 2009-2010 masih selaras dengan RENSTRA Nasional dan dapat menjadi mekanisme lebih lanjut untuk *Strategic and Action Plan* di tingkat Direktorat untuk dapat mencerminkan RENSTRA dengan baik.

Bagian berikut adalah ringkasan singkat dari perubahan yang ada dan penekanan yang harus diikuti dalam dukungan BEP dan MCPM kepada Pemerintah Indonesia untuk 2009-2010⁶.

1. Peningkatan Akses

1.1. *Pembangunan Sekolah Berbasis Masyarakat Depdiknas*

Penyelesaian 1500 SMP pada pertengahan 2009 sesuai dengan Kriteria dan Panduan yang telah disetujui oleh Depdiknas dan AusAID dan telah disetujui pula oleh PSC. Per tanggal 1 Oktober 2008, lebih dari 800 SMP sudah selesai dan beroperasi, dan 700 lainnya masih dalam berbagai tahap pembangunan.

1.2. *Pembangunan Sekolah Berbasis Masyarakat Depag*

Penyelesaian 500 MTs pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan Kriteria dan Panduan yang telah disepakati oleh Depag dan AusAID dan disetujui oleh PSC. Per tanggal 1 Oktober 2008, sebanyak 45 MTs telah selesai dan beroperasi dan sebanyak 34 lainnya masih dalam tahap pembangunan. Sisanya sebanyak 421 lokasi sedang dalam tahap verifikasi akhir dan menunggu persetujuan dengan dikeluarkannya SK Menteri.

Pengadaan CDC juga termasuk dalam poin 1.1 dan 1.2 karena pengadaan ini merupakan bantuan mendasar dari MCPM kepada Depdiknas, Depag dan komite pembangunan sekolah untuk menjalankan dan menyelesaikan dengan sempurna program pembangunan sekolah. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, MCPM sendiri bukanlah pihak yang membangun sekolah, namun, melalui CDC dan input lainnya, MCPM membantu baik Depdiknas dan Depag untuk memenuhi jadwal pembangunan dan mutu bangunan sekolah yang telah disepakati antara Pemerintah Australia, Depag dan Depdiknas.

MCPM juga telah memberikan bantuan berupa pengembangan sistem pelaporan konstruksi (CRS) dan juga sistem untuk penanganan keluhan (CHS). Diharapkan, bahwa inisiatif-inisiatif ini dapat diserahkan oleh MCPM kepada dan dilembagakan oleh Depdiknas pada saat program ini berakhir.

1.3. *Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah*

Sebelumnya pada Pilar 2, kegiatan ini menjadi fokus untuk tim infrastruktur MCPM, Depdiknas dan Depag dan dirancang untuk memastikan bahwa umur dan durability dari investasi yang telah dilakukan di bawah BEP.

Detil dari kegiatan yang diusulkan untuk Fokus Area di atas dapat dilihat pada Lampiran A (i).

⁶ Sistem penomoran yang digunakan dalam Program Manual 2007 (hal 26-27 dan hal lainnya) perlu untuk diubah untuk memastikan kejelasan dan mencerminkan perubahan yang diajukan dalam AWP 2009-2010. Sebagai contoh, kegiatan CDC direkomendasikan untuk dimasukkan di bawah kegiatan Pembangunan Sekolah (1.1. dan 1.2) dan kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah diletakkan di bawah Pilar 1(1.3) dan bukan Pilar 2.

2. Peningkatan Mutu

Kajian yang terus berlangsung atas kegiatan program, termasuk juga *mid-term review* (MTR) oleh Depdiknas dan Depag, AusAID dan MCPM telah mengindikasikan potensi yang besar untuk memfokuskan upaya peningkatan mutu melalui MCPM kepada dua area – Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (EQAIS) dan inisiatif WSD dan WDD.

Keduanya berpotensi untuk mengarah kepada pelembagaan dari “*best practice*” yang dapat mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam mutu pembelajaran di tingkat sekolah secara nasional. Ini mengarah kepada keputusan untuk membuat kegiatan terkait dengan Pendidikan Non-Formal dan Pusat Penilaian (*Assessment Center*) untuk 2009-2010.

Bagian berikut ini menerangkan mengenai aspek-aspek utama dari kedua area bantuan MCPM tersebut kepada Pemerintah dan juga aspek-aspek utama untuk isu lintas-area yaitu Pendidikan Inklusif dan Gender. Detil dari kegiatan untuk Fokus Area ini dapat dilihat pada Lampiran A (ii).

Sistem Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (EQAIS)

Membantu pemerintah dalam pengaturan, pengembangan dan implementasi dari sistem EQAIS yang terbagi ke dalam dua komponen utama – peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan penjaminan mutu sekolah.

2.1. Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus Area ini, sebelumnya ada di bawah poin 2.2 dalam AWP 2008, mencakup pengembangan berkelanjutan atas kapasitas dari para personil kunci dalam peningkatan mutu Pendidikan di tingkat sekolah, yaitu guru, kepala sekolah dan para pengawas sekolah.

Ada beberapa institusi lain yang membantu Depdiknas dan Depag untuk bidang ini dan oleh karenanya pekerjaan MCPM untuk 18 bulan terakhir ini akan difokuskan khususnya untuk memberikan dukungan kepada Direktorat terkait dalam penyusunan berbagai kerangka kerja dan sistem untuk Pengembangan Profesi Berkelanjutan atau *Continuing Professional Development* (CPD) dan khususnya pengembangan kebijakan dan sistem guna memperkuat kapasitas para kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Untuk memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap upaya pengembangan, maka Fokus Area ini (2.1) mengintegrasikan pekerjaan di bawah 2.4 yang telah dikerjakan sebelumnya pada tahun 2007-2008 – Bahan Belajar Mengajar, dan 2.5 – Pengembangan Kurikulum. Pengintegrasian ini akan memungkinkan penuntasan dari sasaran pembangunan kapasitas di Depag dalam hal pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pengelolaan kurikulum di setiap tingkat sub-sektor Islam. Hal ini juga akan memungkinkan pengembangan kapasitas lebih lanjut dari Pusbuk dalam mengemban perannya sebagai sistem pendukung guru melalui penyediaan material berbasis web seperti buku pelajaran, panduan dan manual.

2.2. Penjaminan Mutu Sekolah

Komponen Penjaminan Mutu ini memiliki fokus yang lebih luas dan dalam, dibandingkan dengan 2.1 dan mengembangkan pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan melalui Fokus Area 2.3 Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu (AWP 2008) dalam mendukung pengembangan aspek-aspek kunci dari penjaminan mutu dari tingkat Departemen hingga tingkat sekolah.

Fokusnya terletak pada (a) bantuan kepada BSNP (sebelumnya Fokus Area 2.6 AWP 2008) dan pelembagaan dan implementasi dari standar nasional dan standar Kinerja terkait yang diikuti dengan pengembangan kerangka regulasi untuk Depdiknas dan Depag; (b) pengembangan LPMP di tingkat propinsi; (c) penilaian/asesmen kapasitas untuk penjaminan mutu di tingkat kabupaten; dan (d) pengembangan berbagai proses untuk *school self assessment* dan *targeted school reviews*.

Sebagai tambahan, komponen ini mencakup bantuan yang bersifat terbatas untuk *Assessment Centre* dalam pembangunan kapasitas untuk menganalisa dan menggunakan hasil komparatif internasional dari pengujian seperti dengan PISA dan TIMMS.

Whole School Development and Whole District Development

2.3. Whole School Development (Fokus Area 2.9 dalam AWP 2008)

2.4. Whole District Development (Fokus Area 2.10 dalam AWP 2008)

Inisiatif WSD dan WDD ditetapkan sebagai prioritas utama selama periode 18 bulan dari Fase 1 BEP, karena inisiatif ini:

- (i) memperlihatkan bagaimana berbagai kegiatan yang dikembangkan melalui bantuan MCPM di bawah EQAIS dapat secara 'nyata' diaplikasikan di lingkungan sekolah – sebagai contoh: Standar Nasional dan *School Self-Evaluation*;
- (ii) menjadi suatu strategi – tidak seperti bantuan internasional lainnya dalam peningkatan mutu sekolah dan oleh karenanya menawarkan suatu pendekatan yang dapat dilembagakan secara nasional sebagai bagian dari upaya yang berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia untuk memastikan pendidikan dasar yang bermutu untuk semua;
- (iii) akan memfasilitasi pengarusutamaan berbagai kebijakan dan praktik untuk mendukung Pendidikan Inklusif dan Persamaan Gender; dan
- (iv) akan memastikan bahwa sekolah yang dibangun melalui BEP dan kabupaten pengelolanya menerima dukungan yang kuat dan berkesinambungan dalam mengembangkan mutu dasar bagi penyedia layanan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama.
- (v) akan mendampingi Direktorat Non Formal dan Informal Depdiknas dalam membangun hubungan dengan komunitas Sekolah BEP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan Paket A dan B juga program-program kecakapan diri termasuk Kemampuan Baca Tulis Orang Dewasa (*Adult Literacy*).

Secara keseluruhan, inisiatif WSD dan WDD menawarkan upaya yang signifikan untuk mendukung daerah miskin dan terpencil di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar mereka untuk perekonomian lokal dan nasional dan juga untuk status ekonomi dari individu dan keluarga di daerah dimaksud.

Komponen lintas area (cross-cutting)

2.5. Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Layanan Pendidikan (Focal Area 2.11 in AWP 2008)

2.6. Pendekatan Terpadu terhadap Pendidikan Inklusif (Focal Area 2.12 in AWP 2008)

Pengarusutamaan dari prinsip dan praktik kesetaraan gender dan pendidikan inklusif merupakan elemen yang menyatu dengan WSD dan WDD. Memang perhatian terhadap *best practice* dalam kesetaraan gender merupakan bagian mendasar dari seluruh kegiatan MCPM dan secara langsung didukung oleh para penasihat MCPM setiap saat.

Pendekatan ini didukung oleh riset yang menyatakan bahwa perubahan perilaku yang paling sistemik dapat dicapai dengan menerapkan praktik-praktik persamaan gender melalui kegiatan seluas mungkin dibandingkan dengan melalui strategi yang tersentralisir.

Fokus utama untuk dukungan langsung MCPM terhadap dua Fokus Area yang sama pentingnya ini (2.5 dan 2.6) adalah untuk membantu Depdiknas dan Depag menyusun Peraturan Menteri yang diperlukan yang terkait dengan Panduan dan strategi di tingkat nasional yang kemudian disosialisasikan kepada setiap Propinsi dan Kabupaten sebagai dasar untuk pembangunan yang sedang berlangsung dan yang akan datang.

3. Peningkatan Tata Kelola

3.1. RENSTRA Sektor: Dukungan terhadap Proses Perencanaan

3.2. Sistem Informasi Pendidikan Depdiknas

3.3. Sistem Pengelolaan Keuangan Depdiknas

3.4. Audit Internal

3.5. Inovasi ICT dalam Pendidikan

Kajian atas kegiatan MCPM untuk mendukung upaya peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas telah mendorong terbentuknya dua fokus area yang berkelanjutan dan intensif di bawah BEP selama 2009-2010, yaitu – RENSTRA Sektor dan EMIS. Detil dari kegiatan Pilar 3 dapat dilihat pada Lampiran A (iii).

Kedua area tersebut menyokong dan menjadi panduan untuk perencanaan dan implementasi yang efektif dari kegiatan BEP dalam mendukung peningkatan akses dan partisipasi dan peningkatan penjaminan mutu dan implementasinya. RENSTRA Depdiknas 2006-2009 memberikan dasar strategis bagi BEP dan bagi keterkaitan MCPM dengan Departemen dan Direktorat terkait, sementara sistem EMIS (PADATI) telah memberikan informasi penting baik untuk perencanaan maupun untuk monitoring kemajuan secara berkelanjutan. Namun sayangnya, bukti yang ada menunjukkan bahwa RENSTRA Depdiknas belum tercerminkan sebagai mana mestinya dalam rencana strategi Unit ataupun Propinsi.

RENSTRA Pendidikan Islam telah selesai disusun dengan bantuan MCPM, tapi hal ini belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam struktur dan proses organisasi.

RENSTRA Nasional 2010-2014 yang merupakan strategi sektor yang komprehensif serta tujuan nasional yang telah disepakati, harus menjadi dokumen utama dalam perencanaan di tingkat Departemen, Direktorat, Propinsi dan Kabupaten. Hal ini akan difokuskan kepada kegiatan MCPM di bawah Fokus Area 3.1 – RENSTRA Sektor: Dukungan terhadap Proses Perencanaan.

Para penasihat akan bekerjasama dengan CSAS untuk bidang ini dan secara aktif mendorong keterlibatan antara organisasi terkait untuk tujuan penyusunan RENSTRA Pendidikan Nasional tunggal atau *single National Education RENSTRA*. Upaya sentral dalam kerjasama ini adalah adalah pengintegrasian prinsip-prinsip kesetaraan, termasuk gender, sebagai cara untuk menuangkan RENSTRA ke dalam rencana tahunan dan diteruskan ke dalam kerangka kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang sesuai untuk setiap tingkatan. Fokus dari MCPM utamanya adalah pengembangan kapasitas dan sistem kerja counterpart, CSAS akan bekerja pada tingkat penyusunan kebijakan untuk membantu para pembuat keputusan memformulasikan sasaran yang memungkinkan untuk dicapai yang akan diterjemahkan ke dalam dokumen RENSTRA Depdiknas dan Depag dengan bantuan dari para penasihat MCPM.

Data komprehensif dan akurat mengenai sekolah, guru, bangunan dan keuangan adalah penting jika sektor dan sub-sektor ingin menyusun rencana secara efektif dan memonitor implementasi dan kemajuan RENSTRA menuju MDG dan EFA. Namun demikian, berbagai kelemahan signifikan tampak jelas dalam hal cakupan, keakuratan dan ketepatan waktu dari data yang berasal dari PADATI yang ada sekarang.

Kelemahan-kelemahan ini telah membuat banyak Direktorat melakukan analisa dan pengumpulan data secara independen dan sangat tingginya tingkat *non-response* pada tingkat sekolah dan kabupaten terhadap survey-survey nasional. Mendukung PSP untuk bekerjasama dengan pengguna data untuk mengembangkan EMIS yang bisa beroperasi

dan bermutu adalah merupakan fokus utama dari bantuan MCPM di bawah Fokus Area 3.2 – Sistem Informasi Pendidikan Depdiknas.

Sebagai tambahan untuk fokus RENSTRA dan EMIS, MCPM melalui Pilar 3 akan terus memberikan bantuan pengembangan kapasitas guna meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan audit internal dan memfasilitasi pengembangan kemitraan pemerintah/swasta dalam pembangunan dan peningkatan pendidikan melalui program Bantuan Inovasi ICT (TIK – Teknologi Informasi dan Komunikasi).

3.2. Ringkasan Usulan Fokus Area untuk 2009-2010

1. Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama

- 1.1 Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama (Depdiknas)
- 1.2 Peningkatan Akses atas Pendidikan Menengah Pertama (Depag)
- 1.3 Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah

2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

- Sistem Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (EQAIS)
 - 2.1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 2.2 Penjaminan Mutu Sekolah
- Perencanaan Sekolah dan Kabupaten Terpadu (WSD/WDD)
 - 2.3 Perencanaan Sekolah Terpadu (Whole School Development)
 - 2.4 Perencanaan Kabupaten Terpadu (Whole District Development)
- Komponen *Cross-Cutting* yang mendukung Kesetaraan Gender pada Pendidikan Dasar
 - 2.5 Peningkatan Kesetaraan Gender
 - 2.6 Pendekatan Terpadu untuk Pendidikan Inklusif

3. Peningkatan Tata Kelola dalam Penyediaan Pendidikan Dasar

- 3.1 Dukungan terhadap RENSTRA
- 3.2 Sistem Informasi Pendidikan Depdiknas
- 3.3 Sistem Pengelolaan Keuangan Depdiknas
- 3.4 Audit Internal
- 3.5 Inovasi ICT dalam Pendidikan

3.3. Monitoring dan Evaluasi

a. Tantangan yang dihadapi oleh Pendekatan Program

Monitoring dan Evaluasi (M&E) memiliki tantangan yang cukup berat apabila menggunakan pendekatan program. Tidak seperti struktur proyek normal pada umumnya dimana kontraktor dapat dianggap bertanggung jawab untuk seluruh output, dalam pendekatan program kepemimpinan, pengelolaan dan Pelaksanaan ada pada Pemerintah melalui Direktorat atau Unit dibawahnya. Sebagai tambahan, dalam pendekatan program, kegiatan yang didanai selalu menjadi bagian dari strategi pembangunan pemerintah sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Maka jelas adanya bahwa pengadopsian pendekatan program lebih mempersulit untuk menentukan fokus M&E yaitu apakah kepada sukses dan dampak dari program pembangunan Pemerintah secara keseluruhan ataukah hanya elemen-elemen spesifik yang didanai oleh donor atau bahkan hanya elemen-elemen (jika ada) yang didanai oleh donor yang tanggungjawabnya telah dialihkan kepada kontraktor, atau atas dua hal atau bahkan ketiga hal tersebut. Inti permasalahannya adalah bahwa pada pendekatan program fokusnya adalah kepada sistem dan setiap sistem tersebut saling terkait dan

sangat tergantung satu sama lain. Hal ini tidak selalu mempengaruhi metodologi untuk monitoring dan evaluasi dari indikator-indikator, tetapi akan mempengaruhi bagaimana hasil yang tercapai diinterpretasikan dan dievaluasi.

b. Peserta M&E

Dalam hal BEP, ada beberapa pemangku kepentingan yang peduli terhadap dampak dan efektifitas dari kegiatan-kegiatan program yang dilakukan dan didukung oleh Pilar 1, 2 dan 3, yaitu:

- Pemerintah Indonesia, terutama Depdiknas, Depag dan BAPPENAS;
- Pemerintah Australia (AusAID);
- MCPM dan CSAS.

Setiap pemangku kepentingan ini akan menggunakan data M&E yang sama meskipun untuk perspektif yang mungkin berbeda dan tentu saja untuk alasan yang berbeda pula.

c. Outcome, Output, Tanggungjawab dan Indikator Kinerja

Tabel 1 menunjukkan Fokus Area dari program, outcome yang ingin dicapai terkait dengan masing-masing fokus area dan output penting agar outcome yang diinginkan dapat dicapai dan yang akan menjadi obyek dari M&E. Tabel tersebut juga menunjukkan pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengidentifikasian indikator kinerja untuk mengevaluasi efektifitas atas berbagai Kegiatan tersebut.

Indikator kinerja diusulkan karena dapat menunjukkan pencapaian menyeluruh dari suatu program, baik itu pada tingkat makro maupun mikro, dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari Pemerintah Indonesia dan AusAID dan menyediakan data penting untuk MCPM. Kebanyakan dari data-data tersebut bersifat kuantitatif dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pembangunan di masa mendatang ataupun sebagai pembandingan dengan tolak ukur sebelumnya.

Tabel ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa pelaksanaan BEP adalah hampir seluruhnya merupakan tanggung jawab langsung Pemerintah melalui berbagai Direktorat dan Unit dibawahnya, di mana peran MCPM hanya memberikan dukungan dan pengembangan kapasitas. Hanya untuk kasus-kasus tertentu, seperti pengadaan dan pengelolaan CDC dan aspek inti dari WSD dan WDD yang pada saat ini lebih kurang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari MCPM terkait kegiatan, hasil serta dampaknya. Namun demikian, pada kasus-kasus tersebut, salah satu sasaran MCPM dalam 18 bulan mendatang adalah memastikan agar elemen-elemen ini telah terbentuk secara sistematis dalam lingkup Pemerintah.

Ketika menyusun laporan atas hasil dari M&E, sangatlah penting untuk diingat adanya tanggung jawab dan waktu yang berbeda-beda bagi suatu dampak untuk dapat tercapai sepenuhnya.

Lampiran B menyediakan informasi mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas M&E, sumber data dan frekuensi pelaporan atas indikator-indikator yang tercantum dalam Tabel 1. MCPM dan khususnya Tim M&E, tampak memiliki peran sentral yang lebih banyak dalam proses M&E, merefleksikan peminat yang lebih luas atas M&E ini dibandingkan atas implementasi dan kebutuhan akan pendekatan yang sangat kohesif. Namun demikian, kedua PMU dan kelompok teknis (Sub-PMU) terkait dengan berbagai kegiatan program akan memainkan peran Utama dalam mendukung perancangan M&E, penyediaan Informasi dan pandangan, dan sebagai kritisi analitis atas penilaian/asesmen yang dihasilkan dan kesimpulan yang didapat dari data tersebut.

d. Strategi-strategi

Setiap kegiatan M&E⁷ akan melibatkan berbagai tim (Pemerintah Indonesia dan MCPM) dan bersama dengan para penasihat M&E MCPM mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi yang tepat untuk monitoring dan menilai implementasi, kemajuan, efektifitas, dan dampak dari suatu kegiatan. Kuesioner, laporan pengamat partisipan dan non-partisipan, *anecdotal report* dan laporan wawancara akan memberikan suatu umpan balik dan informasi yang penting meskipun lebih banyak bersifat kualitatif. Namun demikian, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap Pilar yang hanya dapat diukur hasil dan keluarannya dalam jangka panjang. Untuk hal yang demikian sangatlah penting kiranya bahwa program M&E melakukan studi dengan skala besar untuk dapat memberikan data untuk evaluasi di masa mendatang dan juga menarik dari sumber data resmi seperti PADATI dan laporan dari Direktorat. Karena seringkali data resmi tersebut tidaklah lengkap, tidak akurat atau tidak tersedia pada saat dibutuhkan, MCPM telah membangun database yang cukup komprehensif yang memungkinkan dilakukannya perbandingan dan analisa lintas provinsi, kabupaten dan secara nasional.

Dua studi utama yang direncanakan selesai pada Q4 2008 adalah:

- Sebuah survei kuesioner atas dampak dari program pembangunan sekolah BEP 2006-2008 mengenai angka partisipasi untuk menilai apakah program tersebut mencapai sasaran untuk menyediakan kenaikan angka partisipasi sebesar 330,000 di daerah-daerah sasaran yang direncanakan sebagai outcome utama dari BEP. Survei ini memberikan data mengenai kualitas dan kelayakan fasilitas sekolah, pengelolaan sekolah dan data komite pembangunan sekolah, dan serangkaian data mengenai tingkat partisipasi, Pendidik dan sumber daya. Seluruh sekolah yang dibangun melalui BEP yang telah beroperasi sejak bulan Oktober 2008 akan disurvei. Data yang diperoleh akan memberikan pengukuran kinerja yang dibutuhkan untuk laporan tahunan baik oleh MCPM dan juga AusAID.
- Terkait dengan survey tersebut di atas, diusulkan untuk melakukan studi mendalam (*in-depth interview*) atas *sample* dari beberapa sekolah BEP, termasuk *sample* atas sekolah penunjang dan kabupaten BEP program 2006-2007, yang memfokuskan kepada dampak jangka pendek dan jangka panjang atas sekolah-sekolah baru tersebut terhadap lingkungan masyarakat dan atas inisiatif WSD dan WDD mengenai pengelolaan sekolah dan kabupaten dan mengenai peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Laporan mengenai 'Perubahan Siginifikan' akan menjadi elemen kualitatif utama dari studi ini. Adapun yang akan termasuk dalam daftar *interview* adalah guru, pemangku kepentingan dalam lingkup pendidikan, orang tua murid, siswa dan pemimpin masyarakat/ dunia usaha.⁸

Studi kedua tersebut di atas merupakan studi yang lebih kualitatif dan akan didukung dengan informasi yang secara terpusat dikumpulkan dari para pemangku kepentingan dalam lingkup Pemerintah, Technical Assistance (TA) dan partisipan serta penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang diadakan oleh program.

Kedua studi ini akan dilakukan kembali pada Q3 2009 dan kemungkinan pada tahun 2010 sebagai bagian dari analisis longitudinal untuk mengklarifikasi temuan-temuan sebelumnya. Survey yang akan dilakukan pada tahun 2009 nanti akan juga dilakukan atas sekolah-sekolah yang telah selesai sebelum tahun ajaran 2009-2010.

Sebagai tambahan dari studi-studi tersebut dan juga kegiatan M&E yang sebelumnya telah disebutkan, para penasihat MCPM akan melakukan M&E yang sesuai untuk menilai

⁷ All M&E has been budgeted for within the specific Activity Budgets.

⁸ APPR Information Collection Plan for 2008-2009, AusAID Education Sector, AusAID 2008.
Final Annual Work Plan (AWP) 2009-2010 – Managing Contractor Program Management (MCPM)
Disahkan oleh AIBEP PSC pada tanggal 12 Desember 2008, rev/fin PCMU-Jun2009

efektifitas input mereka masing-masing dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah. MCPM telah melembagakan suatu sistem Rencana Kerja Penasihat⁹ yang mencakup acuan atas output dan perubahan yang ingin dicapai oleh para penasihat untuk suatu waktu tertentu. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar untuk menilai dampak dari pekerjaan para penasihat dan hasilnya akan dilaporkan setiap enam bulan selama 2009-2010 dan akan memberikan berbagai perspektif disamping perspektif M&E yang dilakukan untuk setiap kegiatan dan fokus area.

Sementara itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dampak keseluruhan dari Pelaksanaan BEP pada tingkat outcome mungkin tidak akan secara langsung terlihat atau dirasakan dalam beberapa tahun ke depan, penyatuan data dari berbagai sumber memungkinkan MCPM untuk mempersiapkan analisa dan laporan terkini atas kemajuan-kemajuan terkait outcome yang dituju dan juga kemajuan-kemajuan menuju pencapaian Maksud dan Tujuan program. Dalam mempersiapkan laporan tersebut, MCPM akan bekerja sama dengan AusAID dan CSAS dan juga kedua PMU dan BAPPENAS. Bila M&E berfokus pada berbagai aspek pelaksanaan organisasional dan institusional, termasuk didalamnya bagaimana mengoptimalisasikan kemitraan terkait peningkatan mutu dan tata kelola pemerintahan, *Program Director* MCPM akan memberikan masukan dalam proses dan analisa M&E.

Usulan yang diajukan adalah menyerahkan tiga laporan tersebut – fokus laporan akan ditentukan pada awal tahun 2009 – dengan waktu penyerahan pada pertengahan dan akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010.

MCPM akan berkolaborasi dengan CSAS dalam memfinalisasi rincian dari program M&E untuk 2009-2010 sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan outcome dan output M&E dan kebutuhan spesifik dari CSAS untuk monitoring kinerja sektor, kajian kebijakan dan Bantuan.¹⁰

e. Melakukan asesmen menggunakan data

Pendekatan yang diusulkan untuk M&E untuk 18 bulan mendatang dirancang untuk memenuhi persyaratan spesifik dari para pemangku kepentingan utama sembari melakukan penilaian atas kompleksitas dan keberagaman dari pembangunan yang sudah dicetuskan dan didukung oleh program ini. Berbagai data yang telah dikumpulkan – apakah itu melalui survey, wawancara, atau laporan-laporan resmi dan statistik apakah itu dari para pelaksana, pengamat atau penerima bantuan – memberikan kekayaan informasi yang tidak bisa diperoleh hanya melalui statistik saja. Kemampuan untuk menyatukan informasi dari berbagai sumber dan berbeda tipe, memberikan peluang dan potensi untuk memahami secara lebih baik signifikansi dari data dan pentingnya setiap inisiatif untuk pendidikan dasar.

⁹ Kerangka Kerja Penasihat sangatlah penting untuk mengklarifikasi perbedaan antara outcome dan output yang diinginkan kedua sektor (Depdiknas dan Depag) dan kontribusi dan output dari MCPM. Bahkan, Kerangka Kerja Penasihat telah memainkan peranan penting dalam persiapan akhir dari lembar Kegiatan untuk setiap Fokus Area (Lampiran A). Format dari Kerangka Kerja Penasihat dapat dilihat pada Lampiran H.

¹⁰ Program Manual 2007, Par 24.2, Hal 131.
Final Annual Work Plan (AWP) 2009-2010 – Managing Contractor Program Management (MCPM)
Disahkan oleh AIBEP PSC pada tanggal 12 Desember 2008, rev/fin PCMU-Jun2009

4. Ringkasan Outcome dan Output Utama

Tabel 1 memperlihatkan **Kerangka Monitoring Kinerja Berbasis Outcome** untuk periode Januari 2009 hingga 30 Juni 2010.

Tabel 1: AIBEP: 2009-10 Kerangka Monitoring Kinerja Berbasis Outcome¹¹

OUTCOME	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KINERJA
Pilar 1: PENINGKATAN AKSES			
1.1 Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama (Depdiknas) LA: A\$50,000,000 SA2: A\$8,779,400 C: A\$?	1.1.1 1500 sekolah menengah pertama baru dan 'satu atap', yang menyediakan 250,000 bangku pendidikan tambahan, yang dibangun sesuai dengan kriteria yang disepakati dan dengan kualitas yang baik.	PMU Depdiknas	(a) APK dan APM SD dan SMA di kabupaten/kota sasaran (b) Jumlah bangku siswa baru yang disediakan oleh sekolah. (c) Persentase Komite Pembangunan Sekolah yang mematuhi peraturan pengadaan. (d) Nilai Mean pada Daftar Periksa Mutu (<i>Quality Checklist</i>), diambil di semua sekolah. (e) Jumlah sekolah yang mendapat sertifikat BAST II oleh Depdiknas dan Komite Pembangunan Sekolah.
	1.1.2 1500 Komite Pembangunan Sekolah telah dibentuk dan beroperasi.	Pembentukan - TTP dan TTK; Pemberdayaan – MCPM	(a) Persentase Komite Pembangunan Sekolah BEP dengan perwakilan aktif dari masyarakat. (b) Persentase pertemuan Komite Pembangunan Sekolah setidaknya setiap dua bulan sekali.
	1.1.3 Pengadaan dan pengelolaan CDC untuk mensupervisi Output 1.1.1 untuk peningkatan standard dan sesuai dengan ToR. (termasuk monitoring independen berkala terhadap lokasi).	MCPM	(a) Jumlah workshop pelatihan/sosialisasi yang diadakan. (b) Persentase CDC yang menghadiri setiap workshop terkait. (c) Persentase Komite Pembangunan Sekolah yang menghadiri setiap workshop terkait. (d) Jumlah kepuasan atas gambar 'as built' yang ditanda tangani oleh CDC dan Komite Pembangunan Sekolah. (e) Persentase lokasi yang mematuhi peraturan BEP dalam hal material yang mengandung asbestos (ACM), penghijauan, dan <i>sustainable timber</i> (f) Persentase kepatuhan pembangunan sekolah BEP dengan standar Pemerintah Indonesia mengenai air dan sanitasi serta bangunan tahan gempa bumi. (g) Jumlah komplain terhadap CDC yang tercatat dalam CHS. (h) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh TTP: (i) tidak pernah, (ii) sekali, (iii) dua kali, (iv) tiga kali atau lebih (i) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh TTK: (i) tidak pernah, (ii) sekali; (iii) dua kali; (iv) tiga kali atau lebih. (j) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh Konsultan Lapangan MCPM: (i) tidak pernah, (ii) sekali; (iii) dua kali; (iv) tiga kali atau lebih. (k) Persentase isu yang diangkat oleh Konsultan Lapangan MCPM di mana ada bukti tindak lanjut yang memuaskan.
	1.1.4 Sistem Laporan Konstruksi (CRS) and Sistem Penanganan Keluhan (CHS) telah beroperasi dan terlembaga di dalam sistem Depdiknas.	Depdiknas PMU	(a) Jumlah laporan yang dikirimkan oleh PMU Depdiknas kepada PCMU termasuk tindak lanjutnya. (b) Persentase total keluhan yang diterima yang sudah di 'close' oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. (c) Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses keluhan sejak keluhan tersebut diterima sampai berstatus 'closed.'

¹¹ Outcome yang tertera pada Kerangka ini adalah outcome utama yang diharapkan dari aktifitas yang didukung oleh MCPM selama periode Januari 2009 hingga 30 Juni 2010. Kegiatan tersebut telah disetujui oleh AusAID sebagai dasar untuk Monitoring Kinerja Tahunan. Beberapa indikator (*highlighted*) dimasukkan untuk memenuhi persyaratan spesifik dari MCPM dan BEP terkait dengan APPR 2008-2009.

OUTCOME	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KINERJA
	1.1.5 Kajian atas pengadaan dilakukan dan Laporan Pengadaan diproduksi.	TTP dan TTK; MCPM (FMs)	(a) Laporan pengadaan selesai. (b) Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan di masa datang disertakan dalam Laporan Pengadaan bilamana diperlukan. (c) Kegiatan peningkatan kapasitas diidentifikasi sebagaimana mestinya.
1.2 Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama (Depag) SA1: A\$48,862,504 SA2: A\$5,018,572	1.2.1 500 Madrasah Tsanawiyah swasta baru dan 'satu atap', yang menyediakan 80,000 bangku sekolah tambahan, dibangun sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dan memenuhi tingkat kualitas yang lebih baik.	PMU Depag	(a) APK dan APM SD dan SMP di kabupaten-kabupaten/kotasasaran. (b) Jumlah bangku siswa baru yang disediakan oleh madrasah. (c) Persentase Komite Pembangunan Madrasah yang mematuhi peraturan pengadaan. (d) Nilai Mean pada Daftar Periksa Mutu (<i>Quality Checklist</i>), diambil dari semua madrasah sekolah. (e) Jumlah sekolah mendapat sertifikat BAST II oleh Depag dan Komite Pembangunan Madrasah.
	1.2.2 Komite Pembangunan Sekolah Madrasah (500) telah dibentuk.	Yayasan Pesantren	(a) Persentase Komite Pembangunan Madrasah BEP dengan perwakilan aktif dari masyarakat. (b) Persentase pertemuan Komite Pembangunan Madrasah setidaknya setiap dua bulan sekali.
	1.2.3 Pengadaan dan pengelolaan CDC untuk mensupervisi Output 1.2.1 untuk peningkatan standard dan sesuai dengan ToR (termasuk monitoring independen berkala terhadap lokasi).	MCPM	(a) Jumlah workshop pelatihan/sosialisasi yang diadakan. (b) persentase CDC yang menghadiri workshop terkait. (c) persentase Komite Pembangunan Madrasah yang menghadiri workshop terkait. (d) Jumlah kepuasan atas gambar 'as built' yang ditanda tangani oleh CDC dan Komite Pembangunan Madrasah (e) Persentase lokasi yang mematuhi peraturan BEP dalam hal material yang mengandung asbestos (ACM), penghijauan, dan <i>sustainable timber</i> (f) Persentase kepatuhan pembangunan sekolah BEP dengan standar Pemerintah Indonesia mengenai air dan sanitasi serta bangunan tahan gempa bumi. (g) Jumlah komplain terhadap CDC yang tercatat dalam CHS. (h) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh Konsultan Lapangan MCPM: (i) tidak pernah, (ii) sekali; (iii) dua kali; (iv) tiga kali atau lebih. (i) Persentase isu yang diangkat oleh Konsultan Lapangan MCPM di mana ada bukti tindak lanjut yang memuaskan.
	1.2.4 Sistem Laporan Konstruksi (CRS) and Sistem Penanganan Keluhan (CHS) telah beroperasi dan terlembaga di dalam sistem Depag.	PMU Depag	(a) Jumlah laporan yang dikirimkan oleh PMU Depag kepada PCMU termasuk tindakan lanjutnya. (b) Persentase total keluhan yang diterima yang sudah di 'close' oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. (c) Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses keluhan sejak keluhan tersebut diterima sampai berstatus 'closed.'
1.3 Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah SA2: A\$374,400	1.3.1 2000 lokasi sekolah ada di bawah upaya peningkatan pengelolaan asset.	Depdiknas and Depag	(a) Jumlah sekolah dan madrasah dengan Rencana Manajemen dan Pemeliharaan Aset yang memuaskan. (b) Persentase dinas pendidikan kabupaten/kota/BEP yang sedikitnya sekali menghadiri workshop manajemen aset. (c) Persentase yayasan pesantren yang sedikitnya sekali menghadiri workshop manajemen aset.
	1.3.2 Rencana Pengelolaan Material mengandung Asbestos (ACM) telah disusun.	MCPM	(a) Persetujuan pemerintah Indonesia, secara tertulis, mengenai Rencana Manajemen Material Mengandung Asbestos (ACM).

PILAR 2: PENINGKATAN MUTU				
2.1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SA3: A\$4,078,306	2.1.1	Kerangka kerja untuk meneruskan pengembangan profesi untuk personil sekolah dan para pengawas telah disiapkan dan diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.	Tenaga Kependidikan Depdiknas dan Depag	(a) Peraturan Menteri tentang Pengembangan Profesional Berkelanjutan Guru (CPD) berlaku dan kerangka kerja CPD diterbitkan.
	2.1.2	Peraturan Menteri untuk personil sekolah mencakup seluruh aspek dari pengembangan karir sejak perekrutan hingga persiapan pensiun telah disusun dan disetujui oleh Direktorat Tenaga Kependidikan.	PMPTK Depdiknas	(a) Peraturan Menteri tentang struktur dan pengembangan karir personil sekolah difinalisasikan dan diterbitkan oleh Direktorat sebelum 30 Juni 2010.
	2.1.3	Sistem Penilaian Kinerja telah dikembangkan dan disetujui oleh Depdiknas dan Depag.	PMPTK Depdiknas dan Depag	(a) Desain sistem penilaian kinerja disetujui dan diterbitkan oleh Depdiknas dan Depag sebelum 30 Juni 2010. Rencana implementasi dikembangkan.
	2.1.4	Sistem lisensi dan prosedur telah disetujui dan disosialisasikan oleh Depdiknas.	Tenaga Kependidikan Depdiknas	(a) Pedoman Kebijakan untuk sistem lisensi telah rampung dan prosedurnya difinalisasi serta disetujui oleh Depdiknas sebelum 30 Juni 2010.
	2.1.5	Strategi pengembangan kapasitas untuk manajemen kurikulum telah disetujui oleh Depag, manual telah disusun dan sistem diuji coba.	Tenaga Kependidikan dan Bindiklat Depdiknas	(a) Strategi manajemen kurikulum dan pedoman terkait telah difinalisasi dan diterbitkan oleh Depag sebelum 30 Juni 2010. (b) Laporan diterbitkan oleh Depag sebelum 30 Juni 2010, menganalisis kinerja sistem uji coba manajemen kurikulum.
	2.1.6	Kajian institusional dan pengembangan kapasitas dari CET dan BET telah selesai dibawah pengembangan mutu dan penjaminan mutu Depag.	Bindiklat and Profesi Depdiknas	(a) 1 CET dan 12 BET dibuat untuk fungsi yang direvisi.
	2.1.7	Kapasitas Pusbuk untuk mendukung sekolah, guru dan tenaga pendidikan lainnya telah ditingkatkan melalui adanya website informasi, publikasi web dan penyediaan Bahan Bacaan Tambahan.	Depag	(a) Jumlah kunjungan ke website Pusbuk. (b) Jumlah buku teks dan panduan guru yang di-upload ke website. (c) Jumlah sekolah BEP dengan SRM yang dipilih untuk mencerminkan sensitivitas gender. (d) Persentase materi pengajaran/pembelajaran yang disediakan lewat BEP yang oleh MCPM Gender Adviser dianggap mematuhi prinsip-prinsip utama kesetaraan gender.
	2.1.8	Program Pendidikan Inklusif diperkenalkan di program pelatihan para guru pra-jabatan dan tersedia bagi CPD.		(a) Jumlah Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Guru dengan program Pendidikan Inklusif yang spesifik sebagai bagian dari program pengajaran umum.
2.2 Penjaminan Mutu Sekolah SA3: A\$3,413,555	2.2.1	Standar Nasional BSNP dan indikator kinerja terkait telah difinalisasi dan digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan reliabel mengenai mutu sekolah dan institusi pendidikan lainnya.	BSNP dan Direktorat terkait – Depdiknas dan Depag	(a) Jumlah standar dan indikator nasional yang difinalisasikan. (b) Jumlah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang dinilai berdasarkan standar. (c) Persentase sekolah dan lembaga pendidikan terkait serta sistem yang memenuhi standar BSNP di kabupaten-kabupaten/kotasasaran BEP.
	2.2.2	Kerangka Regulasi EQAIS dan panduan teknis terkait lainnya dikembangkan oleh Depdiknas dan Depag untuk Sistem Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pendidikan.	PMPTK	(a) Peraturan Nasional diterbitkan. (b) Jumlah Petunjuk Teknis yang rampung dan jumlah yang digunakan oleh LPMP. (c) Jumlah kabupaten/kotadi setiap provinsi yang mengoperasikan elemen-elemen inti, termasuk SSSE dan monitoring kabupaten/kotaatas sekolah.
	2.2.3	LPMP memiliki kapasitas untuk beroperasi secara efektif sebagai Pusat Penjaminan Mutu.	Bindiklat, PMPTK	(a) Jumlah program pelatihan yang ditawarkan mengenai Penjaminan Mutu untuk personel kabupaten/kotadan sekolah melalui seluruh LPMP. (b) Jumlah LPMP dengan sistem penjaminan mutu institusional

	2.2.4	Model kajian kapasitas kabupaten/kota untuk penjaminan mutu telah disusun dan disepakati.	Komite Pengarah EQAIS	(a)	Jumlah LPMP yang mengimplementasikan asesmen kapasitas kabupaten/kota dengan menggunakan model tersebut.
	2.2.5	Model SSSE untuk memungkinkan kepek mengelola <i>school self-evaluation</i> (SSE) terhadap standar SNP telah disusun.	Mandikdasmen (WSD/WDD)	(a)	Jumlah LPMP yang menawarkan pelatihan kepada kabupaten/kota untuk mendukung pengenalan SSSE.
	2.2.6	Kabupaten memiliki kapasitas yang lebih baik dalam melaksanakan Kajian Eksternal Sekolah atau <i>Targeted External School Reviews</i> .	Tenaga Kependidikan Depdagri	(a)	Jumlah kabupaten/kota percontohan yang memiliki kapasitas dalam mendukung evaluasi eksternal.
2.3 Pengembangan Sekolah Terpadu SA3: A\$17,168,214	2.3.1	Diperkirakan sekitar 10,000 pimpinan sekolah BEP memiliki kapasitas memadai mengenai manajemen dan operasional berbasis sekolah.	MCPM	(a)	Jumlah sekolah BEP dengan Komite Manajemen Sekolah yang aktif.
				(b)	Jumlah sekolah BEP yang memiliki Rencana Pengembangan Sekolah.
				(c)	Perubahan dalam tingkat ketuntasan belajar SD dan SMP di kabupaten-kabupaten/kotasasaran.
	2.3.2	Depdiknas dan Depag menyetujui kebijakan dan pendekatan untuk peningkatan mutu sekolah yang berkesinambungan.	Pokja Penyusun (Depdiknas dan Depag)	(a)	Laporan dan rencana Depdiknas dan Depag untuk tahun 2010 dan tahun berikutnya.
	2.3.3	Pengawas sekolah BEP memiliki kapasitas untuk mendukung peningkatan mutu sekolah.	Koordinator Kabupaten Depdiknas dan Depag	(a)	Jumlah pengawas yang diberi pelatihan dalam strategi-strategi peningkatan mutu sekolah.
	2.3.4	Semua sekolah BEP diberi pelatihan mengenai aspek-aspek kunci Pendidikan Inklusif		(a)	Jumlah sekolah BEP dengan program dan/atau kebijakan Pendidikan Inklusif.
	2.3.5	Prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dana kesetaraan disosialisasikan ke semua sekolah BEP.		(a)	Jumlah sekolah BEP (termasuk madrasah) dengan kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender sebagai bagian dari rencana pengembangan sekolah.
2.4 Pengembangan Kabupaten Terpadu SA3: A\$2,047,892	2.4.1	Tenaga Pendidikan di seluruh kabupaten/kota BEP telah diberikan pelatihan mengenai bagaimana merencanakan dan memfasilitasi peningkatan dan perbaikan pengelolaan sekolah untuk memenuhi standar BSNP.	Koordinator Propinsi Depdiknas MCPM	(a)	Jumlah personil kabupaten/kotayang diberi pelatihan tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah.
				(b)	Jumlah kabupaten/kotasasaran yang memiliki rencana komprehensif mengenai pelaksanaan layanan pendidikan.
				(c)	Jumlah kabupaten/kota BEP yang mengalami peningkatan anggaran pendidikan dengan total anggaran 2010 dibandingkan dengan total anggaran 2007.
				(d)	Jumlah kabupaten/kota BEP yang dapat melacak kinerja sektor dan menggunakan temuan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya lebih lanjut.
	2.4.2	Depdiknas dan Depag menyetujui kebijakan dan pendekatan yang sistemik untuk mendukung pendidikan yang berkelanjutan di kabupaten.	Pokja Penyusun (Depdiknas)	(a)	Laporan dan rencana Depdiknas dan Depag untuk tahun 2010 dan tahun berikutnya.
	2.4.3	Pengarusutamaan gender dan prinsip kesetaraan telah disosialisasikan kepada seluruh sekolah dan kabupaten/kota BEP.		(a)	Jumlah kabupaten/kota BEP (termasuk madrasah) yang memiliki kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender sebagai bagian dari rencana pengembangan sekolah.
	2.4.4	Semua kabupaten/kota BEP diberi pelatihan mengenai aspek-aspek kunci Pendidikan Inklusif		(a)	Jumlah kabupaten/kota BEP yang memiliki program dan/atau kebijakan Pendidikan Inklusif.
2.5 Peningkatan Mutu Gender SA3: A\$592,107	2.5.1	Peraturan Menteri telah disetujui dan disosialisasikan.	Pokja Gender (Depdiknas)	(a)	Jumlah provinsi di mana Peraturan Menteri disosialisasikan.
	2.5.2	Strategi (Model) untuk pengarusutamaan gender secara nasional telah disusun, diujicoba dan dimulai implementasinya.	Pokja Gender (Depdiknas)	(a)	Jumlah kabupaten/kotayang mengimplementasikan strategi gender untuk pendidikan.

	2.5.3	Prinsip-prinsip gender diaplikasikan di semua kegiatan Pi, P2, dan P3. ¹²	MCPM (WSD dan WDD)	(a) Jumlah dan persentase partisipan dan penerima bantuan perempuan di kegiatan-kegiatan yang disukung BEP.
2.6 Pendekatan Terpadu untuk Pendidikan Inklusif (IE) SA3: A\$527,165	2.6.1	Peraturan Menteri, Panduan dan Kebijakan telah disusun dan disosialisasikan secara nasional melalui Depdiknas.	Pokja Pendidikan Inklusif	(a) Peraturan Menteri, Pedoman, dan Kebijakan diterbitkan dan tersedia.
				(b) Jumlah provinsi dan kabupaten/kotadi mana Peraturan Menteri disosialisasikan
PILAR 3: PENINGKATAN TATA KELOLA				
3.1 Dukungan terhadap RENSTRA SA3: A\$942,435	3.1.1	RENSTRA Nasional yang komprehensif telah disusun dan setuju oleh Depdiknas, Depag dan Menteri Pendidikan.	Depdiknas, Depag, BAPPENAS	(a) RENSTRA dilegalkan.
	3.1.2	Panduan untuk RENSTRA Nasional telah disusun dan dikeluarkan.	Depdiknas dan Depag	(a) Pedoman telah rampung. (b) Jumlah pedoman yang dikeluarkan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
	3.1.3	Panduan M&E RENSTRA diterbitkan.	Depag dan MCPM	(a) Jumlah administrator di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kotayang menerima salinan panduan.
	3.1.4	MTEF di Depdiknas diintegrasikan ke dalam RENSTRA dan siklus perencanaan tahunan.	Depdiknas dan MCPM	(a) Pedoman perencanaan menyertakan arah untuk pengembangan MTEF.
	3.1.5	Formula dan mekanisme pendanaan Depag dikembangkan.	Depag dan MCPM	(a) Formula dan mekanisme dikembangkan dan disetujui.
	3.1.6	Desain organisasi dan rencana implementasi Depag disetujui.	Depag dan MCPM	(a) Desain dan Rencana rampung dan disetujui serta tersedia.
3.2 Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Pendidikan (EMIS) Depdiknas SA3: A\$607,944	3.2.1	Kemampuan dan kapasitas manajemen informasi PSP telah diperkuat.	PSP	(a) Unit Manajemen Informasi memiliki sumber daya yang tepat. (b) Jumlah staf PSP yang berpartisipasi dalam, dan memetik manfaat dari, program pelatihan.
	3.2.2	PADATI II telah dikembangkan untuk uji coba kesiapan.	PSP	(a) Sistem dalam kesiapan uji coba sebagaimana diverifikasi oleh Direktur PSP.
	3.2.3	Sistem Manajemen Informasi Sekolah (SMIS) telah diselesaikan.	PSP dan Dit. SMP	(a) Sistem dalam kesiapan uji coba sebagaimana diverifikasi oleh Direktur PSP.
	3.2.4	PSP mengumpulkan data Anak Berkebutuhan Khusus dengan menggunakan model terbaru untuk identifikasi dan klasifikasi.	PSP	(a) Sistem pengumpulan data dan laporan PSP jelas mengidentifikasi jumlah Anak Berkebutuhan Khusus. (b) Anak Berkebutuhan Khusus diklasifikasikan dengan benar di laporan PSP.
	3.2.5	Pengadaan, instalasi, dan konfigurasi hardware telah selesai.	PSP	(a) Hardware di-install, software dikonfigurasi, dan staf diberi pelatihan.
3.3 Sistem Manajemen Keuangan Depdiknas SA3: A\$425,814	3.3.1	Pengintegrasian FMIS ke dalam Biro Keuangan dan Satker kunci telah dibentuk dan disepakati.	Biro Keuangan dan Satker	(a) Sistem beroperasi di semua unit terkait.
	3.3.2	Prosedur standar operasional telah dikembangkan dan dikeluarkan.	MCPM dan Biro Keuangan	(a) Prosedur Operasi Standar rampung dan dibagikan kepada personil terkait.
	3.3.3	Rencana Pengembangan Kapasitas untuk Biro Keuangan telah disetujui.	Departemen Keuangan	(a) Rencana BoF untuk CD disetujui dan disahkan.
3.4 Audit Internal SA3: A\$183,952	3.4.1	Panduan Audit telah disusun dan disepakati dan digunakan di tingkat sekolah.	ItJen Depdiknas dan Depag	(a) Jumlah sekolah yang memiliki salinan Pedoman Audit. (b) Jumlah sekolah yang telah diaudit dengan menggunakan Pedoman yang baru.
	3.4.2	Peningkatan penggunaan audit kinerja di tingkat pusat (Depdiknas dan Depag).	ItJen Depdiknas dan Depag	(a) Jumlah Audit Kinerja yang dilakukan di Depdiknas dan Depag.

¹² Prinsip-prinsip kesetaraan pengarus utamaan gender merupakan elemen semua kegiatan di semua Pilar, untuk tujuan M&E indikator ini mengakumulasikan data partisipan dan penerima manfaat perempuan di bawah satu heading.

		3.4.3	Kapasitas Auditor di tingkat pusat telah ditingkatkan.	ItJen Depdiknas dan Depag	(a) Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan. (b) Jumlah peningkatan kapasitas laporan auditor sebagai hasil dari pelatihan.
3.5	Inovasi ICT dalam Pendidikan	3.5.1	Strategi manajemen bantuan disusun dan dievaluasi.	Pokja ICT dan M&E MCPM	(a) Strategi bantuan manajemen disepakati dan disetujui oleh para pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia.
		3.5.2	Tiga bantuan diimplementasikan dan dievaluasi.	Pokja ICT dan M&E MCPM	(a) Akan ditentukan kemudian setelah proposal bantuan dinominasikan untuk pendanaan.
	SA3: A\$150,000				

5. Ringkasan Rencana Pencairan Dana untuk AWP 2009-2010

Tabel 2 menunjukkan perkiraan pengeluaran berdasarkan kegiatan selama enam bulan sejak 1 Januari 2009 hingga 30 Juni 2010.

Tabel ini didasarkan pada sejumlah asumsi implementasi dan yang paling penting mungkin adalah perkiraan apakah program pembangunan MTs Depag dapat memenuhi jadwal pelaksanaan.

Tabel 2: Tabel Ringkasan Biaya (angka dalam AUD)

Kode	Outcome		TOTAL	Jan-Jun 2009	Jul-Dec 2009	Jan-Jun 2010
Pilar 1						
1.1	Peningkatan Akses terhadap Sekolah Menengah Pertama (Depdiknas)	L				
		SA2	8,405,2647	4,651,516	3,730,461	23,287
		C*	72,500,000			
1.2	Peningkatan Akses terhadap Sekolah Menengah Pertama (Depag)	SA1	48,862,504	48,862,504	0	0
		SA2	4,707,531	2,938,962	1,760,568	8,000
		C*	14,726,027			
1.3	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah	SA2	374,400	0	140,400	234,000
Pilar 2						
2.1	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik (TEP)	SA3	4,078,306	1,709,368	1,521,897	847,042
2.2	Penjaminan Mutu Sekolah	SA3	3,413,555	2,362,457	652,891	398,207
2.3	Perencanaan Sekolah Terpadu	SA3	17,168,214	3,207,517	7,128,087	6,832,610
2.4	Perencanaan Kabupaten Terpadu	SA3	2,047,892	1,147,275	673,509	227,108
2.5	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Layanan Pendidikan	SA3	592,107	144,514	217,479	230,113
2.6	Pendekatan Terpadu untuk Pendidikan Inklusif	SA3	527,165	135,043	216,768	175,354
Pilar 3						
3.1	Dukungan untuk RENSTRA	SA3	942,435	363,181	379,290	199,964
3.2	Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Pendidikan (EMIS)	SA3	607,944	243,935	250,554	113,456
3.3	Sistem Manajemen Keuangan Depdiknas	SA3	425,815	168,886	181,145	75,783
3.4	Audit Internal	SA3	183,952	68,123	67,151	48,678
3.5	Inovasi ICT dalam Pendidikan	SA3	150,000	120,000	24,000	6,000
	Pinjaman AIPRD	L				
	Sub-TOTAL SubAcc 1	SA1	48,862,504	48,862,504	0	0
	Sub-TOTAL SubAcc 2	SA2	13,798,236	7,901,520	5,631,429	265,287
	Sub-TOTAL SubAcc 3	SA3	30,137,383	9,670,298	11,312,771	9,154,314
	Sub-TOTAL Dana Pendamping	C**	87,226,027			
	TOTAL Ekspenditur		92,798,124	66,434,322	16,944,200	9,419,602

* Dana Pendamping dinyatakan dalam Rupiah. Angka yang tertera di atas merupakan perkiraan persamaan AUD menggunakan nilai tukar mata uang 1 AUD = IDR 7,300.

** Sub-TOTAL Dana Pendamping yang tertera di atas merupakan total Dana Pendamping untuk kegiatan Pilar 1. Per 23 April 2009, informasi atas Dana Pendamping untuk kegiatan di bawah Pilar 2 dan 3 masih belum lengkap, menunggu masuknya data dari beberapa Direktorat terkait. Informasi lengkap atas Dana Pendamping untuk kegiatan seluruh Pilar akan didistribusikan bilamana data sudah lengkap secara keseluruhan.

6. Resiko

a. Resiko Nilai Tukar Mata Uang

Salah satu Resiko utama dalam Kerangka Kerja untuk periode 2009-2010 adalah instabilitas pasar uang di dunia yang terjadi saat ini, dan dampaknya terhadap nilai tukar mata uang. Meskipun Resiko ini sebelumnya telah diidentifikasi namun volatilitas pasar finansial dunia meningkatkan kemungkinan variasi yang signifikan dalam nilai tukar mata uang asing.

Kerangka kerja saat ini diprediksikan pada nilai tukar 1 AUD = IDR 7,300. Hanya sesaat sebelum kerangka kerja ini disusun, AUD menguat 19% terhadap rupiah (IDR 8,900) dibandingkan dengan asumsi yang digunakan, dan pada saat kerangka kerja tersebut disusun AUD melemah 1% (IDR 7,200), dan sepanjang BEP berlangsung, AUD pernah mengalami nilai terendahnya yaitu 1 AUD = IDR 6,400.

Karena pengeluaran Program BEP sebagian besar dalam mata uang Rupiah, dan mengingat jumlah pengeluaran yang signifikan, setiap pergerakan nilai tukar tentu akan memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran keseluruhan. Menguatnya mata uang Dolar Australia terhadap Rupiah sebesar 1% yang berkepanjangan akan menyebabkan *under-expenditure* anggaran senilai lebih dari AUD 0.75 juta, sebaliknya 1% melemahnya mata uang Dolar Australia akan menyebabkan *over-expenditure* senilai AUD 0.78 juta, dengan kenaikan dan penurunan anggaran lebih besar atau kecil lagi tergantung dari seberapa besar mata uang Dolar Australia melemah atau menguat terhadap Rupiah. Angka ekstrim untuk kedua keadaan tersebut selama berlangsungnya BEP adalah *over-expenditure* hingga AUD 8.1 juta atau *under-expenditure* hingga AUD 10.4 juta.

Melemahnya nilai tukar AUD secara signifikan akan menyebabkan berbagai kegiatan harus diprioritaskan ulang karena tidak semua kegiatan dapat diselesaikan dalam kerangka anggaran yang ada saat ini.

Akan ada dampak terkait juga atas dana pinjaman untuk pembangunan sekolah Depdiknas, namun demikian setiap dampak negatif tampaknya dapat diserap melalui perkiraan AUD 38 juta, dengan hasil keseluruhan masih dalam batasan AUD 200 juta.

Untuk memperkecil dampak Resiko Nilai Tukar, MCPM akan memonitor situasi sehubungan dengan fluktuasi mata uang, dan menentukan dampaknya bagi program. Karena ketentuan kontrak mengenai kegiatan konstruksi, dalam hal ini kontrak SPPB dan CDC, sulit untuk memperkecil Resiko begitu kontrak sudah ditanda-tangani. Kegiatan lainnya seperti kegiatan pengembangan kapasitas bisa disesuaikan dengan dana yang tersedia. Sebelum finalisasi SK sekolah MoRA, dan penandatanganan SPPB, tetap ada peluang untuk membangun Madrasah M2 ketimbang Madrasah tipe M1 untuk meminimalkan total rupiah dan pengeluaran. Jika situasi tidak memungkinkan untuk merampungkan sekolah dengan dana yang sudah disetujui, maka pilihannya adalah: a) menunda sebagian atau semua pembangunan sekolah yang belum dibangun hingga waktu yang memungkinkan, b) mengurangi jumlah sekolah yang akan dibangun; dan/atau, c) menyesuaikan persyaratan program pembangunan dengan prioritas-prioritas program lainnya serta mengurangi kegiatan konstruksi dan pengembangan kapasitas sekaligus.

Dalam hal SPPB sudah ditanda-tangani, pembayaran termin pertama pun sudah diberikan kepada komite pembangunan sekolah, sementara pembayaran termin kedua sudah harus diberikan kepada komite sekolah namun tingkat nilai tukar tidak memungkinkan, maka satu-satunya pilihan adalah mengurangi pendanaan prioritas program lainnya karena meninggalkan sekolah yang belum rampung dibangun merupakan pilihan yang tidak memuaskan dan berpotensi tidak aman.

b. Pendanaan oleh Counterpart

Meskipun 'ketidakpastian makro-ekonomi dan finansial' telah dicatat sebagai Resiko dalam matriks Resiko, sebagaimana juga Resiko atas 'ketidakcukupan alokasi sumber daya oleh Depdiknas dan Depag (...)', volatilitas dari sistem finansial dunia tampaknya memperbesar kemungkinan bahwa Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan ulang pendanaannya dan jika ini terjadi maka akan ada pengurangan pendanaan oleh counterpart dan pengurangan berbagai inisiatif pengembangan. Dampaknya dapat berujung pada kenyataan bahwa AIBEP tidak dapat mencapai seluruh tujuan dalam kerangka waktu yang telah disepakati.

MCPM akan bekerjasama secara erat dengan counterpart GoI, dan mengamandemen rencana-rencana kerja sebagaimana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang muncul sebagaimana juga sumber daya yang tersedia, selalu menjamin pemanfaatan terbaik dari dana yang tersedia.

c. Resiko Lainnya

Resiko-Resiko untuk kegiatan yang diusulkan dijabarkan dibawah setiap lembar Fokus Area (Lampiran A). Sebagian besar dari Resiko ini telah sebelumnya diidentifikasi dan dijabarkan, bersama dengan strategi pengelolaan Resiko, di dalam Rencana Pengelolaan Resiko Program Bab D, Bagian 26 dari Program Manual 2007.

7. Isu Kebijakan Khusus

a. Kesetaraan dan Gender

Kesetaraan mencakup isu-isu terkait dengan akses terhadap sumber daya, informasi dan pengambilan keputusan di dalam konteks perubahan organisasional dan di berbagai tingkatan sektor pendidikan. MCPM akan mendukung kegiatan-kegiatan untuk menangani aspek kesetaraan, dengan fokus khusus pada kesetaraan gender. MCPM telah membantu Depdiknas dan Depag untuk menyiapkan dan mengadopsi Peraturan Menteri untuk Pengarusutamaan Gender.

Tujuan kebijakan AusAID adalah untuk menggalakkan kesempatan yang setara baik untuk perempuan maupun laki-laki sebagai partisipan dan penerima dari upaya pengembangan ini.

Strategi gender MCPM didasarkan pada pengarusutamaan gender di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Program dan dalam setiap bantuan yang diberikan kepada Depdiknas dan Depag untuk pengarusutamaan gender dalam pekerjaan mereka. Pengarusutamaan Gender mensyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam program memahami dan berkomitmen untuk mencapai upaya tersebut. Pada setiap tahap kegiatan MCPM yang mencakup perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, akan dipertimbangkan dan ditangani dengan tujuan mencapai kesetaraan gender.

Pengarusutamaan Gender juga mensyaratkan seluruh penasihat MCPM dan para manajernya untuk melihat dampak dari setiap kebijakan yang diusulkan atau yang sudah ada dan outcome program mengenai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan outcome yang setara dan adil bagi setiap anggota masyarakat.

Pendekatan ini mendukung tujuan dari kebijakan Gender dan Pembangunan AusAID terkait dengan pembangunan manusia serta kesetaraan dan partisipasi.

Fokus MCPM adalah memastikan ada akuntabilitas yang lebih besar dari para penasihatnya untuk mengarusutamakan gender dalam pekerjaan mereka dan dalam institusi terkait. Hal ini akan dimonitor melalui kerangka kerja tahunan penasihat dan proses pelaporan. MCPM juga akan mendukung para penasihat melalui briefing individual terkait dengan konteks institusi mereka, pertemuan rutin penasihat dan workshop untuk mengembangkan keterampilan khusus, pemahaman dan pengetahuan mengenai konteks lokal dan kapasitas program secara keseluruhan untuk mendukung sektor dalam mengimplementasikan strategi Gender.

Aspek lainnya dari upaya meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan dan atas permintaan dari Pemerintah Indonesia, MCPM mendukung pengembangan kebijakan Pendidikan Inklusif yang akan membantu anak-anak dan remaja yang karena kekurangan fisik dan/atau mental atau faktor lainnya, menjadi terbelakang dan 'tidak setara' karena ketidakmampuan mereka mengakses pendidikan yang bermutu. Peraturan Menteri untuk mendukung Pendidikan Inklusif telah disusun dengan dukungan MCPM dan program untuk Pendidikan Inklusif akan ditingkatkan untuk periode 2009-2010 dalam rangka mendorong penerimaan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem sekolah yang umum.

b. Pengelolaan Lingkungan

Sesuai dengan AusAID Country Strategy, MCPM mendukung pengembangan ekologis yang berkelanjutan. Dampak lingkungan kegiatan-kegiatan prasarana akan dinilai sebelum dilakukan dan akan dimonitor dengan seksama selama masa implementasinya.

Dampak lingkungan program pembangunan BEP relatif kecil. Pembangunan sekolah baru bisa berakibat pada hilangnya beberapa lahan atau hutan produktif, menyebabkan gangguan pada sistem pengairan, dan berpotensi polusi terhadap persediaan air tanah. Walau demikian biaya-biaya lingkungan ini telah diperhitungkan oleh pemerintah kabupaten dan

masyarakat lokal, terutama dalam hal manfaat sosial, budaya dan ekonomi yang akan bertambah seiring dengan tersedianya pendidikan menengah. Dua manfaat utama dari pembangunan sekolah yang menerapkan model berbasis masyarakat ini adalah, pertama ia didasarkan pada 'permintaan' dari masyarakat dan kedua, memeperhatikan biaya-biaya sosial, budaya, dan ekonomis yang berhubungan dengan masyarakat manapun, besar atau kecil, yang tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melanjutkan sekolah selepas sekolah dasar. Dampak negatif pada lingkungan fisik atau pada kegiatan ekonomi yang ada merupakan sesuatu yang yang harus dibandingkan dengan potensi manfaat sosial yang lebih besar yang dibawa oleh perluasan meluasnya kesempatan terhadap pendidikan dan manfaat yang berkesinambungan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Proses pengambilan keputusan ini – untuk membangun atau tidak membangun sekolah – tergantung pada masyarakat dan pemerintah daerah dan di luar wilayah pengaruh MCPM.

Pemilihan lokasi merupakan wilayah kunci yang menjadi perhatian Gol dan MCPM meskipun di setidaknya 50% lokasi – di mana BEP membangun sekolah Satu Atap – merupakan bagian dari daerah yang sudah dialokasikan untuk pendidikan. Di kasus lainnya lokasi disediakan oleh pemerintah kabupaten, masyarakat sekitar atau yayasan. Dalam kasus seperti ini, di mana masyarakat sekitar lah yang memutuskan, MCPM lewat CDC mengkhawatirkan wilayah yang disediakan, terutama dalam hal kemiringan lahan dan mutu tanah yang di atasnya bisa didirikan bangunan dengan aman. Sayangnya di beberapa daerah, karena medannya, sisi bukit harus diratakan agar bisa mendapatkan lahan datar. Hal ini mengharuskan dibangunnya tembok penahan dan saluran air khusus. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Satu bagian dari proses konstruksi yang berpotensi dampak pada lingkungan adalah potensi penggunaan kayu muda dan material mengandung asbestos (ACM). Proses manajemen yang jelas sudah disiapkan untuk mencegah penggunaan kedua hal tadi.

MCPM melalui CDC dan Field Monitor akan bersikap proaktif dalam memastikan bahwa setiap area yang dibersihkan (*cleared*) akan ditanami dengan pohon-pohon baru sesuai dengan Panduan program.

Seluruh sekolah yang dibangun oleh BEP dilengkapi dengan *septic tank* guna mencegah kontaminasi atas tanah dan persediaan air di bawah tanah. Pengawasan atas perlindungan lingkungan tersebut akan menjadi fokus MCPM dalam mendukung BEP pada 18 bulan terakhir ini.

Akhirnya, harus dicatat bahwa satu langkah terpenting yang bisa dilakukan negara atau masyarakat dalam melindungi lingkungan adalah dengan meningkatkan pendidikan. Dampak kolektif dari pemberian kesempatan kepada lebih dari 30.000 anak untuk melanjutkan pendidikan mereka akan berarti positif secara lingkungan.

c. Perlindungan Anak

MCPM secara mendalam peduli dengan kerentanan anak-anak dan kebutuhan untuk memastikan keselamatan mereka selama di sekolah atau pada saat mengerjakan tugas yang berkaitan secara langsung dengan sekolah atau dilakukan di atau dekat lingkungan sekolah. AusAID memiliki Kebijakan Perlindungan Anak yang baru efektif diberlakukan mulai 1 Oktober 2008 dan MCPM akan mengikuti arahan dan panduan yang terdapat di dalam kebijakan tersebut dalam implementasi dari MCPM untuk BEP.

d. Anti Korupsi

MCPM memahami Resiko ketidak patuhan dan kecurangan pada AIBEP. Ketidak patuhan merupakan kegagalan dalam pengimplementasian standar dan norma yang sudah disetujui. Kecurangan merupakan kategori kejahatan umum yang melibatkan individu atau kelompok individu untuk mendapatkan properti atau keuntungan finansial dengan cara menipu. Pelaku kecurangan bisa melakukan hal ini karena ingin mendapatkan uang, properti, waktu, atau

informasi dan variasi sarana yang digunakan sama banyaknya dengan kesempatan yang ada.

MCPM terutama lewat Unit Kepatuhan, Integritas, dan Audit Internal, dan juga dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan kapasitas di P3, berfokus pada pencegahan segala ketidak-patuhan dan kecurangan/korupsi, secara luas mengkomunikasikan dan mencapai tujuan-tujuan kepatuhan, integritas, dan anti korupsi sambil terus mendukung penguatan kapabilitas deteksi/investigasi di MoNE dan MoRA.

- Mengembangkan kesadaran anti kecurangan/korupsi di semua pemangku kepentingan, termasuk MCPM sendiri, dan menuntut kepatuhan melalui tata kerja internal dan Rencana Kontrol Kecurangan.
- Bermitra dengan dan membangun kapasitas lembaga pelaksana, masyarakat madani, dan Itjen MoNE dan MoRA dan juga masyarakat daerah (BAWASDA/Inspektorat regional) untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan/korupsi.
- Mentransfer Sistem Penanganan Keluhan untuk menerima, menginvestigasi, merujuk, dan melacak semua keluhan dan saran ke MoNE dan MoRA dan mungkin ke BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah).
- Memanfaatkan tim investigasi anti-kecurangan/korupsi untuk merespon keluhan yang serius dan juga melakukan pemeriksaan di tempat untuk menjamin kepatuhan, dan berkoordinasi dengan Itjen MoNE dan MoRA mengenai kasus kecurangan/korupsi.
- Bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), LSM lokal atau organisasi dalam mencegah kecurangan/korupsi.
- Bekerja sama dengan BAWASDA, Itjen MoNE dan MoRA, dan BPK untuk melakukan audit pencegahan, audit kinerja, dan audit lainnya yang diperlukan.
- Memberikan masukan ke lembaga manapun mengenai etika dan integritas.
- Pengembangan kapasitas untuk tim audit internal MCPM.

Rencana Audit dan Anti Kecurangan/Korupsi

Rencana Audit dan Anti Kecurangan/Korupsi (AAFCP) MCPM-AIBEP berisi strategi dan kegiatan mengenai ketidak patuhan dan kecurangan:

- a. pencegahan;
- b. deteksi; dan
- c. investigasi.

Karena terbatasnya waktu program, AAFCP berfokus pada kontrol dan pencegahan ketidak patuhan dan kecurangan selama fase implementasi. AAFCP sangat berfokus pada program pembangunan sekolah MoRA karena hal ini merepresentasikan Resiko lebih tinggi dibanding MoNE, dengan digunakannya sistem dan proses yang baru dan mengingat MCPM memiliki kontrol yang lebih besar terhadap dana yang akan dibagikan.

Sekitar 50% dari waktu audit yang tersedia akan digunakan untuk implementasi program audit di MoRA, 20% di MoNE, 10% untuk kepatuhan dan audit kinerja BEP, dan 20% untuk penanganan keluhan dan pemecahannya.

Audit dan Penjaminan Kontrol Internal

Kegiatan utama yang akan dilakukan:

- Mengkaji dan memeriksa catatan dan kegiatan sistem Kontraktor Pelaksana dan lembaga pelaksana untuk menjamin laporan keuangan yang benar dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasional yang ada.
- Mengevaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya dan merekomendasikan setiap indikasi perubahan di setiap kegiatan yang tadi disebutkan.
- Melakukan audit fisik di semua siklus implementasi.
- Memperkuat kapasitas badan audit pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan audit mereka. BAWASDA provinsi dan kabupaten sebagai badan audit pemerintah daerah di kabupaten dan provinsi sebagaimana Inspektorat Jenderal di kementerian terkait akan dibantu dalam pengembangan kapasitas lewat serangkaian pelatihan,

workshop, pemagangan, pengadaan peralatan dan dukungan lain yang diperlukan sehingga mereka bisa memainkan peran yang lebih penting dalam mengawasi program ini.

- Menciptakan peran masyarakat agar bisa berpartisipasi bersama dengan audit profesional. MCPM akan menggunakan pengawasan LSM yang memiliki reputasi baik untuk isu-isu yang kurang teknis di lokasi. Beberapa LSM diidentifikasi memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan mereka mungkin bisa membantu upaya anti kecurangan/korupsi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), dan juga organisasi berbasis keagamaan seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Hingga saat ini MCPM telah mendekati beberapa pemimpin LSM dan NU di beberapa daerah untuk membahas kemungkinan dukungan bagi pengawasan oleh masyarakat.

e. Kemitraan

Program Pendidikan Dasar adalah produk dari meningkatnya kemitraan Indonesia dengan Australia di berbagai bidang upaya dan minat yang sama. Inti dari kemitraan tersebut adalah kesepakatan antar pemerintah bahwa BEP harus mendukung Gol dalam mencapai peningkatan akses dan partisipasi terhadap pendidikan dasar dalam hal peningkatan mutu yang berkelanjutan dan peningkatan tata kelola. Dalam melakukan hal tersebut, sekaligus merefleksikan pendekatan program, MCPM selalu mencari peran dukungan dari mitra, dan selalu menghargai pentingnya Gol dan kepemimpinannya, tujuannya dan aspirasinya.

Namun, konsep kemitraan tidak berakhir di situ. Ia ada di semua aspek program ini, apakah ia mendukung PSP dalam meningkatkan EMIS atau bekerja sama dengan masyarakat sekolah membangun sekolah atau dengan komite sekolah, termasuk komite Madrasah dan Yayasan, untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah. Kemitraan merupakan inti dari kerja MCPM dalam menyediakan bantuan dan dukungan.

Lebh jauh Cardno Acil juga melihat bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, MoNE dan MoRA sering membutuhkan dukungan dari para ahli nasional dan internasional. Untuk menjamin para ahli dari Australia, MCPM telah membangun kemitraan yang kuat dengan West Australian and NSW Departments of Education. Saat ini tiga TA senior dan General Manger berasal dari Australia Barat. The Australian Council for Educational Research (ACER) telah menjadi mitra yang kuat, bekerja sama tidak hanya dengan MCPM tapi juga dengan CSAS.

Kemitraan dengan Bank Dunia, USAID, dan program AusAID lainnya seperti LAPIS dan ANTARA memungkinkan MCPM membantu Gol membangun sinergi antara BEP dan program lainnya untuk meminimalkan tumpang tindih dan duplikasi serta memaksimalkan efisiensi dan efektifitas. Satu studi M&E yang dilakukan pada 18 bulan terakhir BEP adalah untuk melihat bagaimana cara untuk mengoptimalkan kemitraan ini sebagaimana upaya yang dilakukan untuk melihat dampak prakarsa BEP di wilayah-wilayah lain di mana BEP belum secara langsung terlibat dalam peningkatan pendidikan.

Akhirnya, MCPM telah bekerja tanpa kenal lelah, dan akan terus bekerja selama 2009-2010, untuk membangun kemitraan antara MoNE dan MoRA guna memaksimalkan efisiensi di antara dua sistem pendidikan tersebut. Pendekatan lewat kemitraan dan integrasi ini telah membawa manfaat kepada program konstruksi dan kajian organisasi MoRA, pengembangan RENSTRA MoNE dan MoRA, dan dalam hal pengembangan manajemen kurikulum dan EMIS.

Lampiran

Lampiran A: Rincian Kegiatan yang Diusulkan

i) Pilar 1: Peningkatan Akses

Fokus Area: 1.1 Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama melalui Pembangunan Sekolah Berbasis Masyarakat (Depdiknas)	
Outcome 1.1: Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama (Depdiknas).	
Output 1.1.1:	1500 pembangunan sekolah menengah pertama baru dan satu atap.
Output 1.1.2:	1500 Komite Pembangunan Sekolah telah dibentuk dan berjalan.
Output 1.1.3:	Pengadaan dan pengelolaan CDC.
Output 1.1.4:	Sistem Pelaporan Konstruksi (CRS) dan Sistem Penanganan Keluhan (CHS) telah berjalan dan dilembagakan (Depdiknas).
Output 1.1.5:	Kajian atas pengadaan dilakukan dan Laporan Pengadaan diproduksi.
Dasar Pemikiran: AIBEP dirancang untuk memberikan 1500 SMP melalui model pembangunan berbasis masyarakat di daerah miskin, terpencil di bagian Timur Indonesia dalam rangka memfasilitasi penambahan angka penerimaan hingga sekitar 245.000 siswa baru tingkat menengah pertama pada saat sekolah telah beroperasi penuh untuk kelas 7, 8 dan 9. Kapasitas baru untuk peningkatan akses terhadap pendidikan dasar ini harus dapat memberikan dukungan substansial kepada anak-anak dari keluarga miskin, terutama anak perempuan, untuk menyelesaikan 9 tahun pendidikan dasar. Hampir seluruh sekolah yang dibiayai melalui BEP berada pada daerah yang sebelumnya tidak terdapat sekolah dasar dan keadaan ini biasanya terdapat di daerah miskin dan terpencil tanpa memiliki kekuatan atau signifikansi politik untuk mendapatkan prioritas pembangunan sekolah. Di daerah semacam itu perempuan seringkali lebih tertinggal. Data yang tersedia juga menunjukkan bahwa di lebih dari 60% kabupaten BEP terdapat lebih banyak anak laki-laki yang bersekolah dibandingkan anak perempuan dan kapasitas tambahan yang disediakan melalui BEP oleh karenanya mendukung peningkatan angka penerimaan bagi anak perempuan dengan adanya akses sekolah yang lebih dekat dari rumah. Lebih lanjut, karena adanya penghematan pada dua tahun pertama selama program konstruksi, Depdiknas bermaksud untuk menyelesaikan sekitar 1520 sekolah dari target semula 1500. Pada tanggal 31 Desember 2008 diharapkan ada 900 SMP (USB dan Satap) yang akan selesai, menyisakan sekitar 630 sekolah masih dalam proses konstruksi. Implementasi dari kegiatan ini harus diselesaikan pada Desember 2009. Program untuk 2009-2010 disusun melalui konsultasi penuh dengan PMU Depdiknas dan AusAID.	
Kegiatan MCPM: Peran MCPM dan Penasihatnya adalah untuk membantu PMU Depdiknas dalam implementasi pembangunan untuk lebih dari 1500 SMP. Dalam peran ini untuk 2009-2010, MCPM melakukan: <ul style="list-style-type: none">• pengadaan 8 perusahaan CDC untuk memfasilitasi pembangunan berbasis masyarakat melalui 14 kontrak di 14 propinsi.• pengadaan dan supervisi Verifikator Lokasi Independen dan memberikan Laporan Verifikasi Lokasi kepada Auditor BEP.• supervisi terhadap CDC melalui program monitoring komprehensif dengan perhatian utama pada kinerja terkait dengan korupsi dan penggunaan asbestos dan kepatuhan terhadap persyaratan mengenai standar <i>sustainable timber</i>, bangunan tahan gempa bumi, bangunan untuk penyandang cacat dan air dan sanitasi.• mempekerjakan dan mengawasi kinerja sekitar 25 <i>Field Monitor</i> sesuai dengan standar monitoring yang ada dalam Program Manual yaitu sebanyak 50% lokasi dikunjungi satu kali, 25% dikunjungi dua kali, dan 25% dikunjungi tiga kali.	

<ul style="list-style-type: none"> • menyusun dan mengoperasikan Sistem Pelaporan Konstruksi (CRS) untuk membantu PMU dan mendukung PMU, melalui pengembangan kapasitas untuk personil Depdiknas, untuk melembagakan CRS sebagai bagian dari sistem pengelolaan pasca konstruksi BEP. • menyampaikan laporan mingguan, dua mingguan, bulanan, laporan awal, gambar situasi, gambar lengkap, yang disusun oleh CDC dan Field Monitor, kepada PMU dan AusAID sesuai dengan yang dibutuhkan. • mengupayakan sebaik mungkin bahwa ACM tidak digunakan dan kayu berasal dari <i>sustainable resources</i> baik untuk konstruksi di Depag maupun Depdiknas. • mendukung PMU dengan berpartisipasi dalam <i>Intensive Kick-start Workshop</i>. • observasi dan melaporkan workshop penandatanganan SPPB dan workshop Pencairan Dana Tahap ke-2. • mendukung Depdiknas dalam meningkatkan mutu rancangan sekolah dan standar konstruksi. • mendukung Depdiknas untuk melembagakan Sistem Penanganan Keluhan sebagai bagian dari tata kelola konstruksi. • pengadaan dan dukungan untuk program pelatihan bagi Konsultan Lapangan CDC. • mendukung PMU dalam mengkaji ulang praktek pengadaan guna menilai apakah praktek-praktek yang dilakukan telah selaras dengan Panduan Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh badan-badan bilateral dan multilateral terkait pendanaan langsung untuk pembangunan sekolah melalui Depdiknas. Mendukung pelaksanaan bilamana diminta.
<p>Outputs/Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperkirakan ada tambahan 250.000 bangku pendidikan baru tingkat menengah pertama dapat tersedia melalui pembangunan 1500 SMP termasuk SATAP dan USB, dengan kemungkinan tambahan kesempatan melalui pendidikan non formal yang diadakan di sekolah-sekolah setelah jam belajar usai. 2. Sistem Pelaporan Konstruksi dilembagakan di Depdiknas. 3. Sistem Penanganan Keluhan telah berjalan beserta prosedur untuk menindaklanjuti keluhan diadopsi. 4. Peningkatan kinerja monitoring CDC terutama terkait dengan korupsi dan pelaporan mengenai penggunaan asbestos dan kepatuhan mengenai persyaratan <i>sustainable timber</i>, standar bangunan tahan gempa bumi, bangunan untuk penyandang cacat serta air dan sanitasi. 5. Peningkatan kebersinambungan atas rancangan bangunan sekolah untuk memenuhi standar bangunan anti gempa bumi dan bangunan untuk penyandang cacat dan telah disesuaikan dengan topografi. 6. Tanggapan positif atas diperlukannya revisi atas praktek pengadaan sehingga sesuai dengan Panduan Pemerintah dan persyaratan donor internasional yang telah disepakati.
<p>Resiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub-PMU Depdiknas tidak menempatkan mitra kerja terkait pengambilalihan CHS ataupun CRS hingga sepenuhnya menjadi sistem Depdiknas (Resiko tinggi). 2. Sub-PMU Depdiknas tidak memobilisasi secara efektif TTK dan TTP untuk melakukan tugas mereka mensupervisi mutu dan kemajuan pekerjaan konstruksi (Resiko tinggi). 3. Depdiknas tidak menganggarkan dana yang cukup untuk penyelenggaraan workshop berdasarkan Program Manual (Resiko sedang). 4. Sub-PMU Depdiknas tidak menegakkan standar air dan sanitasi (Resiko tinggi).
<p>Sumber Daya: Field Monitor Supervisor/Asset Management Adviser – (12 bulan) Field Monitors – (hingga 20) Communication Officer – (16 bulan) Webmaster – (17 bulan)</p>
<p>Pengadaan Barang/Jasa: Sub-Kontrak Penasihat Konstruksi dan Pembangunan (CDC) Workshop Kegiatan</p>
<p>Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$8,405,264</p>

Fokus Area: 1.2 Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama melalui Pembangunan Sekolah Berbasis Masyarakat (Depag)

Outcome 1.2: Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama (Depag).

Output 1.2.1: Membangun 500 Madrasah Tsanawiyah baru dan Satu Atap.

Output 1.2.2: 500 Komite Pembangunan Madrasah telah dibentuk dan aktif.

Output 1.2.3: Pengadaan dan pengelolaan CDC.

Output 1.2.4: Sistem Pelaporan Konstruksi (CRS) dan Sistem Penanganan Keluhan (CHS) telah berjalan dan dilembagakan (Depag).

Dasar Pemikiran:

AIBEP dirancang untuk membangun 500 Madrasah Tsanawiyah (MTs) melalui model pembangunan madrasah di daerah miskin dan terbelakang di Indonesia untuk menyediakan sekitar 85.000 penerimaan baru untuk pendidikan tingkat menengah pertama. Kapasitas baru yang disediakan melalui inisiatif ini haruslah memberikan dukungan substansial kepada anak-anak dari keluarga miskin, terutama anak perempuan, untuk menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Ribuan lulusan Madrasah Ibtidayah (MI) tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pendidikan menengah pertama – SMP atau MTs.

Ini tidak saja berarti bahwa adanya transisi yang rendah dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama tetapi juga meningkatkan Resiko *dropout* semasa sekolah dasar karena baik orang tua maupun anak-anak merasa tidak ada gunanya melanjutkan pendidikan dasar apabila tidak bisa menyelesaikan pendidikan 9 tahun. Untuk keadaan tersebut, seringkali anak perempuan menjadi korban lebih besar.

Pada akhir 2008, 46 MTs akan selesai dan diharapkan sebanyak 34 MTs ada pada tahap akhir pembangunan dan kemungkinan beroperasi pada Juli 2009 sementara sisanya sebanyak 420 sekolah akan memasuki proses pembangunan dan diselesaikan tidak lebih dari Desember 2009.

Rencana dukungan MCPM untuk menyelesaikan program konstruksi MTs telah disusun dan disetujui oleh PMU Depag dan AusAID.

Kegiatan MCPM:

MCPM dan para penasihat MCPM akan membantu PMU Depag dalam pelaksanaan pembangunan untuk 500 MTs melalui:

- pengadaan 6 perusahaan CDC untuk memfasilitasi pembangunan berbasis masyarakat melalui 7 kontrak di 5 propinsi.
- pengadaan dan supervisi Verifikator Lokasi Independen.
- Pelaporan hasil Verifikasi Lokasi Independen kepada Auditor BEP.
- pengawasan CDC melalui program monitoring menyeluruh dengan perhatian utama mengenai monitoring kinerja terkait dengan korupsi dan penggunaan asbestos dan kepatuhan terhadap persyaratan *sustainable timber*, standar bangunan tahan gempa bumi, bangunan untuk penyandang cacat dan air dan sanitasi
- mempekerjakan dan mengawasi kinerja kurang lebih 20 Field Monitor sesuai dengan standar monitoring yang ada dalam Program Manual yaitu sebanyak 50% lokasi dikunjungi satu kali, 25% dikunjungi dua kali, dan 25% dikunjungi tiga kali.
- menyusun dan mengoperasikan Sistem Pelaporan Konstruksi (CRS) untuk membantu PMU dan mendukung PMU, melalui pengembangan kapasitas yang tepat untuk personil Depdiknas, untuk melembagakan CRS sebagai bagian dari sistem pengelolaan pasca konstruksi BEP.
- menyampaikan laporan mingguan, dua mingguan, bulanan, laporan awal, gambar situasi, gambar lengkap, yang disusun oleh CDC dan Field Monitor, kepada PMU dan AusAID sesuai dengan yang dibutuhkan.
- mengupayakan sebaik mungkin bahwa ACM tidak digunakan dan kayu berasal dari *sustainable resources*.

- mendukung PMU dengan berpartisipasi dalam *Intensive Kick-start Workshop* dan dengan mengobservasi dan melaporkan mengenai workshop penandatanganan SPPB dan workshop untuk Pencairan Dana Tahap 2.
- memastikan penyelesaian setiap sekolah dengan dengan dasar dokumen BAST I dan II yang telah ditandatangani.
- Mendukung Depag untuk melembagakan Sistem Penanganan Keluhan (CHS) sebagai bagian dari tata pengelolaan pelaksanaan konstruksi.
- mendukung PMU dalam mengkaji ulang praktek pengadaan guna menilai apakah praktek-praktek yang dilakukan telah selaras dengan Panduan Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh badan-badan bilateral dan multilateral terkait pendanaan langsung untuk pembangunan sekolah melalui Depdiknas. Mendukung pelaksanaan bilamana diminta.

Outputs/Outcomes:

1. Sebanyak 80.000 bangku pendidikan menengah Pertama tersedia melalui 500 MTs yang dibangun di Pondok Pesantren.
2. Sistem Pelaporan Konstruksi (CRS) dilembagakan di Depag.
3. Sistem Penanganan Keluhan (CHS) beroperasi di Depag dengan prosedur untuk menindaklanjuti keluhan tersebut diadopsi oleh PMU Depag.
4. Peningkatan kinerja monitoring CDC terutama terkait dengan korupsi dan pelaporan mengenai penggunaan asbestos dan kepatuhan mengenai persyaratan sustainable timber, standar bangunan tahan gempa bumi, bangunan untuk penyandang cacat serta air dan sanitasi.
5. Peningkatan kebersinambungan atas rancangan bangunan sekolah untuk memenuhi standar bangunan anti gempa bumi dan bangunan untuk penyandang cacat dan telah disesuaikan dengan topografi.
6. Tanggapan positif atas diperlukannya revisi atas praktek pengadaan sehingga sesuai dengan Panduan Pemerintah dan persyaratan donor internasional yang telah disepakati.

Resiko:

1. Depag tidak menyiapkan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan workshop (Resiko sedang).
2. Komite Teknis Depag tidak bekerjasama dengan staf MCPM untuk melembagakan CHS dan CRS (Resiko sedang).

Sumber daya:

Field Monitor Supervisor/Asset Management Adviser – (12 bulan) –sama dengan poin 1.1.
 Field Monitors – (hingga 14)
 Site Selection and Review Team – (hingga 4)

Block Grants untuk Komite Sekolah

Pengadaan Barang/Jasa:

Sub-Kontrak CDC
 Workshop Kegiatan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$53,881,076

Fokus Area: 1.3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah
Outcome 1.3: Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah.
<p>Output 1.3.1: 2000 lokasi sekolah di bawah upaya peningkatan pengelolaan aset.</p> <p>Output 1.3.2: Rencana Pengelolaan ACM telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.</p>
<p>Dasar Pemikiran: BEP rencananya akan selesai membantu pembangunan 2000 pendidikan menengah pertama pada akhir tahun 2009. Namun, seperti halnya bangunan dan fasilitas publik dimanapun, umur dari konstruksi tersebut sangat tergantung dari mutu dan keteraturan dari pemeliharaannya. Setiap kabupaten telah menandatangani perjanjian pemeliharaan untuk 20 tahun sebelum menerima bantuan pembangunan. Umumnya pemeliharaan sangatlah lemah pada tingkat kabupaten dan memerlukan penguatan baik dari aspek teknis maupun finansial. ACM mungkin saja terdapat di bangunan sekolah/sarana pendidikan di Indonesia dan karena itu menjadi dasar diperlukannya pengembangan pengelolaan untuk jangka panjang atas ancaman kesehatan yang ditimbulkannya.</p> <p>Suatu program dengan cakupan yang luas telah disetujui melalui diskusi antara Depdiknas dengan AusAID meskipun masih diperlukan penyempurnaan lebih lanjut seiring dengan diluncurkannya program ini di kabupaten dan sekolah pada 2009-2010.</p>
<p>Kegiatan MCPM: MCPM akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan seorang Penasihat untuk mendampingi PMU Depdiknas/Depag untuk memberikan pelatihan kepada Kabupaten mengenai pengelolaan aset. • menyediakan seorang Penasihat untuk mendampingi dalam penyusunan rencana pengelolaan ACM. • mengadakan workshop tingkat Propinsi dan Kabupaten untuk memberikan pelatihan kepada staf pengelola terkait dengan Rencana Pengelolaan Aset yang mencakup rencana pengelolaan ACM. <p>Diharapkan bahwa sebagian dari program Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset akan diluncurkan bersamaan dengan WSD dan WDD.</p>
<p>Outputs/Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2,000 sekolah dibawah peningkatan pengelolaan aset dengan setiap sekolah telah memiliki Rencana Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset. 2. Rencana Pengelolaan ACM telah disusun dengan bantuan MCPM dan telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.
<p>Resiko: Kabupaten tidak menyediakan staf permanen/tetap untuk Pengelolaan Aset (Resiko sedang).</p>
<p>Sumber Daya: Field Monitor Supervisor/Asset Management Adviser – (12 bulan) – sama dengan poin 1.1.</p>
<p>Pengadaan Barang/Jasa: Workshop Kegiatan</p>
Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$374,400

ii) Pilar 2: Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

Fokus Area: 2.1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Outcome 2.1: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Output 2.1.1:	Kerangka kerja personil dan pengawas sekolah untuk CPD telah diadopsi.
Output 2.1.2:	Peraturan Menteri untuk personil sekolah telah disusun dan disetujui.
Output 2.1.3:	Sistem Penilaian Kinerja telah disusun dan disetujui.
Output 2.1.4:	Sistem lisensi dan prosedur telah disetujui dan disosialisasikan.
Output 2.1.5:	Strategi pengembangan kapasitas untuk pengembangan kurikulum telah disetujui oleh Depag, manual telah disiapkan dan sistem telah diujicoba.
Output 2.1.6:	Kajian institusional dan pengembangan kapasitas atas CET dan BET telah selesai.
Output 2.1.7:	Kapasitas Pusbuk untuk mendukung sekolah, guru dan personil pendidikan lainnya telah ditingkatkan.
Output 2.1.8:	Program Pendidikan Inklusif diperkenalkan.
Dasar Pemikiran:	
<p>UU Guru (2005) mengatur standar nasional untuk kualifikasi pendidikan dan sertifikasi akan memberikan penghargaan kepada guru yang dapat memenuhi standar baru tersebut. UU tersebut memberikan prioritas utama untuk meningkatkan standar guru dengan secara jelas menyebutkan kualifikasi pendidikan minimum dan standar sertifikasi profesi yang harus dicapai, dan dipertahankan, oleh setiap guru untuk setiap kompetensi kunci. Standar nasional juga telah ditentukan untuk kepala sekolah dan pengawas berdasarkan kompetensi. Direktorat Jenderal untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan peraturan atas kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>Program Pemerintah untuk Sertifikasi Guru sendiri mungkin tidak akan memberikan dampak yang diinginkan secara penuh dalam peningkatan mutu guru, dan oleh karenanya telah disetujui adanya suatu kegiatan tambahan untuk 2008-2010 seperti peningkatan penyusunan kerangka kerja untuk pengembangan profesi yang berkesinambungan bagi seluruh tenaga kependidikan berdasarkan kompetensi, dan penyusunan kerangka regulatori terkait. Bantuan diperlukan untuk kerangka kerja pelaksanaan Pengembangan Profesi yang Berkesinambungan (CPD). Kegiatan ini akan diselaraskan dengan kegiatan badan donor lainnya yang juga memiliki kegiatan serupa. Detil rancangan dan pemaparan isi dari kerangka kerja tengah dilakukan melalui program BERMUTU. Penasihat BEP terus menjadi bagian dari kelompok kerja akan tetapi fokus mereka telah berpindah kepada dukungan yang lebih mendalam untuk perkembangan profesional kepala sekolah dan pengawas sekolah.</p> <p>Kegiatan untuk mengembangkan sistem koheren untuk memberikan peluang pengembangan profesi bagi guru dan tenaga pendidikan merupakan bagian utama dari penjaminan mutu dan perbaikan sistem pendidikan. Fokus dari bagian ini dilengkapi dengan kegiatan yang tercakup dalam komponen WSD. Sistem tersebut berguna untuk membantu personil sekolah dan kependidikan meraih dan melampaui standar nasional yang dinilai berdasarkan sistem penjaminan mutu dan untuk meningkatkan mutu pendidikan untuk para siswa. Setiap kegiatan secara spesifik mendukung pendidikan inklusif dan kebijakan gender.</p> <p>Beberapa elemen peningkatan mutu dalam program BEP yang dilanjutkan dibawah komponen ini adalah pengembangan Pusat Perbukuan agar dapat menjalankan fungsinya membantu guru dan sekolah mengakses informasi mengenai buku dan mengakses buku pelajaran, panduan untuk guru, dsb secara <i>on line</i> dan juga dalam menyediakan bahan bacaan tambahan untuk sekolah BEP.</p> <p>Pekerjaan ini juga melanjutkan bantuan kepada Depag untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem pengelolaan kurikulum dan untuk mengidentifikasi setiap kebutuhan pengembangan kapasitas yang diperlukan.</p>	

Program ini telah cetuskan dan kemudian disetujui oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan, Direktur Profesi Pendidik, Direktur Tenaga Kependidikan Depdiknas, dan Direktur Pendidikan Madrasah Depag, Direktur PUSBUK dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan MCPM yang diusulkan untuk periode Januari 2009 hingga Juni 2010:

Tim EQAIS MCPM akan meneruskan kegiatan untuk meningkatkan sistem pengembangan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan dengan membantu tiga Direktorat di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan juga menyediakan bantuan kepada Depag dan Pusbuk.

1. Direktur Jenderal untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Mendukung Direktorat Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan finalisasi atas kerangka kerja pengembangan profesi yang berkesinambungan berdasarkan standar/tingkat kompetensi dan indikator kinerja untuk guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dan dalam merencanakan implementasinya.
- Mendukung Direktorat Pendidikan dan Pelatihan dan Direktorat Profesi Pendidik dalam mengembangkan sistem pengembangan profesi melalui penggunaan yang efektif dan koordinasi dengan kelompok Cluster, P4TK dan lembaga pelatihan di universitas dan juga penggunaan efektif dari bahan mengajar berbasis web. Perhatian khusus akan diberikan kepada kelompok-kelompok dengan kebutuhan khusus (2.6.4).
- Mendukung Direktorat Tenaga Kependidikan untuk menyusun Peraturan Menteri mengenai Kepala Sekolah dan secara terpisah mengenai Pengawas Sekolah yang mencakup rekrutmen dan seleksi, lisensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pengembangan profesi yang berkesinambungan dan untuk mendukung pengembangan strategi sosialisasi dan implementasi yang diperlukan termasuk dukungan teknis untuk pengembangan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).
- Mendukung Direktorat Profesi Pendidik dalam pembentukan program CPD khusus yang sesuai dengan kerangka kerja CPD yang telah disetujui seperti pengembangan Pendidikan Inklusif.

2. Departemen Agama

- Mendukung Depag untuk merevisi Peraturan Menteri mengenai sistem pengembangan profesi dan selanjutnya mendukung pengembangan rencana implementasi.
- Mendukung kajian institusional dan pengembangan kapasitas dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan 12 Balai Pendidikan dan Pelatihan dan KKM, KKG dan MGMP dibawah Depag.
- Mendukung Depag untuk menyelesaikan kajian institusional dan kapasitas untuk pengembangan kurikulum dan mempersiapkan strategi pengembangan kapasitas (selesai bulan Maret 2009).

3. Pusat Perbukuan

- Mendukung Pusat Perbukuan dalam pengembangan kapasitas untuk menjalankan fungsi barunya termasuk mengembangkan kerangka regulatori, mengembangkan website informasi Buku Indonesia dan mengembangkan kapasitas untuk memproses material untuk dipublikasikan melalui website (untuk diselesaikan pada bulan Juni 2009).
- Mendukung Pusat Perbukuan dalam pendistribusian Bahan Bacaan Tambahan (SRM) untuk sisa sekolah BEP sebanyak 1.100 pada Juli 2009-Juni 2010.

Outcome/Output hingga 30 Juni 2010:

1. Depdiknas memiliki kerangka kerja inti didukung oleh peraturan terkait, untuk pengembangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan kompetensi.
2. Program inti telah dikembangkan untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dan sistem lisensi telah dikembangkan untuk kepala sekolah (termasuk LPPKS).
3. Depag memiliki kerangka kerja yang jelas didukung oleh peraturan untuk pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Depag memiliki strategi untuk mengelola pengembangan kurikulum.

5. Pusat Perbukuan telah dibentuk dengan melalui peraturan dan memiliki web site dan kapasitas untuk memproses material untuk publikasi web.
6. Seluruh sekolah yang dibangun oleh BEP memiliki buku pengayaan dan panduan guru yang dapat mereka pergunakan.

Resiko:

1. Kurangnya sinkronisasi antara EQAIS dengan BERMUTU.
2. Kurangnya koordinasi antara Depag dan Depdiknas.
3. Kurangnya transparansi dalam proses promosi saat ini dapat menjadi hambatan untuk menuju perubahan.
4. Potensi keterlambatan terkait pemilihan umum dalam waktu dekat dan keinginan dari pihak politik untuk menghindari sengketa dan konfrontasi dengan guru dan serikat guru.
5. Komitmen berlebih dari staf senior di Depdiknas dapat membuat sistem kehilangan pegangan.

Sumber Daya:

Full Time International Senior EQAIS Component Adviser – (18 bulan)
 International School Supervisor Adviser – (9 bulan)
 International Adviser for School Leadership and Management to support development of the new regulations – (9 bulan)
 International Adviser(s) – for LPKKS (12 months)
 International Adviser for Curriculum Management – (3 bulan)
 International Adviser for Textbook Quality and Publishing – (2.5 bulan)
 National Adviser for School Management – (15 bulan)
 National Adviser for School Supervision – (15 bulan)
 National Adviser supporting the development of EQAIS in MoRA – (17 bulan)
 National Adviser (s) – supporting LPKKS (6 months)

Pengadaan Barang dan Jasa:

Workshop Kegiatan
 Biaya Perjalanan
 Produksi dan Distribusi Buku Pengayaan
 Sewa tempat untuk workshops dan pertemuan
 Penyusunan Bahan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$4,078,306

Fokus Area: 2.2 Penjaminan Mutu Sekolah

Outcome 2.2: Penjaminan Mutu Sekolah.

- Output 2.2.1:** Standar Nasional BSNP dan indikator kinerja terkaitnya telah difinalisasi dan digunakan.
- Output 2.2.2:** Kerangka Regulatori EQAIS dan manual teknis terkait telah disusun.
- Output 2.2.3:** LPMP memiliki kapasitas untuk beroperasi secara efektif sebagai Pusat Penjaminan Mutu.
- Output 2.2.4:** Model untuk penilaian kapasitas kabupaten untuk penjaminan mutu telah disusun dan disetujui.
- Output 2.2.5:** Model SSSE telah disetujui.
- Output 2.2.6:** Kabupaten memiliki kapasitas untuk mengelola '*External School Reviews*'.

Dasar Pemikiran:

Indonesia telah memperkenalkan sejumlah kebijakan pendidikan signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan selama lima tahun terakhir. RENSTRA juga telah mendukung pengembangan sistem Penjaminan Mutu untuk pendidikan. Pemerintah membentuk BSNP untuk mengembangkan standar untuk sekolah terhadap mana penilaian internal dan eksternal sekolah dilakukan dan laporan disusun untuk tingkat pemerintahan terkait sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana selanjutnya. RENSTRA dan rekomendasi dari berbagai laporan dan peraturan dikumpulkan dalam sebuah usulan untuk Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (EQAIS). Kerangka sistem yang telah disetujui, perlu dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah dan dijalankan secara menyeluruh dan progresif.

Dua area yang memiliki kapasitas terbatas yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan sistem EQAIS:

1. Kerja BSNP dalam monitoring dan implementasi standar dan melaporkan secara reguler dan melakukan perbaikan/revisi yang diperlukan.
2. Pengembangan sistem informasi terpadu mengenai pengelolaan pendidikan yang efektif yang dapat mendukung pertukaran informasi dan ketersediaan informasi untuk digunakan dalam menyusun perencanaan di berbagai tingkat.

Program ini telah cetuskan dan kemudian disetujui oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan, Direktur Profesi Pendidik, Direktur Tenaga Kependidikan Depdiknas, dan Direktur Pendidikan Madrasah Depag dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan MCPM:

Bantuan MCPM untuk pengembangan lebih lanjut atas EQAIS 2009-10 akan melibatkan sejumlah fokus area untuk membantu pemerintah mengintegrasikan sistem penjaminan mutu pendidikan secara bertahap.

Tingkat Nasional

- Membantu BSNP dalam mendefinisikan indikator kinerja untuk standar nasional dengan berkolaborasi dengan direktorat terkait di Depdiknas dan Depag.
- Memperkuat kapasitas BSNP untuk menjalankan perannya bilamana rekomendasi terkait dari kajian organisasional dan kapasitas diimplementasikan.
- Mendukung pengembangan regulasi dan manual teknis untuk mengatur dan mengelola pengintegrasian sistem penjaminan mutu.
- Mendukung kelompok Penjaminan Mutu di Depag dalam memodifikasi sistem penjaminan mutu untuk memperhatikan kebutuhan spesifiknya.
- Mendukung program untuk pengembangan kapasitas dari staf kunci sehingga dapat mengambil peran dalam upaya penjaminan mutu di sekolah (seperti pengawas sekolah dan kepala sekolah).
- Penuntasan bantuan yang telah disetujui sebelumnya kepada Pusat Ujian untuk memungkinkan mereka menganalisa hasil ujian siswa di Indonesia untuk TIMSS and PSA (selesai bulan Juni 2010).

Pengelolaan Nasional dan Implementasi Propinsi

- Mendukung pengembangan LPMP agar mereka dapat memainkan peran yang dirancang untuk mereka dalam penjaminan mutu di tingkat propinsi dengan menyelenggarakan pelatihan mengenai kepemimpinan dan manajemen dan mengenai aspek penjaminan mutu, rencana transisi dan sistem penjaminan mutu untuk LPMP sendiri.
- Mengembangkan kelompok cluster sebagai dukungan berkesinambungan dan struktur pengembangan untuk LPMP.

Tingkat Kabupaten

- Dengan berkolaborasi dengan WDD, mengkaji kapasitas kabupaten untuk mengelola layanan pendidikan dan secara khusus untuk tujuan penjaminan mutu yaitu mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dari tenaga kependidikan dan sekolah untuk monitoring, evaluasi dan perencanaan. Mengidentifikasi kesenjangan dan menyusun manual teknis untuk penjaminan mutu dan kegiatan pengembangan kapasitas untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Rancangan Nasional untuk Implementasi Kabupaten

- Terkait dengan Direktorat Sekolah, Depag dan WSD merancang pelatihan dan mengujicobakan pengenalan sistem *Supported School Self Evaluation (SSSE)* terkait dengan standar nasional. Memonitor implementasi dari ujicoba tersebut dan mendukung pengembangan usulan untuk implementasi lebih luas sebagai satu kesatuan dari proses perencanaan pengembangan sekolah.
- Dukungan untuk Direktorat TIQEP dan Direktorat Sekolah dalam mengembangkan sistem untuk *targeted school reviews* dan mengujicobakan proses tersebut di sejumlah kecil kabupaten WDD.

Outputs/Outcomes:

1. BSNP telah mengembangkan seperangkat standar nasional dan indikator kinerja terkait dengan 8 standar nasional yang digunakan untuk memperkuat pengumpulan informasi mengenai mutu sekolah.
2. Depdiknas dan Depag telah mengembangkan kerangka regulatori dan manual teknis untuk sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
3. LPMP telah mengembangkan kapasitas dasar untuk dapat berfungsi sebagai pusat dan sistem penjaminan mutu propinsi untuk mendukung pengembangan institusional lembaga tersebut. Model untuk penilaian kapasitas kabupaten untuk pengelolaan informasi penjaminan mutu telah dikembangkan.
4. Pada tingkat sekolah telah ada model untuk mendukung kepala sekolah dalam mengelola *self evaluation* terhadap 8 standar nasional untuk mendukung sekolah dalam perencanaan, program pelatihan untuk mendukung pengawas sekolah dalam mengelola evaluasi eksternal dan mendukung dan sistem percontohan untuk *targeted external school reviews*.

*Diharapkan bahwa pengembangan yang terpisah ini akan menyatu dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Sekolah yang baru.

Resiko:

1. Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas finansial di BSNP.
2. Kurangnya EMIS yang efektif untuk menyediakan data yang bermutu.
3. Depdiknas dan Depag tidak menyepakati kerangka regulatori.
4. LPMP memiliki kapasitas yang tidak cukup untuk mengimplementasi persyaratan dari Manual Teknis untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai Pusat Penjaminan Mutu.
5. Kepala Sekolah dan Pengawas memiliki kapasitas yang tidak memadai untuk mengimplementasikan SSSE yang diperlukan.

Sumber Daya:

International Standards Adviser – (3 bulan)

International Adviser for LPMP – (12 bulan)

International Adviser for Assessment TIMSS & PISA – (0.5 bulan)

International Adviser for Quality Assurance – (10 bulan)
National Adviser for School and District Evaluation – (12 bulan)
National Adviser for LPMP – (12 bulan)
National Standards Adviser – (12 bulan)
National Adviser for Database Specialist – (12 bulan)
National Quality Assurance Adviser – (12 bulan)
National Adviser for District Evaluation – (210 days)
LPMP Coordinators – (5 x 10 bulan)
LPMP Training Teams – (8 x 5 bulan)

Pengadaan barang/jasa:

Workshop Kegiatan
Biaya Perjalanan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$3,413,555

Fokus Area: 2.3 Perencanaan Sekolah Terpadu (WSD)

Outcome 2.3: Sistem Pengembangan Perencanaan Sekolah Terpadu (WSD): sekolah yang dibangun melalui BEP beroperasi sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional.

- Output 2.3.1:** Peningkatan kapasitas atas sekitar 10.000 pimpinan sekolah BEP untuk manajemen berbasis sekolah.
- Output 2.3.2:** Menyepakati kebijakan dan pendekatan menyeluruh (Depdiknas dan Depag).
- Output 2.3.3:** Pengawas Sekolah BEP memiliki kapasitas untuk mendukung peningkatan mutu sekolah.
- Output 2.3.4:** Pelatihan aspek-aspek kunci mengenai Pendidikan Inklusif diberikan di seluruh sekolah BEP.
- Output 2.3.5:** Pengarus utamaan gender dan prinsip-prinsip kesetaraan disosialisasikan ke seluruh sekolah BEP.

Dasar Pemikiran:

Perencanaan Sekolah Terpadu (WSD) dan Perencanaan Kabupaten Terpadu (WDD) adalah kegiatan utama dari Pilar 2 yang ditujukan untuk menyatukan seluruh pilar BEP sehingga memberikan pengembangan yang menyeluruh kepada sekolah dan kabupaten dalam sector public dan Islam sesuai dengan standar penjaminan mutu dan tata kelola yang disepakati.

Bantuan MCPM diberikan melalui kegiatan WDD dan WSD sebagai bagian dari strategi berkesinambungan atas pengelolaan dan akuntabilitas desentralisasi pendidikan dasar, berfokus awalnya untuk kabupaten yang dibantu oleh MCPM melalui pembangunan sekolah menengah pertama; dan untuk memberikan peluang kepada kabupaten, sekolah dan masyarakat untuk pengembangan kapasitas pemangku kepentingan kunci dalam menjalankan perannya dalam peningkatan mutu sekolah; dan untuk melembagakan, secara praktis, pelajaran yang dipetik dari kegiatan BEP di Pilar 1, 2 dan 3 dan dari agenda pembangunan Pemerintah Indonesia dibawah RENSTRA.

Kegiatan MCPM:

Pada Desember 2008, 380 sekolah Tahap 1 akan selesai mengikuti lima seri workshop yang diberikan melalui WSD mengenai kepemimpinan dan pengelolaan sekolah, belajar mengajar yang efektif, kerangka legislatif dan partisipasi masyarakat. 542 sekolah Tahap 2 juga akan mengikuti kegiatan sosialisasi awal dan kegiatan pengenalan mengenai sekolah yang efektif dan konsep utama yang akan disampaikan pada workshop di kemudian hari.

Selama tahun 2009/10 kegiatan WSD akan terus mendukung implementasi kebijakan di tingkat pusat dan inisiatif peningkatan manajemen kinerja berbasis sekolah dan sistem monitoring dan mendukung reformasi intitusional dan organisasional terkait dengan peningkatan mutu dan penguatan pengelolaan keuangan, akuntansi dan sistem pelaporan di tingkat sekolah.

Pelatihan dan pendampingan akan diberikan kepada personil yang akan memimpin dan mengelola sekolah BEP, untuk meningkatkan mutu manajemen berbasis sekolah dan memfokuskan perencanaan dan pengembangan sekolah pada standar BSNP untuk memastikan bahwa sekolah ini memberikan layanan pendidikan bermutu setelah pembangunan konstruksi selesai. Program WSD juga memperkenalkan sekolah Depdiknas maupun Depag atas kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan Kesetaraan Gender dan Pendidikan Inklusif.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Inklusif, modul yang spesifik dalam lingkup WSD mengenai kedua hal tersebut telah diberikan kepada sekolah-sekolah guna memastikan pengetahuan dan kepedulian akan dasar hokum, kebijakan dan praktek yang terbaik. Hal ini sengaja diintegrasikan mengingat pentingnya hal tersebut dalam pengoperasian harian sekolah.

Program WSD juga akan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah BEP program-program yang tersedia melalui PNFI bagi mereka yang putus sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikan

dasarnya. Sekolah-sekolah yang berminat menjalankan program ini akan diinformasikan kepada Direktorat terkait untuk kemudian ditindaklanjuti.

Pembicaraan terkait kemungkinan untuk mengaitkan program WSD dengan proyek BOS KITA yang didukung oleh World Bank tengah berjalan. Belum ada keputusan formal mengenai hal tersebut hingga saat ini.

Kegiatan spesifik MCPM 2009/10 akan mencakup bantuan bagi Pemerintah Indonesia untuk:

Januari – Juni 2009

- Penyelenggaraan workshop B, C dan D dari 5 seri workshop untuk sekolah Tahap 2 yang akan mencakup:
 - Perencanaan Sekolah dan komunikasi dengan.
 - Implementasi dari belajar mengajar secara kontekstual dan pembentukan budaya sekolah.
 - Kurikulum dan drafting kurikulum berbasis sekolah.
 - Standar Nasional BSNP dan Standar Minimum Pelayanan (MSS).
 - Pendidikan Inklusif, Gender dan Pendidikan Non Formal – peran sekolah dalam mendukung pengarusutamaan gender dan praktik pendidikan inklusif di seluruh area pekerjaan.
- Pertemuan dengan WSD WDD *Development Group* untuk mengklarifikasi kegiatan mereka dan mengembangkan pendekatan menyeluruh untuk WSD dan meningkatkan keselarasan donor/bantuan.
- Mengkaji bahan dan modul workshop dan bekerjasama dengan Depdiknas dan Depag mencari peluang untuk mempublikasikannya untuk digunakan oleh LPMP dan tenaga kabupaten dalam program pelatihan untuk sekolah non-BEP.
- Mengumpulkan data workshop dan melaksanakan kegiatan M&E.
- Harmonisasi dari kegiatan BEP yang saling terkait termasuk penambahan untuk *Supported School Self Evaluation (SSSE)* sebagai komponen dari proses perencanaan untuk sekolah.

Juli – Desember 2009

- Penyelenggaraan workshop E dari 5 seri workshop untuk sekolah Tahap 2 yang mencakup:
 - Monitoring dan evaluasi.
 - Memperkuat partisipasi masyarakat.
 - Perencanaan untuk 2010 dan proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- Workshop sosialisasi untuk sekitar 1078 sekolah Tahap 3 (termasuk sisa sekolah Depag)
- Penyelenggaraan workshop A, dan B dari 5 seri workshop untuk Sekolah Tahap 3 yang mencakup:
 - Pengenalan mengenai sekolah yang efektif, belajar mengajar secara kontekstual, partisipasi masyarakat dan standar nasional BSNP.
 - Perencanaan Sekolah dan komunikasi dengan masyarakat.
- Pertemuan berkelanjutan dengan WSD WDD *Development Group* untuk mengklarifikasi kegiatan mereka dan mengembangkan pendekatan menyeluruh untuk WSD dan meningkatkan keselarasan donor/bantuan.
- Mengumpulkan data workshop dan melaksanakan kegiatan M&E.
- Publikasi bahan dan modul workshop sebagaimana yang ditentukan oleh Depdiknas dan Depag untuk digunakan oleh LPMP dan tenaga kabupaten dalam program pelatihan untuk sekolah non-BEP.
- Menyelaraskan kegiatan BEP terkait termasuk memasukkan *Supported School Self Evaluation (SSSE)* sebagai komponen proses perencanaan untuk sekolah.

Januari – Juni 2010

- Penyelenggaraan workshop C, D dan E dari 5 seri workshop untuk sekolah Tahap 3 yang mencakup:
 - Implementasi dari proses belajar mengajar secara kontekstual dan pembentukan budaya sekolah.
 - Pendidikan Inklusif, Gender dan Pendidikan Non-Formal – peran sekolah dalam mendukung pengarusutamaan gender dan praktik pendidikan inklusif di seluruh area pekerjaan.

- Kurikulum dan penyusunan kurikulum berbasis sekolah.
- Standar nasional BSNP dan Standar Pelayanan Minimum.
- Monitoring dan evaluasi.
- Penguatan partisipasi masyarakat.
- Perencanaan ke depan dan proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- Pertemuan berkelanjutan dengan WSD WDD *Development Group* untuk mengklarifikasi kegiatan mereka dan mengembangkan pendekatan menyeluruh untuk WSD dan meningkatkan keselarasan donor/bantuan.
- Mengumpulkan data workshop dan melaksanakan kegiatan M&E.
- Menyelaraskan kegiatan BEP terkait termasuk memasukkan *Supported School Self Evaluation (SSSE)* sebagai komponen proses perencanaan untuk sekolah.

Outputs/Outcomes:

1. 500 Kyai, Kepala Sekolah, guru dan anggota masyarakat MTs yang dibangun dibawah BEP akan diberikan pelatihan dan didukung dalam kepemimpinan dan pengelolaan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dan pendidikan inklusif. Dengan demikian pengelolaan sekolah dan mutu pendidikan akan meningkat.
2. 1500 kepala sekolah, guru dan anggota masyarakat di SMP yang dibangun dibawah BEP akan diberikan pelatihan dan didukung dalam kepemimpinan dan pengelolaan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dan pendidikan inklusif. Dengan hal ini Peningkatan pengelolaan sekolah dan mutu pendidikan akan tercapai.
3. Pengawas Sekolah di sekolah BEP akan diberikan pelatihan dan dukungan dalam pengembangan staf sekolah dan pengelolaan kecamatan sebagai bagian dari Tim Peningkatan Sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip gender dan pendidikan inklusif. Hal ini akan menghasilkan Peningkatan Penjaminan mutu sekolah di tingkat lokal.
4. Kebijakan dan pendekatan sistemik ditentukan dan diimplementasikan oleh Depdiknas dan Depag terkait upaya peningkatan mutu sekolah yang mengarah kepada perbaikan outcome Kependidikan, mutu pengajaran dan Partisipasi masyarakat.
5. Sosialisasi kebijakan Pendidikan Inklusif dan Pengarusutamaan Gender kepada sekolah BEP yang tergambar pada dokumen-dokumen perencanaan sekolah.

Catatan: Diseminasi buku pengayaan yang pada awalnya direncanakan untuk disampaikan melalui WSD sekarang akan diatur melalui Pusbuk.

Resiko:

1. Penundaan persetujuan lokasi sebagai bagian dari program konstruksi Depag dapat menyebabkan tidak semua MTs baru dapat meraih manfaat dari program WSD,
2. Depdiknas dan Depag tidak dapat menyepakati suatu pendekatan sistemik untuk mendukung pengembangan berkelanjutan dan mempertahankan pertumbuhan kapasitas yang diupayakan melalui WSD.
3. Depdiknas dan Depag gagal untuk bekerjasama dengan pihak propinsi dan kabupaten dan dengan Depdagri.
4. Pendanaan tidak cukup untuk memungkinkan sekolah menjalankan dan memfasilitasi upaya peningkatan mutu.

Sumber Daya:

International Whole School and District Development Adviser (18 bulan)
 Whole School Development National Coordinator for the period (17 bulan)
 Whole School Development Adviser – (3 Advisers x 15 bulan)
 Whole School Development Training Implementation Support Team

Pendanaan dari Depdiknas:

Depdiknas akan mendanai pertemuan Kelompok Pengembangan WDD WSD – 1 kali / bulan
 Workshop Pengembangan Kapasitas untuk Pelatih Nasional x 3
 Workshop Koordinasi untuk seluruh Koordinator Propinsi dan Kabupaten – 1 workshop x 3 hari
 Penugasan Koordinator Kabupaten dan Pelatih Kabupaten – 60 orang x 27 hari

Pengadaan Barang / Jasa:

Workshop Kegiatan (Sekolah Tahap 2) – 4 workshop – 2880 peserta – 12 hari

Workshop Kegiatan (Sekolah Tahap 3) – 5 workshop – 5640 peserta – 15 hari

Pertemuan *Development Group*

Biaya Perjalanan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$17,168,214

Fokus Area: 2.4 Perencanaan Kabupaten Terpadu (WDD)

Outcome 2.4: Kabupaten dibawah Perencanaan Kabupaten Terpadu (WDD) memiliki kapasitas untuk merencanakan, mempromosikan dan mengimplementasikan peningkatan mutu pendidikan.

- Output 2.4.1:** Tenaga Kependidikan Kabupaten di seluruh Kabupaten BEP telah diberikan pelatihan.
- Output 2.4.2:** Kebijakan dan pendekatan sistemik untuk peningkatan mutu sekolah yang berkesinambungan telah disetujui (Depdiknas dan Depag).
- Output 2.4.3:** Pengarus utamaan gender dan prinsip-prinsip kesetaraan disosialisasikan ke seluruh kabupaten BEP.
- Output 2.4.4:** Pelatihan aspek-aspek kunci mengenai Pendidikan Inklusif diberikan di seluruh kabupaten BEP.

Dasar Pemikiran:

Fokus WDD adalah untuk memastikan bahwa setiap kabupaten mampu memastikan bahwa setiap anak-anak usia sekolah memiliki akses terhadap pendidikan bermutu sesuai dengan perubahan dunia dan lingkungan. Konsep WDD didasarkan pada prinsip bahwa dibawah sistem desentralisasi pendidikan dasar, setiap kabupaten memiliki tanggungjawab mendasar untuk memastikan bahwa setiap sekolah berada pada tingkat yang layak sebagaimana yang didefinisikan dalam standar BSNP.

Program ini telah cetuskan dan kemudian disetujui oleh DirJen MANDIKDASMEN, Ir. Sri Renani Pantjastuti – Kepala Divisi Keuangan, Sekretariat dan Ketua Kelompok Perencanaan, dan Ketua PMU Depag dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan MCPM:

Pararel dengan kegiatan awal WSD di Kabupaten BEP, dan sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk tanggungjawab BEP dalam memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah yang dibangun, MCPM akan terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia melalui kegiatan WDD selama 2009/10 untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan kepemimpinan yang fokus terhadap perencanaan dan pengembangan berdasarkan standar BSNP, mengumpulkan data workshop dan melaksanakan kegiatan M&E.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Inklusif, modul yang spesifik dalam lingkup WDD mengenai kedua hal tersebut telah diberikan kepada sekolah-sekolah guna memastikan pengetahuan dan kepedulian akan dasar hukum, kebijakan dan praktek yang terbaik. Hal ini sengaja diintegrasikan mengingat pentingnya hal tersebut dalam pengelolaan penyampaian layanan pendidikan pada tingkat kabupaten.

Program WDD juga akan mendorong petugas kabupaten untuk menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat akan program-program non formal dan untuk bekerja sama dengan Direktorat PNFI guna memfasilitasi program-program tersebut di lingkungan BEP.

Pembicaraan terkait kemungkinan untuk mengaitkan program WDD dengan proyek BOS KITA yang didukung oleh World Bank tengah berjalan. Belum ada keputusan formal mengenai hal tersebut hingga saat ini.

Kegiatan MCPM selama 2009/10 akan mencakup:

Januari – Juni 2009

- Penyelenggaraan workshop B, C dan D dari 5 seri workshop untuk kabupaten 2007 (BEP dan non-BEP) yang akan mencakup:
 - Analisa Data;
 - Perencanaan Kabupaten;
 - Penganggaran dan Pengelolaan Anggaran;

- Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset – terkait dengan perencanaan dan penganggaran;
- Monitoring dan Evaluasi;
- Standar BSNP dan Standar Pelayanan Minimum.
- Pertemuan berkelanjutan dengan WDD *WSD Development Group* untuk mengklarifikasi kegiatan mereka dan mengembangkan pendekatan menyeluruh untuk WDD dan meningkatkan keselarasan donor/bantuan.
- Mengkaji bahan dan modul workshop dan bersama dengan Depdiknas dan Depag melihat peluang untuk publikasi bahan-bahan tersebut untuk digunakan oleh LPMP dan tenaga kabupaten dalam pelatihan kabupaten dan sekolah diluar kabupaten BEP yang ada.
- Mengumpulkan data workshop dan melaksanakan kegiatan M&E.
- Penyelarasan kegiatan AIBEP yang terkait termasuk menghubungkan EQAIS sebagai bagian dari kegiatan monitoring kabupaten.
- Bekerjasama dengan Depdiknas dan Depag mengembangkan dan menyelenggarakan workshop dengan kabupaten 2006 mengenai Kajian Kapasitas Kabupaten dan menghubungkan kegiatan EQAIS (termasuk ToT untuk Koordinator Propinsi)

Juli - Desember 2009

- Penyelenggaraan workshop E dari 5 seri workshop untuk kabupaten 2007 yang akan mencakup:
 - Membagikan RENSTRA Kabupaten;
 - Manajemen Sumber Daya Manusia termasuk pengelolaan kinerja;
 - Pengembangan organisasi dan standar prosedur operasional
 - Perencanaan kedepan untuk 2010 dan proses peningkatan mutu yang Berkelanjutan.
- Pertemuan berkelanjutan dengan WDD *WSD Development Group* untuk mengklarifikasi kegiatan mereka dan mengembangkan pendekatan menyeluruh untuk WDD dan meningkatkan keselarasan donor/bantuan.
- Mengumpulkan data workshop dan melaksanakan kegiatan M&E.
- Publikasi bahan dan modul workshop sebagaimana ditentukan oleh Depdiknas dan Depag untuk digunakan oleh LPMP dan tenaga kabupaten dalam menyelenggarakan pelatihan di kabupaten dan sekolah diluar kabupaten BEP yang ada saat ini.
- Penyelarasan kegiatan AIBEP yang terkait termasuk menghubungkan EQAIS sebagai bagian dari kegiatan monitoring kabupaten.
- Mengidentifikasi pelajaran yang dipetik dari Kajian Kapasitas Kabupaten 2006 dan menyempurnakan bahan dengan bekerjasama dengan Depdiknas, Depag dan tenaga EQAIS dengan kabupaten 2007.

Januari - Juni 2010

- Implementasi dari Kajian Kapasitas Kabupaten dengan kabupaten 2007.
- Mengkaji bahan dan modul workshop dan bersama dengan Depdiknas dan Depag melihat peluang untuk publikasi bahan-bahan tersebut untuk digunakan oleh LPMP dan tenaga kabupaten dalam pelatihan kabupaten dan sekolah diluar kabupaten BEP yang ada sekarang.
- Mengumpulkan data workshop dan melaksanakan kegiatan M&E.
- Penyelarasan kegiatan AIBEP yang terkait termasuk menghubungkan EQAIS sebagai bagian dari kegiatan monitoring kabupaten.

Program ini telah dicetuskan dan kemudian telah disetujui oleh DirJen MANDIKDASMEN, Ir. Sri Renani Pantjastuti – Kepala Divisi Keuangan, Sekretariat dan Ketua *Development Group*, dan ketua PMU Depag dan pemangku kepentingan lainnya.

Outputs/Outcomes:

Sebagai tambahan dari kegiatan bersama pada program WSD:

1. 2172 tenaga kabupaten telah diberikan pelatihan dan didukung dalam kepemimpinan dan pengelolaan kabupaten dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dan pendidikan inklusif. Melalui hal ini pengelolaan Kabupaten akan meningkat.
2. Kebijakan dan pendekatan sistemik ditentukan dan diimplementasikan oleh Depdiknas dan Depag dalam upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan di Kabupaten menuju Peningkatan penyampaian dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten.

3. Sosialisasi kebijakan Pendidikan Inklusi dan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh kabupaten peserta yang tergambar dalam rencana kabupaten.
4. Peningkatan dukungan terhadap program PNFI bagi masyarakat lokal melalui otoritas Kabupaten.

Resiko:

Depdiknas dan Depag tidak dapat menyepakati suatu pendekatan sistemik untuk mendukung pengembangan berkelanjutan dan mempertahankan pertumbuhan kapasitas yang diupayakan melalui WDD.

Sumber Daya:

International Whole School and District Development Adviser (18 bulan) – Shared with 2.3
 Whole District Development National Coordinator for the period (18 bulan)
 Whole District Development Adviser – (1 x 15 bulan) NB WSD advisers will also support WDD activities
 Whole District Development Training Implementation Support Team

Pendanaan dari Depdiknas

Pertemuan yang sudah direncanakan dalam WSD
 Penugasan Koordinator Propinsi dan Pelatih Propinsi – 60 orang x 21 hari

Pengadaan Barang/Jasa:

Workshop Kegiatan (Kabupaten 2007) – 6 workshop – 924 peserta – 18 hari
 Workshop Kegiatan (Kabupaten 2006) – 6 workshop – 1248 peserta – 3 hari
 Pertemuan *Development Group*
 Biaya Perjalanan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$2,047,892

Fokus Area: 2.5 Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pelayanan Pendidikan

Outcome 2.5: Pengarusutamaan Gender untuk memastikan kesetaraan yang lebih besar untuk anak perempuan dan perempuan dalam mengakses dan berpartisipasi dalam seluruh aspek sistem pendidikan.

Output 2.5.1: Peraturan Menteri telah dikeluarkan dan disosialisasikan.

Output 2.5.2: Strategi (Model) untuk Pengarusutamaan Gender telah dikembangkan, diujicobakan dan diimplementasikan.

Dasar Pemikiran:

Penekanan BEP atas Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender tidak hanya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tetapi juga Pemerintah Australia dan kebijakan AusAID mengenai Pendidikan dan Gender.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk kesetaraan dan kesamaan gender tercermin dalam kebijakan Pemerintah Indonesia seperti dalam UU 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan UU 7/1984 mengenai ratifikasi CEDAW, Instruksi Presiden 9/2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan RENSTRA. Namun, realisasi dari kesetaraan gender di dalam sistem pendidikan nasional masih belum lengkap, terutama di tingkat kabupaten dan sekolah.

Sejak tahun 2007, BEP telah memberikan perspektif gender terpadu yang proaktif di seluruh program dan terutama di WSD, WDD dan Pendidikan Inklusif untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi anak perempuan dan perempuan dipahami dan ditangani dan peluang maksimum telah diberikan untuk peningkatan dan pemberdayaan mereka lebih lanjut. Selama berlangsungnya program tahun 2009-2010, secara strategis penting untuk meneruskan upaya menyebarluaskan pengarusutamaan Gender.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang kesetaraan gender dan pengarusutamaan, pencapaian yang paling efektif adalah yang muncul melalui pendekatan terpadu menyeluruh dibandingkan dengan melalui pembentukan gender sebagai fokus area secara terpisah. Sebagai hasilnya, setiap kegiatan dalam BEP diharapkan, sepanjang memungkinkan, mengikuti prinsip-prinsip kesetaraan gender. Tanggungjawab pengarusutamaan gender yang spesifik diidentifikasi pula dalam kegiatan tersebut. Namun, ada dua inisiatif spesifik di bawah payung Gender yang memerlukan perhatian khusus dan oleh karenanya diidentifikasi dalam bagian ini– (a) finalisasi Peraturan Menteri dan sosialisasi peraturan tersebut kepada Propinsi, dan (b) pengembangan dan finalisasi sistem atau model untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender secara nasional.

Kegiatan MCPM untuk periode 1 Januari 2009 hingga 30 Juni 2010:

- Mendukung Pemerintah Indonesia (Depdiknas dan Depag) untuk merencanakan dan mensosialisasikan Peraturan Menteri kepada Propinsi secara nasional.
- Terus mendukung Pokja Gender Depdiknas dan Depag (Direktorat Pendidikan Madrasah dan Pokja Gender) dalam implementasi Model Uji Coba mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di kabupaten BEP dan sekolah serta Madrasah BEP (Kebumen and Kupang).
- Dukungan antar Pilar untuk praktik Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender (mengacu pada kegiatan Pilar 1, 2 dan 3).

Outputs/Outcomes:

1. Peraturan Menteri telah dikeluarkan dan disosialisasikan
2. Kegiatan uji coba di kabupaten BEP dan sekolah-madrasah telah selesai dan model telah tersedia secara nasional untuk pengarusutamaan Gender.

Resiko:

1. Pokja Gender tidak dibentuk sebagai unit yang lebih permanen untuk pengarusutamaan Gender dengan kapasitas yang memadai.
2. Depdiknas dan Depag tidak mampu mengambil peran untuk memimpin, monitoring dan bekerjasama dengan pejabat propinsi dan kabupaten.
3. Kurangnya sumber daya manusia di Depdiknas dan Depag.
4. Pokja Gender Depdiknas memfokuskan diri kepada pendekatan yang sempit untuk pendidikan perempuan dan pada pendidikan informal dan non-formal, dan karenanya, masalah gender terbatas pada perihal “pendidikan perempuan” dan tidak mampu untuk menyediakan sekolah yang *gender friendly* sebagai model untuk disosialisasikan dan diadopsi untuk setiap sekolah, terutama sekolah-sekolah BEP.
5. Peraturan Menteri tidak sepenuhnya diadopsi pada tingkat propinsi dan kabupaten.
6. Konflik yang muncul mengenai kebutuhan dan lingkup untuk pengarusutamaan gender dalam pendidikan.

Sumber Daya:

Gender Adviser – (18 bulan)
Support

Pendanaan Counterpart:

Pertemuan-pertemuan di Depag dan Depdiknas.
Direktur Pendidikan Masyarakat/ Sekretaris Pokja Gender Depdiknas dalam pembentukan Tim Teknis untuk memimpin program.
Tim Teknis Direktorat Pendidikan Madrasah Depag dan Pokja Gender.

Pengadaan barang/jasa:

Workshop Kegiatan
Biaya Perjalanan
Media Kit Gender

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$592,107

Fokus Area: 2.6 Pendekatan Terpadu untuk Pendidikan Inklusif

Outcome 2.6: Pendidikan Inklusif telah diurusutamakan sebagai bagian dari kemajuan Indonesia menuju EFA dan pencapaian MDG.

Output 2.6.1: Peraturan Menteri, Panduan dan Kebijakan telah dikembangkan dan disosialisasikan.

Dasar Pemikiran:

Kebijakan pendidikan dan program pengembangan Indonesia berfokus pada pencapaian wajib belajar dan pada tingkat sekolah dasar angka penerimaan murni saat ini mendekati 95%. Untuk memberikan penekanan lebih mendalam terhadap upaya untuk mencapai angka penerimaan murni yang tinggi pada tingkat menengah pertama, Pemerintah melakukan advokasi atas (a) kebijakan untuk wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar dan (b) kebijakan pendidikan inklusif untuk mendukung pengarusutamaan anak-anak dengan kebutuhan khusus kelas 1 hingga 9.

Pendekatan ini sejalan dengan '*best practice*' internasional yang mengatakan bahwa dimanapun anak-anak dengan kebutuhan khusus harus tetap berada dalam lingkungan teman sebayanya dan di dalam lingkungan sekolah yang normal sehingga memperkaya pengalaman belajar mereka dan untuk menormalisasi hubungan mereka dengan teman sebaya dan dengan masyarakat luas. Menteri Pendidikan telah mengetahui adanya kebutuhan untuk strategi inklusif dan terpadu tersebut yang memperluas pengertian mengenai 'kebutuhan khusus' termasuk tidak hanya cacat fisik tetapi juga kesulitan intelektual, halangan bahasa, gender dan kemiskinan sebagai potensi faktor pengisolir.

Sebagaimana juga halnya Gender, pendekatan MCPM untuk mendukung strategi Pemerintah untuk Pendidikan Inklusif (IE) di tingkat sekolah dan kabupaten adalah untuk memasukkan pengembangan kapasitas di dalam kegiatan WSD dan WDD. Namun, untuk 2009-2010, sejumlah kegiatan lainnya diletakkan di bawah fokus area IE, seluruh upaya pencapaian sejauh ini untuk 2007-2008, termasuk finalisasi Peraturan Menteri, pengembangan Panduan untuk Pendidikan Inklusi (IE), pembuatan film untuk sosialisasi konsep IE.

Program ini dikembangkan berdasarkan permintaan dari dan melalui konsultasi dengan Menteri Pendidikan Nasional, DirJen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, DirJen Mandikdasmen, Direktur Pendidikan Luar Biasa, DirJen Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan Direktur Pendidikan Madrasah Depag.

Kegiatan MCPM untuk Periode 1 Januari 2009 hingga 30 Juni 2010:

MCPM akan memberikan bantuan baik kepada Depdiknas dan Depag dan terutama pemangku kepentingan utama seperti Direktorat Pendidikan luar biasa, Direktorat Mandikdasmen, Direktorat Pendidikan Non-Formal, dan PSP, untuk:

- Pengembangan Kapasitas untuk implementasi IE di seluruh kabupaten, sekolah dan madrasah yang berpartisipasi dalam WSD dan WDD – sejumlah 2000 sekolah dan lebih dari 180 kabupaten secara nasional dengan kemungkinan pengujian program IE di 4 atau 5 sekolah BEP dan 2 atau 3 kabupaten BEP.
- Sosialisasi Peraturan Menteri kepada propinsi dan kabupaten secara nasional.
- Pengembangan strategi komprehensif untuk pengembangan kapasitas di tingkat kabupaten untuk mendukung Pendidikan Inklusif dan sebagai model untuk pengembangan di masa mendatang.
- Pengembangan Kebijakan Sekolah mengenai Pendidikan Inklusif yang ditarik dari Peraturan Menteri sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam Pendidikan Dasar.
- Pengembangan program IE yang tepat di lembaga pendidikan tinggi yang ingin mengembangkan fokusnya pada IE sebagai bagian dari *pre-service dan in-service professional development*.
- Pengembangan kriteria untuk pengumpulan data yang diperlukan terkait dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Outputs/Outcomes:

1. Peraturan Menteri, Panduan dan Kebijakan untuk Pendidikan Inklusif telah dikembangkan dan disosialisasikan secara nasional.
2. Lebih dari 2000 sekolah dan lebih dari 180 pengelola pendidikan kabupaten di seluruh Indonesia telah dilatih mengenai aspek kunci kebijakan IE dan implementasinya.
3. Model kabupaten untuk pengembangan IE untuk digunakan secara nasional.
4. Peningkatan ketersediaan data mengenai anak-anak dengan kebutuhan belajar khusus.
5. Program IE untuk pendidikan dan pelatihan keguruan di Universitas telah direncanakan, dan sebagian beroperasi di tahun akademik 2010-2011.

Resiko:

1. Fokus sistem pada pendekatan yang sempit kepada anak-anak terbelakang dan dengan kebutuhan khusus dan, karenanya, Pendidikan Inklusif terbatas pada perhatian kepada sekolah 'luar biasa'.
2. Pimpinan politik dan pendidikan cukup puas dengan melihat APM mencapai katakanlah 93% dan tidak begitu perhatian terhadap 7% sisanya yang memerlukan upaya yang lebih besar untuk membawa mereka ke bangku sekolah.

Sumber Daya:

International Inclusive Education Adviser – (11 bulan)
National Inclusive Education Adviser – (15 bulan)
Support

Pengadaan barang/jasa:

Workshop Kegiatan
Biaya pencetakan dan distribusi brosur
Biaya Perjalanan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$527,165

iii) Pilar 3: Tata Kelola

Fokus Area: 3.1 RENSTRA Sektor – Dukungan Terhadap Proses Perencanaan

Outcome 3.1: RENSTRA menjadi dasar untuk rencana tahunan dan penilaian kinerja sektor.

Output 3.1.1: RENSTRA Nasional yang komprehensif disusun dan disetujui.

Output 3.1.2: Panduan untuk RENSTRA Nasional disusun dan dikeluarkan.

Output 3.1.3: Panduan untuk M&E RENSTRA dikeluarkan.

Output 3.1.4: MTEF di Depdiknas diintegrasikan ke dalam RENSTRA dan siklus perencanaan tahunan.

Output 3.1.5: Formula dan mekanisme pendanaan Depag terbentuk.

Output 3.1.6: Rancangan organisasional dan rencana implementasi Depag disetujui.

Dasar Pemikiran:

Proses perencanaan di dalam sektor pendidikan tersedia di berbagai tingkatan, nasional, departemen dan di propinsi dan kabupaten. Tampaknya memang telah ada kebutuhan akan perencanaan pada tingkatan-tingkatan ini dan ini dicerminkan dengan adanya sejumlah unit perencanaan yang telah dibentuk. Namun demikian ada beberapa kelemahan yang signifikan dalam proses perencanaan di Depdiknas dan Depag dan fokus area ini mencoba untuk membantu counterpart menangani kelemahan-kelemahan ini.

Dari unit yang ada di tingkat pusat dan propinsi yang sudah memiliki RENSTRA pendidikan terkadang kurang selaras dengan RENSTRA yang lebih tinggi di tingkat departemen atau nasional.

▪ **RENSTRA Pendidikan Nasional:**

Ada pemisahan antara rencana jangka menengah yang dikembangkan oleh BAPPENAS dan RENSTRA yang dikembangkan di Depdiknas dan Depag. Para penasihat akan bekerjasama dengan CSAS di bidang ini dan secara aktif mendorong keterlibatan antara organisasi-organisasi ini untuk tujuan menyusun RENSTRA Nasional Pendidikan. Upaya kolaborasi akan terpusat pada pengintegrasian prinsip-prinsip akses kesetaraan, termasuk gender, dengan tujuan merubah rencana tersebut menjadi rencana tahunan dan dengan menambah rencana kegiatan dengan indikator kinerja yang tepat di setiap tingkatan. Fokus MCPM utamanya adalah pada pengembangan kapasitas *counterpart* dan sistem di mana mereka bekerja, CSAS akan bekerja pada tingkat penyusunan kebijakan untuk membantu para pengambil keputusan memformulasikan target-target yang dapat dicapai untuk dapat dituangkan ke dalam dokumen RENSTRA dari Depdiknas dan Depag dengan bantuan dari Penasihat MCPM.

▪ **RENSTRA 2009-2014:**

Pekerjaan sudah dimulai untuk RENSTRA 2009 hingga 2014. Pekerjaan ini merupakan prioritas tinggi.

▪ **Monitoring dan Evaluasi:**

Meskipun RENSTRA telah berjalan selama bertahun-tahun, tidak ada cara sistematis untuk memonitoring kemajuan implementasi. Berbagai Unit Utama memang sudah memiliki proses (MONEV) sendiri namun sistem ini tidak memberikan umpan balik kepada sistem pelaporan yang dikelola oleh biro perencanaan yang juga belum memiliki proses sistematis ataupun perangkat yang bisa diberlakukan secara seragam di seluruh sektor pendidikan.

Di Depag, RENSTRA Pendidikan untuk pendidikan Islam telah selesai namun tidak ada keterkaitan dengan proses perencanaan tahunan dan tidak ada sistem M&E untuk memonitor implementasi. Kelemahan-kelemahan ini merupakan area yang diupayakan untuk didukung di bawah fokus area ini.

▪ **Keuangan dan Anggaran:**

Proses penganggaran juga merupakan elemen utama dari siklus Perencanaan yang menunjukkan kelemahan yang signifikan.

BAPPENAS dan Departemen Keuangan telah menyusun suatu Kerangka Kerja Ekspenditur Jangka Menengah atau *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) guna memperkuat perencanaan anggaran. Depdiknas, sebagai salah satu institusi yang melakukan pilot MTEF meminta bantuan dalam pengimplementasian sistem MTEF tersebut. Hal ini merupakan elemen penting dari RENSTRA mengingat pada saat ini tidak ada rencana perencanaan Anggaran yang berarti selain proses perencanaan anggaran tahunan yang ada.

Di Depag, dukungan terhadap pekerjaan pengkajian ulang praktek keuangan dan pengembangan formula pendanaan dan mekanisme yang dapat meningkatkan akses setara atas mutu dari input sekolah. Pekerjaan selanjutnya di area ini adalah mendukung Depag dalam penguatan proses penganggaran dalam pengintegrasian ke dalam RENSTRA dan proses perencanaan tahunan.

▪ **Pengembangan organisasi:**

Depag dituntut agar organisasinya tanggap terhadap RENSTRA yang mana termasuk didalamnya beberapa aturan terkait reformasi penyampaian pendidikan islam melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Hal ini mengarah pada organisasi yang memiliki struktur, peran dan tanggungjawab yang bertumpang tindih antar unit kerja, koordinasi yang lemah, garis komando dari kantor pusat yang tidak jelas, distribusi kerja yang tidak merata, hubungan yang tidak jelas dengan pemerintah daerah, dan sistem yang lemah untuk menyalurkan anggaran yang menjadi halangan dalam implementasi RENSTRA di seluruh tingkatan organisasi. Kegiatan ini akan mendukung dan mendorong *counterpart* meraih kepercayaan dirinya untuk memulai proses analisa atas kesenjangan dan kelemahan yang ditemui di organisasi mereka. Penasihat akan menunjukkan bahwa proses ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang akan menghambat keamanan pekerjaan melainkan sebagai suatu kesempatan untuk membangun kapasitas organisasional individu dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada.

Kegiatan MCPM:

1. Mendukung Tim Kecil RENSTRA Depdiknas dan Depag dalam memajukan Pengembangan tujuan-tujuan RENSTRA Nasional Pendidikan.
2. Para Penasihat MCPM akan bekerjasama dengan counterpart untuk menjadikan pengembangan RENSTRA 2009-2014 sebagai suatu prioritas.
3. Mendukung Depdiknas agar secara aktif berpartisipasi dalam uji coba MTEF sebagai input utama penguatan RENSTRA 2010-2014.
4. Mendukung Tim Depag yang ditugaskan untuk mengkaji struktur organisasional dan mengeluarkan laporan kajiannya.
5. Mendukung Depag dalam penguatan proses penganggaran terkait dengan perencanaan kegiatan dan pengembangan formula dan mekanisme pendanaan mereka.

Output:

1. RENSTRA Pendidikan telah mencakup elemen-elemen yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dan kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan, indikator dan proses M&E.
2. Rencana Tahunan yang selaras dengan tujuan-tujuan RENSTRA.
3. Kegiatan M&E secara rutin diintegrasikan dalam rencana-rencana terkait panduan yang ada.
4. Tim perancangan organisasi dan pelaksanaan Depag meningkatkan kegiatan pengkajian mereka.

Resiko utama:

1. Pergantian personil (harus menjelaskan mengenai organisasi lagi sejak awal).
2. Kemampuan *counterpart* untuk menerima dan mempertahankan perubahan.
3. Kapasitas organisasi untuk memberikan bantuan untuk operasional dan implementasi dari sistem yang baru.

4. Kurangnya pengakuan akan kebutuhan pemangku kepentingan di propinsi dan kabupaten.
5. Tekanan kerja *counterpart* yang berat sehingga tidak mempunyai waktu untuk ikut pelatihan.
6. Hambatan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.
7. Komitmen institusi untuk memberikan data yang akurat dan tepat waktu merupakan Resiko yang signifikan dimana tidak ada hubungan yang jelas terhadap nilai organisasional atau operasional atau data tersebut tidak didapatkan melalui proses yang sudah ada.

Sumber Daya – (Depdiknas):

2 x RENSTRA M&E Advisers – (15 bulan)
4 x Planning Advisers – (15 bulan)

Sumber Daya – (Depag):

Planning Adviser – (15 bulan)
Finance and Budgeting Adviser – (17 bulan)
Financial M&E Adviser – (15 bulan)
Organisational Development Adviser – (15 bulan)

Pengadaan barang/jasa:

Workshop Kegiatan
Biaya Perjalanan
Strategic Planning international/local consultancy Indonesian Institute of Management

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$942,435

Fokus Area: 3.2 Sistem Informasi Pendidikan Depdiknas

Outcome 3.2: Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Pendidikan Depdiknas (EMIS)

- Output 3.2.1:** Kapabilitas dan kapasitas manajemen informasi PSP telah diperkuat.
- Output 3.2.2:** PADATI telah dikembangkan dan siap diujicobakan.
- Output 3.2.3:** Sistem Manajemen Sekolah (SMIS) telah diselesaikan.
- Output 3.2.4:** PSP mengumpulkan data mengenai anak-anak dengan kebutuhan khusus menggunakan model terakhir untuk identifikasi dan klasifikasi.
- Output 3.2.5:** Pengadaan *hardware*, instalasi dan konfigurasi selesai.

Dasar Pemikiran:

Depdiknas PSP bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pendidikan di sekolah pemerintah.

Sistem informasi memiliki kelemahan yang signifikan terkait dengan cakupan, akurasi, dan ketepatan waktu sehingga membuat pemangku kepentingan harus mengumpulkan informasi sendiri atau menggunakan hanya yang tersedia saja. Banyak indikator kunci, oleh karenanya, hanya berdasarkan perkiraan dan ada ketidakmampuan secara umum untuk melakukan pengukuran kinerja sektor secara akurat.

Depdiknas sedang berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dan untuk menyetujui anggaran IT yang dialokasikan untuk beberapa tahun belakangan ini.

PSP, yang bertanggungjawab untuk pengumpulan informasi di Depdiknas memiliki kapasitas terbatas di baik di tingkat individu dan organisasi. PSP kekurangan staf dengan kecakapan yang memadai, tidak memiliki organisasi atau strategi untuk mengkoordinasikan pengumpulan informasi atau pengembangan sistemnya tetapi memiliki sumber finansial yang cukup untuk melakukan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesepakatan telah dicapai pada bulan Agustus 2008 untuk membantu PSP mengembangkan proposal untuk mengadaptasi organisasinya untuk menanggapi Keputusan Menteri yang melegitimasi peran PSP sebagai pemilik dan pengelola data pendidikan. Namun PSP tidak memiliki organisasi yang dapat memberikan visi strategis untuk pengembangan sistem atau pengelolaan sistem informasi, maupun kapasitas untuk mengelola sistem yang ada saat ini atau mengembangkan solusi yang baru. Saat ini peran ini diletakkan pada divisi Pendidikan Dasar dari PSP dan belum ada anggota tim yang ditugaskan secara eksplisit untuk menjalankan peran ini. PSP mengakui adanya kelemahan ini dan perlunya sumber daya tambahan untuk membangun kapasitas manajemen informasi. Penasihat MCPM akan membantu counterpart PSP agar pejabat tinggi Depdiknas menyetujui untuk memperbesar DIPA PSP dan struktur organisasi dan posisi yang tepat untuk menangani kelemahan ini. Ini merupakan area sentral dari bantuan pengembangan kapasitas untuk PSP karena sebelum PSP memiliki sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta struktur organisasi yang tepat, setiap upaya untuk mendukung PSP dalam mengembangkan sistem baru memiliki Resiko untuk tidak dapat langgeng/berkesinambungan setelah bantuan dari penasihat MCPM selesai.

Sebagian dari alasan gagalnya sistem PSP yang ada saat ini adalah sistem tersebut dirancang untuk mendukung pekerjaan PSP tanpa memperhatikan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. PSP sangat tergantung dari pengguna di kabupaten untuk *data entry service*, tetapi PSP tidak memberikan insentif balik kepada kabupaten untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan memberikan informasi dan laporan yang berguna untuk operasional kegiatan pendidikan di tingkat kabupaten. Kemudian tingkat pengambilan dan pengembalian data kepada PSP juga rendah. PSP telah meminta dukungan untuk pembentukan dan fasilitasi *user group* yang dapat memberikan input untuk pengembangan sistem di masa mendatang. Ini merupakan perubahan pendekatan yang baik dari PSP dan akan didukung oleh Penasihat MCPM sebagai cara untuk meningkatkan kinerja EMIS PADATI menjadi lebih dapat digunakan dan berguna untuk pengguna data PSP di pusat dan kabupaten.

MCPM saat ini mempekerjakan dua pengembang sistem untuk meningkatkan sistem manajemen informasi sekolah (SMIS atau PAS) sebagai input tambahan kepada kemampuan pengumpulan data dari PSP PADATI. Sistem PAS dimaksudkan untuk digunakan untuk sekolah sehingga input langsung mengenai siswa dan informasi kelas bisa didapatkan secara *virtual real time*. Sistem ini memiliki keuntungan untuk memberikan data yang lebih mutakhir dibandingkan PADATI yang ada saat ini yang mengandalkan pada sensus tahunan.

Kegiatan MCPM:

1. PSP akan dibantu untuk pengadaan perangkat keras sebagaimana telah disetujui oleh PMU.
2. Para penasihat akan mendampingi PSP untuk memformulasikan dua *user group*, satu dari Pusat dan yang lain mewakili kabupaten untuk mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan. Informasi ini akan digunakan untuk mengembangkan prototype EMIS.
3. Penasihat juga akan membantu PSP untuk mengembangkan rencana untuk pengintegrasian. Fokus dari hal itu adalah mengidentifikasi struktur organisasi dan staf yang diperlukan untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara sistem saat ini dan di masa mendatang.
4. Pengembangan yang berkelanjutan atas Sistem Manajemen Informasi Sekolah (SMIS).
5. Bantuan untuk mendigitalisasi data GIS yang sudah dikumpulkan dan pengembangan program pengumpulan data koordinat sekolah.

Output:

1. PSP memiliki hardware dan software untuk menunjang pengembangan sistem PADATI.
2. PSP memiliki sumber daya dan keuangan yang cukup untuk menunjang sistem informasi mereka.
3. PSP secara aktif menuangkan feedback dari kelompok pengguna mereka ke dalam perbaikan sistem informasinya.
4. Pengadaan *hardware* selesai.
5. PADATI II telah dikembangkan untuk persiapan uji coba.
6. Pengembangan SMIS telah selesai.

Resiko:

1. Pergantian personil (harus menjelaskan lagi sejak awal).
2. Kemampuan *counterpart* untuk menerima dan mempertahankan perubahan.
3. Kapasitas organisasi untuk memberikan bantuan untuk operasional dan implementasi dari sistem yang baru.
4. Kurangnya pengakuan akan kebutuhan pemangku kepentingan di propinsi dan kabupaten.
5. Tekanan kerja *counterpart* yang berat sehingga tidak mempunyai waktu untuk ikut pelatihan.
6. Hambatan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.
7. Komitmen institusi untuk memberikan data yang akurat dan tepat waktu merupakan Resiko yang signifikan dimana tidak ada hubungan yang jelas terhadap nilai organisasional atau operasional atau data tersebut tidak didapatkan melalui proses yang sudah ada.

Komitmen institusi untuk memberikan data yang akurat dan tepat waktu merupakan Resiko yang signifikan dimana tidak ada hubungan yang jelas terhadap nilai organisasional tau operasional atau data tersebut tidak didapatkan melalui proses yang sudah ada.

Sumber Daya:

Information Management and Technology Adviser – (15 bulan)
Software Application Design Adviser – (15 bulan)
National Information Systems Implementation Adviser – (15 bulan)
SMIS / PAS – System Developers – (2 x 15 bulan)

Pengadaan Barang/Jasa:

Workshop Kegiatan
Biaya Perjalanan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$607,944

Fokus Area: 3.3 Laporan Keuangan dan Penyusunan Anggaran Depdiknas

Outcome 3.3: Sistem Manajemen Informasi Keuangan (FMIS) dan Pelaporan.

Output 3.3.1: Integrasi operasional dari FMIS ke dalam Biro Keuangan dan Satker kunci diformulasikan dan disetujui.

Output 3.3.2: Standar Prosedur Operasional telah disusun dan dicetak.

Output 3.3.3: Rencana Pengembangan Kapasitas untuk Biro Keuangan disetujui dan dijalankan.

Dasar Pemikiran:

Biro Keuangan Depdiknas menghadapi kesulitan yang cukup besar untuk menyusun laporan keuangan sesuai yang disyaratkan. Staf Biro Keuangan memiliki kemampuan yang kurang dalam mengoperasionalkan komputer; hanya sebagian kecil yang memiliki kecakapan untuk mengoperasionalkan komputer. Hanya 5 dari 27 staf dalam divisi pelaporan dari Biro Keuangan yang benar-benar bisa menggunakan komputer. Divisi Pelaporan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dari 399 unit kerja. Tabel berikut menunjukkan beban kerja dari divisi pelaporan.

Frekuensi Laporan	Unit Kerja	Total Laporan
26 dua-mingguan	399	10,374
12 bulanan	399	4,788
2 enam-bulanan	399	798
1 tahunan	399	399
Total Keseluruhan		16,359

Melihat keadaan ini, dapat dimengerti bahwa Biro Keuangan menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggungjawab pelaporan mereka.

Laporan keuangan Pemerintah Indonesia menggunakan sistem komputerisasi yang dikembangkan oleh Departemen Keuangan (DepKeu) yang terdiri dari 5 aplikasi terpisah. Setiap institusi diminta untuk menggunakan sistem tersebut. Unit Kerja Depdiknas menghadapi kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut karena rendahnya tingkat kecakapan komputer secara umum, dan ditambah dengan beratnya kompleksitas untuk harus menjalankan lima aplikasi yang tercakup dalam FMIS DepKeu, sehingga sulit sekali untuk menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Upaya MCPM yang pertama untuk mendukung Biro Keuangan adalah meneruskan pengembangan yang sebelumnya telah didanai oleh Bank Dunia untuk mengintegrasikan kelima aplikasi DepKeu. Pekerjaan ini telah dilakukan sebagai proyek, dengan sedikit sekali keterlibatan dari pihak counterpart dan tidak ada pengembangan kapasitas counterpart yang dilakukan bersamaan dengan itu. Biro Keuangan tidak memiliki organisasi atau staf yang mampu untuk mengambil alih manajemen dan dengan Outputs/Outcomes atas sistem DepKeu, tidak ada kemampuan untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berkesinambungan.

Sistem terpadu tersebut pada awalnya akan diluncurkan pada akhir tahun 2008. Namun tampaknya hal ini tidak memungkinkan karena adanya kesulitan yang cukup besar dalam merekrut tenaga *software developer* yang berpengalaman dan memenuhi kualifikasi. Biro Keuangan tidak memiliki sumberdaya atau kemampuan teknis untuk menuntaskan sistem ini, meningkatkan fungsinya atau meluncurkan, memberikan pelatihan mengenai dan memonitoring sistem tersebut.

Pekerjaan kedepannya akan memfokuskan lebih besar pada kegiatan pengembangan kapasitas yang memiliki sasaran untuk mendukung Biro Keuangan mendapatkan cara menangani hambatan kapasitas pelaporan yang tidak merupakan sistem berbasis teknologi karena adanya kemungkinan bahwa kompleksitas dari sistem yang saat ini sedang dikembangkan oleh MCPM nampaknya tidak dapat berjalan berkesinambungan.

Bantuan juga akan dilanjutkan untuk finalisasi dari Standar Prosedur Operasional untuk penggunaan sistem DepKeu. Saat ini staf yang ditugaskan untuk menjalankan sistem DepKeu tidak memiliki panduan yang jelas untuk menjelaskan proses yang harus mereka jalani. Hal ini mengakibatkan staf sepenuhnya bergantung pada kemampuan staf yang sudah ada untuk mentransfer praktik pekerjaan dan pengetahuan secara verbal dan melalui *on the job training*. Ini mengakibatkan pada proses yang kurang dipahami dan berkurangnya efektifitas dalam proses dan sistem DepKeu.

Kegiatan MCPM:

Pekerjaan akan diteruskan untuk pengembangan sistem sebelum ada keputusan lebih lanjut dari Depdiknas.

Para penasihat ditujukan untuk membantu *counterpart* memahami hakikat dari kelemahan-kelemahan dalam pelaporan dan penyusunan anggaran di dalam organisasi mereka dan membantu mereka mengembangkan rencana aksi untuk memperkenalkan langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

MCPM akan melihat dukungan konsultasi yang tepat untuk Biro Keuangan untuk menangani hambatan dalam kapasitas pelaporan yang ada saat ini.

Membantu *counterpart* untuk mengembangkan Standar Prosedur Operasional.

Output:

1. Pengintegrasian FMIS ke dalam Biro Keuangan dan Satker kunci disetujui.
2. Standar Prosedur Operasional telah dikeluarkan dan secara rutin digunakan oleh staf operasi sistem DepKeu.
3. Biro Keuangan dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan.
4. Biro Keuangan menjawab kendala kapasitas secara sistematis.

Resiko:

1. Pergantian personil (harus menjelaskan lagi sejak awal).
2. Kemampuan *counterpart* untuk menerima dan mempertahankan perubahan.
3. Kapasitas organisasi untuk memberikan bantuan untuk operasional dan implementasi dari sistem yang baru.
4. Kurangnya pengakuan akan kebutuhan pemangku kepentingan di propinsi dan kabupaten.
5. Tekanan kerja *counterpart* yang berat sehingga tidak mempunyai waktu untuk ikut pelatihan.
6. Hambatan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.
7. Lingkup dan langkah yang tercakup di dalam PMF cukup ekstensif tetapi mutu dari data yang tersedia rendah.
8. Komitmen institusi untuk menyampaikan data merupakan Resiko yang signifikan dimana tidak ada hubungan organisasi atau operasional yang jelas atau datanya tidak dikeluarkan dari proses yang ada.

Sumber Daya:

FMIS Technical Writer – (2 bulan)
FMIS Project Implementation Adviser – (15 bulan)
Finance Adviser – (17 bulan)
FMIS Systems Analyst – (15 bulan)
FMIS Software Engineer – (12 bulan)

Pengadaan Barang/Jasa:

Pengembangan Software
Workshop Kegiatan
Biaya Perjalanan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$425,814

Fokus Area: 3.4 Audit Internal

Outcome 3.4: Memperkuat kapasitas audit internal.

Output 3.4.1: Panduan Audit disusun, disetujui dan digunakan di tingkat sekolah.

Output 3.4.2: Meningkatnya penggunaan audit kinerja di tingkat pusat (Depdiknas dan Depag).

Output 3.4.3: Kapasitas auditor di tingkat pusat ditingkatkan.

Dasar Pemikiran:

Pemerintah Indonesia secara pasti telah mengimplementasikan langkah-langkah kontrol dan akuntabilitas dalam pemerintahan, dengan penekanan khusus terhadap audit. Anggaran Itjen telah digandakan selama beberapa tahun terakhir. Namun, ketersediaan dari auditor yang cakap tidak selaras dengan kebutuhan dan karenanya ada kekurangan kapasitas, terutama terkait dengan bentuk audit yang rumit dan kemampuan untuk melakukan cakupan audit yang lebih luas.

Itjen Depag khususnya terkena dampak dari rendahnya angka kelulusan ujian auditor dan lemahnya kapasitas untuk melaksanakan audit kinerja, terutama untuk sekolah-sekolahnya. Itjen Depag berharap untuk dapat mengembangkan kapasitas audit kinerja melalui pengembangan dan program percontohan panduan untuk sekolah auditor. Pada saat yang bersamaan, Depag berencana untuk mengimplementasikan program untuk meningkatkan mutu auditornya melalui pusat pelatihan.

Dukungan kepada Depdiknas masih terbatas hingga saat ini, terutama terkait keinginan Depdiknas dalam Peningkatan kapasitas yang berfokus pada kunjungan studi ke luar Negeri dan program magang. Namun demikian, sehubungan dengan adanya pergantian pimpinan di Inspektorat Jenderal (Itjen) dan diskusi informal dengan Itjen, terdapat suatu indikasi akan adanya niatan untuk membicarakan mengenai pemfokusan ulang kegiatan-kegiatan yang didukung oleh MCPM AIBEP. Tugas pertama Penasihat Audit – bilamana telah direkrut – adalah memformalisasikan suatu rencana kerja yang mendetil terkait dukungan MCPM kepada Itjen Depdiknas. Beberapa kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi Itjen Depdiknas yang berperan sebagai sumber daya terkait pengembangan kapasitas BAWASDA dalam melakukan audit atas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, termasuk konstruksi sekolah.
2. Membantu pengembangan manual audit kinerja untuk pendidikan dasar dengan mengadopsi manual serupa yang digunakan oleh pendidikan tinggi, termasuk beberapa tes lapangan.
3. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan mengenai teknis audit.

Kegiatan MCPM:

1. Pengembangan Kapasitas yang ditargetkan kepada audit sekolah BEP, keuangan umum dan audit kinerja.
2. Mendukung pengembangan Panduan Audit.

Outputs/Outcomes:

1. Panduan Audit telah dikembangkan dan disetujui.
2. Baik Depag dan Depdiknas menjalankan jumlah audit kinerja yang lebih banyak pada tingkat pusat.
3. Audit sekolah yang dilakukan oleh Depdiknas dan Depag mengikuti panduan yang baru.
4. Kapasitas auditor telah ditingkatkan melalui program-program pelatihan.

Resiko:

1. Pergantian personil (harus menjelaskan lagi sejak awal).
2. Kemampuan counterpart untuk menerima dan mempertahankan perubahan.
3. Kapasitas organisasi untuk memberikan bantuan untuk operasional dan implementasi dari sistem yang baru.
4. Kurangnya pengakuan akan kebutuhan pemangku kepentingan di propinsi dan kabupaten.

5. Tekanan kerja counterpart yang berat sehingga tidak mempunyai waktu untuk ikut pelatihan.
6. Hambatan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.
7. Lingkup dan langkah yang tercakup di dalam PMF cukup ekstensif tetapi mutu dari data yang tersedia rendah.
8. Komitmen institusi untuk menyampaikan data merupakan Resiko yang signifikan dimana tidak ada hubungan organisasi atau operasional yang jelas atau datanya tidak dikeluarkan dari proses yang ada.

Sumber Daya:

Audit Adviser – (15 bulan)

Pengadaan Barang/Jasa:

Workshop Kegiatan

Biaya Perjalanan

Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$183,952

Focal Area: 3.5 Inovasi ICT dalam Pendidikan
Outcome 3.5: Sistem Bantuan Inovasi ICT dibangun dan diimplementasikan.
<p>Output 3.5.1: Strategi manajemen bantuan disusun dan dievaluasi.</p> <p>Output 3.5.2: Tiga bantuan diimplementasikan dan dievaluasi.</p>
<p>Dasar Pemikiran: Program BEP dirancang untuk memuat ketentuan mengenai implementasi program untuk mengaplikasikan ICT yang inovatif sebagai solusi atas masalah-masalah pendidikan. Tujuannya adalah untuk menggunakan solusi ICT yang inovatif untuk mendukung akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan peningkatan mutu belajar mengajar. Namun demikian, dukungan tersebut masih terbatas pada pengembangan kapasitas terkait dengan implementasi dari proposal inovasi ICT.</p>
<p>Kegiatan MCPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pengembangan panduan seleksi. 2. Membentuk Panitia Inovasi ICT (Innovations Committee). 3. Menyusun mekanisme hibah dan spesifikasi proposal. 4. Membentuk mekanisme seleksi. 5. Mengeluarkan undangan untuk proposal, menyaring, dan melaksanakan proses seleksi (termasuk meminta persetujuan AusAID). 6. Menyusun dan mengimplementasikan sistem monitoring. 7. Serangkaian kegiatan sosialisasi mengenai outcome dan best practices. Penyusunan rekomendasi kebijakan.
<p>Outcomes/Outputs: Grants strategy and system developed, evaluated and agreed Appropriate innovation proposals are selected, funded and monitored for implementation.</p>
<p>Risks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turnover of agency personnel (loss of corporate knowledge) 2. Organisational capacity to provide support for monitoring. 3. Lack of political support 4. Low capacity of key personnel 5. Lack of acceptance by counterparts 6. Counterparts work pressures do not allow for adequate time to participate 7. Personnel targeted for development do not attend workshops and training 8. Funding constraints from either MCPM or Gol.
<p>Sumber Daya: 1 ICT Innovations Adviser – (12 bulan) Pendanaan Bantuan ICT</p>
<p>Goods/Services Purchased: Tempat penyelenggaraan seminar Biaya perjalanan dan per diems untuk partisipan</p>
Total Indikasi Alokasi Sumber Daya: A\$150,000

Lampiran B: Matriks Kegiatan dan Tanggung Jawab M&E

BEP 2009-2010 Matriks Kegiatan dan Tanggung Jawab M&E¹³

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
Pilar 1: PENINGKATAN AKSES				
Outcome 1.1 Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama (Depdiknas)				
Output 1.1.1 1500 sekolah menengah pertama baru dan 'satu atap', yang menyediakan 250,000 bangku pendidikan tambahan, yang dibangun sesuai dengan kriteria yang disepakati dan dengan kualitas yang baik.				
(a) APK dan APM SD dan SMA di kabupaten/kota sasaran	Survey Tahunan PSP dan data kabupaten	MCPM M&E	Tahunan	PAF-objective 5 (i)
(b) Jumlah bangku siswa baru yang disediakan oleh sekolah.	Database BEP	MCPM M&E	Tahunan	
(c) Persentase Komite Pembangunan Sekolah yang mematuhi peraturan pengadaan.	Survey Procurement (Tim Audit MCPM)	PMU Depdiknas dengan dukungan MCPM	Ongoing – can be reported Kuartalan	Cross-cutting issues (i)
(d) Nilai Mean pada Daftar Periksa Mutu (<i>Quality Checklist</i>), diambil di semua sekolah.	Quality Checklist MCPM	Pilar 1 MCPM	Ongoing – can be reported Kuartalan	
(e) Jumlah sekolah yang mendapat sertifikat BAST II oleh Depdiknas dan Komite Pembangunan Sekolah.	PMU Depdiknas	Depdiknas dan MCPM	Tahunan	
Output 1.1.2 1500 Komite Pembangunan Sekolah telah dibentuk dan beroperasi.				
(a) Persentase Komite Pembangunan Sekolah BEP dengan perwakilan aktif dari masyarakat.	Laporan insepri PMU	PMU dengan dukungan MCPM	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (v)
(b) Persentase pertemuan Komite Pembangunan Sekolah setidaknya setiap dua bulan sekali.	Laporan contoh studi	MCPM – CDC	Tahunan	
Output 1.1.3 Pengadaan dan pengelolaan CDC untuk mensupervisi Output 1.1.1 untuk peningkatan standard dan sesuai dengan ToR. (termasuk monitoring independen berkala terhadap lokasi).				
(a) Jumlah workshop pelatihan/sosialisasi yang diadakan.	Data keuangan MCPM	MCPM – Pilar 1	Kuartalan	
(b) Persentase CDC yang menghadiri setiap workshop terkait.	Data workshop MCPM	MCPM - Pilar 1	Kuartalan	
(c) Persentase Komite Pembangunan Sekolah yang menghadiri setiap workshop terkait.	Data workshop MCPM	MCPM – Pilar 1	Kuartalan	
(d) Jumlah kepuasan atas gambar 'as built' yang ditanda tangani oleh CDC dan Komite Pembangunan Sekolah.	Laporan akhir kepada PMU	1. PMU 2. MCPM	Tahunan	
(e) Persentase lokasi yang mematuhi peraturan BEP dalam hal material yang mengandung asbestos (ACM), penghijauan, dan <i>sustainable timber</i>	Survey ACM dan Quality Checklist	MCPM – Pilar 1	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (i)
(f) Persentase kepatuhan pembangunan sekolah BEP dengan standar Pemerintah Indonesia mengenai air dan sanitasi serta bangunan tahan gempa bumi.	Quality Checklist	MCPM – Pilar 1	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (ii) & (vi)
(g) Jumlah komplain terhadap CDC yang tercatat dalam CHS.	CHS	Depdiknas dan MCPM	Kuartalan	

¹³ NOTE: The MCPM's M&E Adviser takes overall responsibility for collecting M&E data from relevant entities/data sources and submitting an analysis of progress against each of the performance indicators in this table to AusAID and the PCMU. The MCPM M&E Adviser will furnish this analysis to AusAID and the PCMU primarily via the BEP Quarterly Project Reports and the BEP Annual Progress Report. To assist the MCPM M&E Adviser in fulfilling its function, entities shown in column 4 are required to report M&E data to the MCPM M&E Adviser with the frequency and timing shown in column 5.

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
(h) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh TTP: (i) tidak pernah, (ii) sekali, (iii) dua kali, (iv) tiga kali atau lebih	Laporan TTP kepada Depdiknas	PMU Depdiknas	Tahunan	
(i) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh TTK: (i) tidak pernah, (ii) sekali, (iii) dua kali; (iv) tiga kali atau lebih.	Laporan TTK kepada Depdiknas	PMU Depdiknas	Tahunan	
(j) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh Konsultan Lapangan MCPM: (i) tidak pernah, (ii) sekali; (iii) dua kali; (iv) tiga kali atau lebih.	Data MCPM	MCPM – Pilar 1	Tahunan	
(k) Persentase isu yang diangkat oleh Konsultan Lapangan MCPM di mana ada bukti tindak lanjut yang memuaskan.	Laporan CRS dan Depdiknas	PMU Depdiknas and MCPM	Tahunan	
Output 1.1.4 Sistem Laporan Konstruksi (CRS) and Sistem Penanganan Keluhan (CHS)				
(a) Jumlah laporan yang dikirimkan oleh PMU Depdiknas kepada PCMU termasuk tindak lanjutnya.	Data CHS dan PCMU	PMU Depdiknas	Kuartalan	
(b) Persentase total keluhan yang diterima yang sudah di 'close' oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia.	Data PCMU	PMU Depdiknas	Tahunan	
(c) Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses keluhan sejak keluhan tersebut diterima sampai berstatus 'closed.'	CHS	PMU Depdiknas dengan dukungan MCPM	Tahunan	
Output 1.1.5 Kajian atas pengadaan dilakukan dan Laporan Pengadaan diproduksi.				
(a) Laporan pengadaan selesai.	PMU Depdiknas dan MCPM Pilar 1	PMU Depdiknas	Tahunan	
(b) Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan di masa datang disertakan dalam Laporan Pengadaan bilamana diperlukan.	PMU Depdiknas	PMU Depdiknas	Tahunan	
(c) Kegiatan peningkatan kapasitas diidentifikasi sebagaimana mestinya.	PMU Depdiknas	PMU Depdiknas	Tahunan	
Outcome 1.2 Peningkatan Akses terhadap Pendidikan Menengah Pertama (Depag)				
Output 1.2.1 500 Madrasah Tsanawiyah swasta baru dan 'satu atap', yang menyediakan 80,000 bangku sekolah tambahan, dibangun sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dan memenuhi tingkat kualitas yang lebih baik.				
(a) APK dan APM SD dan SMP di kabupaten-kabupaten/kotatasaran.	Survey Tahunan PSP dan data kabupaten	MCPM M&E	Tahunan	PAF-objective 5 (i)
(b) Jumlah bangku siswa baru yang disediakan oleh madrasah.	Database BEP	MCPM M&E	Tahunan	
(c) Persentase Komite Pembangunan Madrasah yang mematuhi peraturan pengadaan.	Survey Procurement (Tim Audit MCPM)	PMU Depag dengan dukungan MCPM	Terus berjalan – dapat dilaporkan Kuartalan	Cross-cutting issues (i)
(d) Nilai Mean pada Daftar Periksa Mutu (Quality Checklist), diambil dari semua madrasah sekolah.	MCPM Quality Checklists	MCPM – Pilar 1	Terus berjalan – dapat dilaporkan Kuartalan	
(e) Jumlah sekolah mendapat sertifikat BAST II oleh Depag dan Komite Pembangunan Madrasah.	PMU Depag	Depag dan MCPM	Tahunan	
Output 1.2.2 Komite Pembangunan Sekolah Madrasah (500) telah dibentuk.				
(a) Persentase Komite Pembangunan Madrasah BEP dengan perwakilan aktif dari masyarakat.	Laporan insepasi PMU	PMU dengan dukungan MCPM	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (v)
(b) Persentase pertemuan Komite Pembangunan Madrasah setidaknya setiap dua bulan sekali.	Laporan contoh studi	MCPM - CDCs	Tahunan	
Output 1.2.3 Pengadaan dan pengelolaan CDC untuk mensupervisi Output 1.2.1 untuk peningkatan standard dan sesuai dengan ToR (termasuk monitoring independen berkala terhadap lokasi).				
(a) Jumlah workshop pelatihan/sosialisasi yang diadakan.	Data workshop MCPM	MCPM – Pilar 1	Kuartalan	

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
(b) persentase CDC yang menghadiri workshop terkait.	Data workshop MCPM	MCPM – Pilar 1	Kuartalan	
(c) persentase Komite Pembangunan Madrasah yang menghadiri workshop terkait.	Data workshop MCPM	MCPM – Pilar 1	Kuartalan	
(d) Jumlah kepuasan atas gambar 'as built' yang ditanda tangani oleh CDC dan Komite Pembangunan Madrasah	Laporan akhir CDC kepada PCMU	1. PMU 2. MCPM	Tahunan	
(e) Persentase lokasi yang mematuhi peraturan BEP dalam hal material yang mengandung asbestos (ACM), penghijauan, dan sustainable timber	Survey ACM dan Quality Checklist	MCPM – Pilar 1	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (i)
(f) Persentase kepatuhan pembangunan sekolah BEP dengan standar Pemerintah Indonesia mengenai air dan sanitasi serta bangunan tahan gempa bumi.	Quality Checklist	MCPM – Pilar 1	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (ii) & (vi)
(g) Jumlah komplain terhadap CDC yang tercatat dalam CHS.	CHS	Depag	Kuartalan	
(h) Persentase lokasi yang dikunjungi oleh Konsultan Lapangan MCPM: (i) tidak pernah, (ii) sekali; (iii) dua kali; (iv) tiga kali atau lebih.	Data MCPM	MCPM – Pilar 1	Tahunan	
(i) Persentase isu yang diangkat oleh Konsultan Lapangan MCPM di mana ada bukti tindak lanjut yang memuaskan.	Data MCPM	MCPM – Pilar 1	Tahunan	
Output 1.2.4 Sistem Laporan Konstruksi (CRS) and Sistem Penanganan Keluhan (CHS) telah beroperasi dan terlembaga di dalam sistem Depag.				
(a) Jumlah laporan yang dikirimkan oleh PMU Depag kepada PCMU termasuk tindakan lanjutnya.	Data CHS dan PCMU	PMU Depag	Kuartalan	
(b) Persentase total keluhan yang diterima yang sudah di 'close' oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia.	Data PCMU	PMU Depag	Tahunan	
(c) Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses keluhan sejak keluhan tersebut diterima sampai berstatus 'closed.'	CHS	PMU Depag dengan dukungan MCPM	Tahunan	
Outcome 1.3 Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Sekolah				
Output 1.3.1 2000 lokasi sekolah ada di bawah upaya peningkatan pengelolaan asset.				
(a) Jumlah sekolah dan madrasah dengan Rencana Manajemen dan Pemeliharaan Aset yang memuaskan.	Survey Tahunan dengan sample studi melalui wawancara	MCPM M&E	Tahunan	
(b) Persentase dinas pendidikan kabupaten/kota BEP yang sedikitnya sekali menghadiri workshop manajemen aset.	Data workshop MCPM	MCPM – Pilar 1	Kuartalan	
(c) Persentase yayasan pesantren yang sedikitnya sekali menghadiri workshop manajemen aset.	Data workshop MCPM	MCPM – Pilar 1	Kuartalan	
Output 1.3.2 Rencana Pengelolaan Material mengandung Asbestos (ACM) telah disusun.				
(a) Persetujuan pemerintah Indonesia, secara tertulis, mengenai Rencana Manajemen Material Mengandung Asbestos (ACM).	Korespondensi Depdiknas	MCPM – Pilar 1	Tahunan	

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR	
Pilar 2: PENINGKATAN MUTU					
Outcome 2.1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
Output 2.1.1 Kerangka kerja untuk meneruskan pengembangan profesi untuk personil sekolah dan para pengawas telah disiapkan dan diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.					
(a)	Peraturan Menteri tentang Pengembangan Profesional Berkelanjutan Guru (CPD) berlaku dan kerangka kerja CPD diterbitkan.	Dokumen Kementerian dan Depdiknas	Depdiknas (PMPTK)	Tahunan	
Output 2.1.2 Peraturan Menteri untuk personil sekolah mencakup seluruh aspek dari pengembangan karir sejak perekrutan hingga persiapan pensiun telah disusun dan disetujui oleh Direktorat Tenaga Kependidikan.					
(a)	Peraturan Menteri tentang struktur dan pengembangan karir personil sekolah difinalisasikan dan diterbitkan oleh Direktorat sebelum 30 Juni 2010.	Dokumen Kementerian dan Depdiknas	Depdiknas (PMPTK)	Tahunan	
Output 2.1.3 Sistem Penilaian Kinerja telah dikembangkan dan disetujui oleh Depdiknas dan Depag.					
(a)	Desain sistem penilaian kinerja disetujui dan diterbitkan oleh Depdiknas dan Depag sebelum 30 Juni 2010. Rencana implementasi dikembangkan.	Publikasi Depdiknas dan Depag perihal Penilaian Kerja	Depdiknas (PMPTK)	Tahunan	
Output 2.1.4 Sistem lisensi dan prosedur telah disetujui dan disosialisasikan oleh Depdiknas.					
(a)	Pedoman Kebijakan untuk sistem lisensi telah rampung dan prosedurnya difinalisasi serta disetujui oleh Depdiknas sebelum 30 Juni 2010.	Draf rencana pengembangan dan implementasi Peraturan Menteri	Depdiknas (PMPTK) dan MCPM	Kuartalan	
Output 2.1.5 Strategi pengembangan kapasitas untuk manajemen kurikulum telah disetujui oleh Depag, manual telah disusun dan sistem diuji coba.					
(a)	Strategi manajemen kurikulum dan pedoman terkait telah difinalisasi dan diterbitkan oleh Depag sebelum 30 Juni 2010.	Manual Dissemination Plan	Kurikulum Depag	Kuartalan	
(b)	Laporan diterbitkan oleh Depag sebelum 30 Juni 2010, menganalisis kinerja sistem uji coba manajemen kurikulum.	Laporan Depag	Depag	Kuartalan	
Output 2.1.6 Kajian institusional dan pengembangan kapasitas dari CET dan BET telah selesai dibawah pengembangan mutu dan penjaminan mutu Depag.					
(a)	1 CET dan 12 BET dibuat untuk fungsi yang direvisi.	CET Depag	Depag	Dua Tahunan	
Output 2.1.7 Kapasitas Pusbuk untuk mendukung sekolah, guru dan tenaga pendidikan lainnya telah ditingkatkan melalui adanya website informasi, publikasi web dan penyediaan Bahan Bacaan Tambahan.					
(a)	Jumlah kunjungan ke website Pusbuk.	Manajer Website Pusbuk	Pusbuk	Tahunan	
(b)	Jumlah buku teks dan panduan guru yang di-upload ke website.	Manajer Website Pusbuk	Pusbuk	Tahunan	
(c)	Jumlah sekolah BEP dengan SRM yang dipilih untuk mencerminkan sensitivitas gender.	Kajian MCPM	MCPM M&E	Tahunan	Cross-cutting issues (ii)
(d)	Persentase materi pengajaran/pembelajaran yang disediakan lewat BEP yang oleh MCPM Gender Adviser dianggap mematuhi prinsip-prinsip utama kesetaraan gender.	Kajian MCPM	MCPM M&E dengan dukungan Gender Adviser	Tahunan	Cross-cutting issues (ii)
Output 2.1.8 Program Pendidikan Inklusif diperkenalkan di program pelatihan para guru pra-jabatan dan tersedia bagi CPD.					
(a)	Jumlah Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Guru dengan program	Program kursus dari universitas dan	Tim IE MCPM	Tahunan mulai 2009	

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
Pendidikan Inklusif yang spesifik sebagai bagian dari program pengajaran umum.	institut TT			
Outcome 2.2 Penjaminan Mutu Sekolah				
Output 2.2.1 Standar Nasional BSNP dan indikator kinerja terkait telah difinalisasi dan digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan reliabel mengenai mutu sekolah dan institusi pendidikan lainnya.				
(a) Jumlah standar dan indikator nasional yang difinalisasikan.	Laporan BSNP	BSNP	Tahunan	
(b) Jumlah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang dinilai berdasarkan standar.	Laporan BSNP	BSNP	Tahunan mulai 2009	
(c) Persentase sekolah dan lembaga pendidikan terkait serta sistem yang memenuhi standar BSNP di kabupaten-kabupaten/kotasasaran BEP.	Survey Sample MCPM	MCPM P2 dengan Tim M&E	Tahunan mulai 2009	PAF-objective 5 (iii)
Output 2.2.2 Kerangka Regulasi EQAIS dan panduan teknis terkait lainnya dikembangkan oleh Depdiknas dan Depag untuk Sistem Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pendidikan.				
(a) Peraturan Nasional diterbitkan.	Peraturan atau SK Depdiknas	Depdiknas (PMPTK)	Tahunan	
(b) Jumlah Petunjuk Teknis yang rampung dan jumlah yang digunakan oleh LPMP.	Laporan Depdiknas Data LPMP	Depdiknas/Depag	Kuartalan	
(c) Jumlah kabupaten/kotadi setiap provinsi yang mengoperasikan elemen-elemen inti, termasuk SSSE dan monitoring kabupaten/kota atas sekolah.	Survey Sample MCPM	MCPM P2 dengan Tim M&E	Tahunan	
Output 2.2.3 LPMP memiliki kapasitas untuk beroperasi secara efektif sebagai Pusat Penjaminan Mutu.				
(a) Jumlah program pelatihan yang ditawarkan mengenai Penjaminan Mutu untuk personel kabupaten/kotadan sekolah melalui seluruh LPMP.	Data pelatihan LPMP	Depdiknas/MCPM	Kuartalan	Country strategy indicators: other objectives (iv)
(b) Jumlah LPMP dengan sistem penjaminan mutu institusional	Sistem QA yang terdokumentasikan di setiap LPMP	Depdiknas	Tahunan	
Output 2.2.4 Model kajian kapasitas kabupaten/kotauntuk penjaminan mutu telah disusun dan disepakati.				
(a) Jumlah LPMP yang mengimplementasikan asesmen kapasitas kabupaten/kota dengan menggunakan model tersebut.	Data LPMP dan Kabupaten	Depdiknas	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (iv)
Output 2.2.5 Model SSSE untuk memungkinkan kepek mengelola school self-evaluation (SSE) terhadap standar BSNP telah disusun.				
(a) Jumlah LPMP yang menawarkan pelatihan kepada kabupaten/kotauntuk mendukung pengenalan SSSE.	Data pelatihan LPMP	Depdiknas	Tahunan atau Dua Tahunan mulai Juni 2009	Country strategy indicators: other objectives (iv)
(b) Jumlah sekolah BEP yang menggunakan pendekatan SSE untuk evaluasi sekolah dan perencanaan WSD.	Survey Tahunan MCPM Kajian Rencana Pengembangan Sekolah	MCPM M&E MCPM P2	Tahunan	
Output 2.2.6 Kabupaten memiliki kapasitas yang lebih baik dalam melaksanakan Kajian Eksternal Sekolah atau Targeted External School Reviews.				
(a) Jumlah kabupaten/kotapercontohan yang memiliki kapasitas dalam mendukung evaluasi eksternal.	Survey Tahunan MCPM Data kabupaten	Kabupaten dan MCPM	Dua Tahunan mulai Juni 2009	
Outcome 2.3 Pengembangan Sekolah Terpadu				
Output 2.3.1 Diperkirakan sekitar 10,000 pimpinan sekolah BEP memiliki kapasitas memadai mengenai manajemen dan operasional berbasis sekolah.				
(a) Jumlah sekolah BEP dengan Komite Manajemen Sekolah yang aktif.	Survey Tahunan dengan sample studi melalui	MCPM M&E	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (v)

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
	wawancara			
(b) Jumlah sekolah BEP yang memiliki Rencana Pengembangan Sekolah.	Survey Tahunan dengan sample studi melalui wawancara	MCPM M&E	Tahunan	
(c) Perubahan dalam tingkat ketuntasan belajar SD dan SMP di kabupaten-kabupaten/kotasasaran.	Survey Tahunan plus PSP dan data dari Districts	MCPM M&E	Tahunan	PAF-objective 5 (ii)
Output 2.3.2 Depdiknas dan Depag menyetujui kebijakan dan pendekatan untuk peningkatan mutu sekolah yang berkesinambungan.				
(a) Laporan dan rencana Depdiknas dan Depag untuk tahun 2010 dan tahun berikutnya.	Dokumentasi resmi dari Depdiknas dan Depag	WSD (MCPM) dan WSD/WDD Development Group	Tahunan 2009	
Output 2.3.3 Pengawas sekolah BEP memiliki kapasitas untuk mendukung peningkatan mutu sekolah.				
(a) Jumlah pengawas yang diberi pelatihan dalam strategi-strategi peningkatan mutu sekolah.	Data workshop MCPM	Tim WSD MCPM - plus data dari LPMP	Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (iv)
Output 2.3.4 Semua sekolah BEP diberi pelatihan mengenai aspek-aspek kunci Pendidikan Inklusif				
(a) Jumlah sekolah BEP dengan program dan/atau kebijakan Pendidikan Inklusif.	Survey Tahunan dengan sample studi melalui wawancara	MCPM M&E	Tahunan	
Output 2.3.5 Prinsip-prinsip pengarus utamaan gender dan kesetaraan disosialisasikan ke semua sekolah BEP.				
(a) Jumlah sekolah BEP (termasuk madrasah) dengan kebijakan dan strategi pengarus utamaan gender sebagai bagian dari rencana pengembangan sekolah.	Survey Tahunan dengan sample studi melalui wawancara	MCPM M&E	Tahunan	Cross cutting issues (ii)
Outcome 2.4 Pengembangan Kabupaten Terpadu				
Output 2.4.1 Tenaga Pendidikan di seluruh kabupaten/kota BEP telah diberikan pelatihan mengenai bagaimana merencanakan dan memfasilitasi peningkatan dan perbaikan pengelolaan sekolah untuk memenuhi standar BSNP.				
(a) Jumlah personil kabupaten/kota yang diberi pelatihan tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah.	Data workshop WDD dengan sample studi melalui wawancara	Tim WDD MCPM	Kuartalan	Country strategy indicators: other objectives (iv)
(b) Jumlah kabupaten/kota sasaran yang memiliki rencana komprehensif mengenai pelaksanaan layanan pendidikan.	Survey Tahunan dengan sample studi melalui wawancara	Tim M&E MCPM dan Tim WDD	Tahunan	
(c) Jumlah kabupaten/kota BEP yang mengalami peningkatan anggaran pendidikan dengan total anggaran 2010 dibandingkan dengan total anggaran 2007.	Data kabupaten dengan sample studi melalui wawancara	MCPM M&E team	Tahunan	
(d) Jumlah kabupaten/kota BEP yang dapat melacak kinerja sektor dan menggunakan temuan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya lebih lanjut.	Survey Tahunan dengan sample studi melalui wawancara	MCPM and CSAS	Tahunan	PAF-objective 5 (i)
Output 2.4.2 Depdiknas dan Depag menyetujui kebijakan dan pendekatan yang sistemik untuk mendukung pendidikan yang berkelanjutan di kabupaten.				
(a) Laporan dan rencana Depdiknas dan Depag untuk tahun 2010 dan tahun berikutnya.	Dokumentasi resmi Depdiknas dan Depag	Tim WDD MCPM	Tahunan 2009	
Output 2.4.3 Pengarusutamaan gender dan prinsip kesetaraan telah disosialisasikan kepada seluruh sekolah dan kabupaten/kota BEP.				
(a) Jumlah kabupaten/kota BEP (termasuk madrasah) yang memiliki kebijakan dan strategi pengarus utamaan gender sebagai bagian dari rencana	Survey Tahunan	MCPM M&E	Tahunan	Cross cutting issues (ii)

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
pengembangan sekolah.				
Output 2.4.4 Semua kabupaten/kotaBEP diberi pelatihan mengenai aspek-aspek kunci Pendidikan Inklusif.				
(a) Jumlah kabupaten/kota BEP yang memiliki program dan/atau kebijakan Pendidikan Inklusif.	Survey Tahunan	MCPM M&E	Tahunan	
Outcome 2.5 Peningkatan Mutu Gender				
Output 2.5.1 Peraturan Menteri telah disetujui dan disosialisasikan.				
(a) Jumlah provinsi di mana Peraturan Menteri disosialisasikan.	Data workshop dan sosialisasi Depdiknas dan Depag	MCPM Gender Adviser dan Pokja Gender Depdiknas dan Depag	Tahunan	
Output 2.5.2 Strategi (Model) untuk pengarusutamaan gender secara nasional telah disusun, diujicoba dan dimulai implementasinya.				
(a) Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan strategi gender untuk pendidikan.	Data Depdiknas dan Depag plus informasi survey	Tim M&E MCPM, MCPM Gender Adviser dan Tim WDD, Pokja Gender Depdiknas dan Depag	Tahunan	Cross cutting issues (ii)
Output 2.5.3 Prinsip-prinsip gender diaplikasikan di semua kegiatan P1, P2, dan P3.¹⁴				
(a) Jumlah dan persentase partisipan dan penerima bantuan perempuan di kegiatan-kegiatan yang disukung BEP.	Data workshop dan penerima bantuan Pilar 1, 2 and 3	Tim M&E MCPM	Kuartalan	Cross cutting issues (iv)
Outcome 2.6 Pendekatan Terpadu untuk Pendidikan Inklusif (IE)				
Output 2.6.1 Peraturan Menteri, Panduan dan Kebijakan telah disusun dan disosialisasikan secara nasional melalui Depdiknas.				
(a) Peraturan Menteri, Pedoman, dan Kebijakan diterbitkan dan tersedia.	Dokumentasi Depdiknas	Tim IE MCPM	Tahunan	
(b) Jumlah provinsi dan kabupaten/kotadi mana Peraturan Menteri disosialisasikan.	Data workshop MCPM	Tim IE MCPM	Tahunan	

¹⁴ Prinsip-prinsip kesetaraan pengarus utamaan gender merupakan elemen semua kegiatan di semua Pilar, untuk tujuan M&E indikator ini mengakumulasikan data partisipan dan penerima manfaat perempuan di bawah satu heading.

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
Pilar 3: PENINGKATAN TATA KELOLA				
Outcome 3.1 Dukungan terhadap RENSTRA				
Output 3.1.1 RENSTRA Nasional yang komprehensif telah disusun dan setuju oleh Depdiknas, Depag dan Menteri Pendidikan.				
(a) RENSTRA disahkan.	SK Menteri	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.1.2 Panduan untuk RENSTRA Nasional telah disusun dan dikeluarkan.				
(a) Pedoman telah rampung.	Dokumen panduan	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
(b) Jumlah pedoman yang dikeluarkan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.	Pendistribusian laporan (BAPPENAS, Depdiknas dan Depag)	MCPM P3 Adviser	Tahunan	
Output 3.1.3 Panduan M&E RENSTRA diterbitkan.				
(a) Jumlah administrator di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kotayang menerima salinan panduan.	Pendistribusian laporan (BAPPENAS, Depdiknas dan Depag)	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	Country strategy indicators: other objectives (iv)
Output 3.1.4 MTEF di Depdiknas diintegrasikan ke dalam RENSTRA dan siklus perencanaan tahunan.				
(a) Pedoman perencanaan menyertakan arah untuk pengembangan MTEF.	Dokumen panduan	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.1.5 Formula dan mekanisme pendanaan Depag dikembangkan.				
(a) Formula dan mekanisme dikembangkan dan disetujui.	Mekanisme dokumen Laporan Depag	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.1.6 Desain organisasi dan rencana implementasi Depag disetujui.				
(a) Desain dan Rencana rampung dan disetujui serta tersedia.	Dokumen rancangan dan perencanaan Laporan Depag	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Outcome 3.2 Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Pendidikan (EMIS) Depdiknas				
Output 3.2.1 Kemampuan dan kapasitas manajemen informasi PSP telah diperkuat.				
(a) Unit Manajemen Informasi memiliki sumber daya yang tepat.	Manajemen PSP Kajian pelatihan kapasitas (pre dan post)	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
(b) Jumlah staf PSP yang berpartisipasi dalam, dan memetik manfaat dari, program pelatihan.	Data workshop MCPM (termasuk laporan evaluasi workshop)	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.2.2 PADATI II telah dikembangkan untuk ujicoba kesiapan.				
(a) Sistem dalam kesiapan uji coba sebagaimana diverifikasi oleh Direktur PSP.	Rencana roll-out untuk pilot testing	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.2.3 Sistem Manajemen Informasi Sekolah (SMIS) telah diselesaikan.				

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
(a) Sistem dalam kesiapan uji coba sebagaimana diverifikasi oleh Direktur PSP.	PSP dan Laporan User Groups	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.2.4 PSP mengumpulkan data Anak Berkebutuhan Khusus dengan menggunakan model terbaru untuk identifikasi dan klasifikasi.				
(a) Sistem pengumpulan data dan laporan PSP jelas mengidentifikasi jumlah Anak Berkebutuhan Khusus.	Direktur PSP Direktorat Pendidikan Luar Biasa	MCPM IE team MCPM P3 Adviser	Tahunan	
(b) Anak Berkebutuhan Khusus diklasifikasikan dengan benar di laporan PSP.	Direktur PSP Direktorat Pendidikan Luar Biasa	MCPM IE team MCPM P3 Adviser	Tahunan	
Output 3.2.5 Pengadaan, instalasi, dan konfigurasi hardware telah selesai.				
(a) Hardware di-install, software dikonfigurasi, dan staf diberi pelatihan.	Kelengkapan dokumentasi	MCPM P3 Adviser PSP Director	Dua Tahunan	
Outcome 3.3 Sistem Manajemen Keuangan Depdiknas				
Output 3.3.1 Pengintegrasian FMIS ke dalam Biro Keuangan dan Satker kunci telah dibentuk dan disepakati.				
(a) Sistem beroperasi di semua unit terkait.	Laporan Biro Keuangan dan Satker	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.3.2 Prosedur standar operasional telah dikembangkan dan dikeluarkan.				
(a) Prosedur Operasi Standar rampung dan dibagikan kepada personil terkait.	Dokumentasi SOP (termasuk pendistribusian materi)	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.3.3 Rencana Pengembangan Kapasitas untuk Biro Keuangan telah disetujui.				
(a) Rencana BoF untuk CD disetujui dan disahkan.	Rencana Biro Keuangan	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Outcome 3.4 Audit Internal				
Output 3.4.1 Panduan Audit telah disusun dan disepakati dan digunakan di tingkat sekolah.				
(a) Jumlah sekolah yang memiliki salinan Pedoman Audit.	Survey Sekolah	MCPM M&E	Tahunan	
(b) Jumlah sekolah yang telah diaudit dengan menggunakan Pedoman yang baru.	Laporan Audit Sekolah	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.4.2 Peningkatan penggunaan audit kinerja di tingkat pusat (Depdiknas dan Depag).				
(a) Jumlah Audit Kinerja yang dilakukan di Depdiknas dan Depag.	Data Audit Kinerja	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Output 3.4.3 Kapasitas Auditor di tingkat pusat telah ditingkatkan.				
(a) Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan.	Data kehadiran peserta pelatihan	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
(b) Jumlah peningkatan kapasitas laporan auditor sebagai hasil dari pelatihan.	Data kehadiran peserta pelatihan	MCPM P3 Adviser	Dua Tahunan	
Outcome 3.5 Inovasi ICT dalam Pendidikan				
Output 3.5.1 Strategi manajemen bantuan disusun dan dievaluasi.				
(a) Strategi bantuan manajemen disepakati dan disetujui oleh para pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia.	Laporan Pokja ICT dan laporan dari pemangku	Pokja ICT dan M&E MCPM	Tahunan, akhir 2009	

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB M&E	FREKUENSI DAN WAKTU PELAKSANAAN M&E	PERSYARATAN AusAID APPR
	kepentingan lainnya.			
Output 3.5.2 Tiga bantuan diimplementasikan dan dievaluasi.				
(a) Akan ditentukan kemudian setelah proposal bantuan dinominasikan untuk pendanaan.	Reports from Grantees Reports of ICT Working Group	ICT Working Group and MCPM M&E	Tahunan, di akhir periode pelaksanaan	

Lampiran C: Jadwal Penyusunan AWP MCPM 2009

Tanggal	Proses AWP	Pihak
Juni 2008	AusAID memberitahukan MCPM mengenai revisi anggaran	AusAID
Juni – Juli	Kajian MCPM terhadap rencana-rencana kerja	MCPM
Agustus	MCPM memfinalisasi anggaran dan menyiapkan Rencana Pengelolaan Anggaran	MCPM
	Diskusi antara AusAID dan MCPM mengenai prioritas kegiatan untuk 18 bulan	AusAID, MCPM
	MCPM dengan Depdiknas dan Depag menyusun draf AWP 2009/10	MCPM
	Amandemen AWP 2008 telah diselesaikan oleh MCPM dan dilaporkan kepada AusAID	MCPM
September 15-16	MCPM menyerahkan draf pertama AWP 2009-2010 kepada AusAID (September 15 atau 16)	MCPM AusAID (Wita/Tim cc: Priya dan Jo)
September 22 atau 23	MCPM dan AusAID membicarakan anggaran dan kegiatan yang diusulkan untuk 2009-2010	AusAID, MCPM (Manajer Kegiatan BEP + Wita/Tim)
Oktober 8	Revisi Draf AWP 2009-2010 kepada AusAID untuk disetujui	MCPM AusAID
Oktober 15	AWP, tanpa sanggahan dari AusAID diserahkan kepada PCMU untuk disetujui	Sekretarian PCMU
Oktober 31 – Nopember 7	AWP disetujui pada pertemuan PCMU sebelum akhir Oktober atau sebelum akhir minggu pertama Nopember	PCMU
Nopember 15	AWP yang disetujui PCMU diedarkan kepada PSC dan AusAID	PCMU Secretariat
Nopember 30	AusAID memberitahukan MCPM disetujuinya AWP 2009-2010	AusAID
Desember 6-20	AWP disetujui oleh PSC	PSC

Lampiran D: Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Penyusunan AWP

Menyusul adanya pendekatan 'program' dan setelah adanya perbincangan dengan AusAID mengenai arah strategis dari setiap kegiatan yang diidentifikasi dan dikembangkan untuk dimasukkan, maka AWP 2009-2010 telah disusun melalui proses konsultasi dengan Pemerintah sebagai counterpart dan telah disetujui. Setiap Penasihat MCPM telah dilibatkan dalam dialog dengan Pemerintah yang merupakan hal yang utama dalam penyusunan AWP. Nama-nama dari Direktorat dan Unit utama terdapat pada Lampiran D dan nama dari Penasihat MCPM terdapat pada Lampiran E.

Namun demikian, penyusunan AWP ini bersamaan dengan kegiatan intensif untuk perencanaan dan penyusunan anggaran di masing-masing Departemen, serta Ramadhan dan perayaan Idul Fitri. Oleh karenanya, meskipun AWP ini hampir mendekati selesai, mungkin masih ada beberapa modifikasi baik untuk rencana-rencana dan anggaran sebelum versi akhirnya diserahkan kepada PCMU dan PSC.

Lampiran E: Daftar Direktorat dan Unit Mitra MCPM

Direktorat dan Unit	Ka. Direktorat dan Unit	Jabatan
BAPPENAS		
Sumber Daya Manusia dan Budaya	Dra. Nina Sardjunani, MA	Wakil Ketua
Direktorat Pendidikan dan Agama	Dr. Taufik Hanafi, MUP	Direktur
Departemen Keuangan		
DitJen Perbendaharaan	Drs. Heri Purnomo, MSoc, Sc.	Direktur Jenderal
Direktorat Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah	Dr. Maurin Sitorus	Direktur
Departemen Pendidikan Nasional		
SETJEN		
Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, M.S.		Sekretaris Jenderal
Biro Perencanaan dan Kerjasama Internasional	Dr. R. Agus Sartono, MBA	Kepala Biro
Biro Keuangan	Drs. Subagyo, M.Si. AK	Kepala Biro
ITJEN		
M. Sofyan, SH, M.Si.		Inspektur Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal	Drs. Ali Hadiyanto, M.Si.	Sekretaris Inspektorat Jenderal
DITJEN MANDIKDASMEN		
Prof. Suyanto		Direktur Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal Mandikdasmem	Dr. Bambang Indriyanto, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat PSMP	Didik Suhardi, SH, M.Si.	Direktur
DITJEN PMPTK		
Dr. Baedhowi		Direktur Jenderal
Direktorat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan	Dr. Sumarna Surapranata	Direktur
Direktorat Tenaga Kependidikan	Dr. Surya Dharma	Direktur
Direktorat Profesi Pendidik	Dr. Ahmad Dasuki	Direktur

Direktorat dan Unit	Ka. Direktorat dan Unit	Jabatan
DITJEN PNFI		
Hamid Muhammad, Ph.D.		Direktur Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal	Dr. Gutama	Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Pendidikan Masyarakat	Ella Yulaelawati, M.S., Ph.D.	Direktur
BALITBANG		
Prof. Dr. H. Mansyur Ramly		Kepala Balai
PSP BALITBANG	Drs. Ade Cahyana, M.Sc.	Ketua Unit
Departemen Agama		
SETJEN		
Dr. Bahrul Hayat		Sekretaris Jenderal
Biro Perencanaan	Drs. H. Achmad Djunaidi	Kepala Biro
Biro Keuangan dan Aset Negara	Drs. Praptono Zamzam M.Sc.	Kepala Biro
Biro Organisasi	Drs. H. M. Irfan, SH, M.Pd.	Kepala Biro
DITJEN PENDIS – DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM		
Prof. Dr. H. M. Ali, MA		Direktur Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Drs. H. Affandi, M.Ag.	Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Pendidikan Islam	Drs. H. Imam Tolkhah	Direktur
Direktorat Pendidikan Madrasah	Drs. H. Firdaus, M.Pd.	Direktur
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren	Drs. H.M. Amin Haedari, M.Pd.	Direktur

Lampiran E: Daftar Penasihat MCPM (per 27 Oktober 2008)

No.	Area	Name	Position
1	1.1	Scott Humphreys	Field Monitor Supervisor/Asset Management Adviser
2	2.1	Abdul Rahman	National Adviser support the development of EQAIS in MoRA (formerly National Organisation and Planning Adviser (MoRA))
3	2.1	John Pettit	International School Supervisor Adviser (formerly Education Quality Standards Adviser)
4	2.1	Julian Watson	Textbook Quality Adviser
5	2.1	Kardiawarman	National Teacher Quality Improvement National Adviser on School Supervision (formerly National Teacher Quality Improvement Adviser)
6	2.1	Libby Hegerty	MoRA Curriculum Organisational & Dev. Adviser
7	2.1	TBC	International Adviser on School Leadership and Management to support development of the new P4TK
8	2.1	TBC	National Adviser on School Management
9	2.1	Vivien Casteel	Teacher Quality Improvement Adviser – International EQAIS Senior Adviser
10	2.2	Graham Dawson	International Education Quality Assurance Model (EQAM) Adviser
11	2.2	Arif Rifai D.	BSNP Database Design & Support Consultant
12	2.2	Djam'an Satori	National Adviser for District Evaluation (Formerly School Quality Assurance Adviser)
13	2.2	John Short	Education Quality Assurance – LPMP&P4TK Cap Bldg Adviser
14	2.2	Sisworo	National Adviser – Standards (formerly Education Quality Standards Adviser)
15	2.2	Sutarto Hadiprayitno	National Adviser – LPMP (Formerly National Organisation and Planning Adviser (MoNE))
16	2.2	TBC	International Standards Adviser
17	2.2	TBC	National Adviser – School and District Evaluation
18	2.2	TBC	National Quality Assurance Adviser
19	2.2	TBC – (Sue Thomson)	Assessment Specialist
20	2.3	Abdul Majid	Whole School Development Adviser - 3
21	2.3	Karen Taylor	WSD Adviser
22	2.3	Khoirul Anam	WSD/WDD National Coordinator Nat. Adviser
23	2.3	Luluk Farida	Whole School Development Adviser - 2
24	2.3	TBC	Whole School Development Adviser - 4
25	2.4	Fadhal Bafadal	WSD/WDD Nat. Adviser – WDD National Coordinator
26	2.4	Triastono	Whole District Development Adviser
27	2.5	Rotua Valentina Sagala	Gender Adviser
28	2.6	Hilary Palmer	International Adviser for Inclusion (Poverty and Disability)
29	2.6	TBC	Inclusive Education Adviser
30	3.1	Abbas Ghozali	Education Finance & Budgeting Adviser
31	3.1	Aos Santosa Hadiwijaya	RENSTRA M&E System Establishment Consultant
32	3.1	Sumarno	Financial M&E Adviser
33	3.1	Hari Prasetyo	Planning Adviser
34	3.1	Hartoyo	RENSTRA M&E System Establishment Consultant
35	3.1	Ibrahim Musa	RENSTRA Operational Plan Dev. Consultant
36	3.1	Imam Bachtiar Farianto	RENSTRA Implementation Consultant
37	3.1	Jefry Fransiscus	RENSTRA Intg. into Planning Consultant
38	3.1	Makfuddin Wiryata Atmaja	Organisational Development Adviser
39	3.1	Yadi Haryadi	RENSTRA Op. Plan Dev & Intg. into Planning Consultant
40	3.2	Ade Chandra	SMIS/PAS System Developer 1
41	3.2	Darius Kabanga	National Information Systems Implementation Adviser (Formerly System & Networking Adviser)
42	3.2	Dodi Amar Hakim	Software Application Designer
43	3.2	Harry Zulkarnaen	FMIS Technical Writer
44	3.2	Trong Viet Tran	Information Management & Technology Adviser

No.	Area	Name	Position
45	3.2	Winny Hanafie	SMIS/PAS System Developer 2
46	3.3	Edvi G. Harianto	FMIS Project Implementation Adviser
47	3.3	Harry Zulkarnaen	FMIS Technical Writer
48	3.3	TBC	Finance Adviser
49	3.3	Yazid Amanullah	FMIS Systems Analyst
50	3.3	Wiwid Lukyanto	FMIS Software Engineer
51	3.3	Adhiral	FMIS SOP
52	3.4	TBC	Audit Adviser
53	3.5	John Kusbagyo	ICT Innovations Adviser
54	CT	Brian Spicer	Lead Technical Adviser
55	CT	Bruce Coyne	Program Director
56	CT	Faik Azmi	School Infrastructure Support Specialist
57	CT	Jasmine Cadd	Senior Procurement Specialist
58	CT	Kharisma Nugroho	M&E Adviser
59	CT	Matthew Forbes	Senior Governance Adviser
60	CT	Muljani Nurhadi	Organisation Dev. & Program Specialist
61	CT	Pangat	Infrastructure Specialist/Technical
62	CT	Paul Fritz	Senior Infrastructure Planning Adviser
63	CT	Rodney Tiller	General Manager
64	CT	Suluh Adiwibowo	Senior Infrastructure Project Specialist
65	CT	Tutut Sedyastuti	Infrastructure Specialist/Admin

Note: CT = Core Team

Lampiran G: Kebijakan MCPM – *Making Advisers Effective*

Sejalan dengan pendekatan program dan peran dari para penasihat teknis dalam mendukung dan mendampingi Pemerintah Indonesia secara efektif untuk mencapai tujuan BEP, MCPM berupaya memastikan bahwa penasihat yang memberikan pendampingan kepada Pemerintah Indonesia adalah mereka terbaik.

Karakteristik yang Diinginkan dari Penasihat

Penelitian terakhir oleh AusAID (*Capacity Building in Public Finance: An Evaluation of Activities in the South Pacific Evaluation and Review Series No. 36, AusAID 2004*) menemukan bahwa penasihat yang sukses memiliki beberapa kualitas, termasuk:

- kematangan *interpersonal skills*,
- keahlian teknis yang memadai,
- kemampuan memecahkan masalah,
- kemampuan pengembangan organisasi,
- sensitivitas terhadap budaya,
- fleksibel, responsif, dan ketekunan, dan
- pengalaman dalam bidang pemerintahan.

AusAID menemukan bahwa penasihat akan lebih berhasil apabila mereka:

- memiliki kemampuan *coaching, mentoring, dan instructional design and delivery*,
- memiliki kapasitas untuk memilih, merancang dan mengadaptasi sistem, prosedur dan teknologi untuk organisasi yang memiliki sumber finansial dan peralatan yang terbatas dan sejumlah staf dengan kualifikasi, kemampuan atau pengalaman yang kurang memadai, dan
- diletakkan/berkantor dekat dengan counterpart.

Memberikan bantuan teknis secara langsung untuk menutup kesenjangan yang ada, terkadang perlu dilakukan. Sebagai contoh, keahlian teknis yang jarang diperlukan sehingga tidak perlu adanya *in-house skill* untuk keahlian tersebut.

Peningkatan untuk Rekrutmen

Cardno Acil telah memperluas basis untuk menjadi penasihat sehingga Cardno Acil memiliki lebih banyak jumlah calon penasihat untuk diwawancarai. Sebagai upaya peningkatan lebih lanjut atas proses seleksi para penasihat, Cardno Acil menawarkan untuk mengujicoba pendekatan *assessment center* sebagai metode wawancara bagi calon yang tersaring. Hal ini dilakukan di Jakarta.

Pada awalnya diujicoba untuk rekrutmen yang dilakukan baru-baru ini untuk posisi Penasihat Senior untuk Tata Kelola. Ternyata ada beberapa keuntungan yang bisa didapat, yaitu memungkinkan tim kami dan counterpart untuk mengobservasi calon dalam konteks lingkungan tempat nanti mereka bekerja dan dalam bermacam interaksi yang luas. Tim manajemen kami akan memiliki input yang lebih besar lagi untuk mengambil keputusan akhir untuk merekrut dan memberikan kesempatan kepada calon untuk dapat merasakan secara langsung lingkungan tempat mereka bekerja.

Cardno Acil akan menempatkan calon yang sudah tersaring untuk mengikuti beberapa aktifitas, termasuk wawancara, pemaparan, dan kunjungan ke counterpart. Metode ini merupakan asesmen yang paling reliabel mengenai kemampuan teknis, pengembangan kapasitas dan kemampuan budaya.

Penasihat Jangka Pendek

MCPM akan mengevaluasi secara seksama permintaan Pemerintah Indonesia akan penasihat jangka pendek. Di dalam AWP ini, jumlah posisi tersebut terbatas, dan tampaknya tetap akan terbatas di masa mendatang. Ketentuan umum untuk jabatan penasihat jangka pendek tergantung dari setiap keadaan dimana:

- Keterampilan tertentu, yang belum ada di dalam unit Pemerintah Indonesia, diperlukan untuk suatu bidang pekerjaan tertentu – seperti pengelolaan kurikulum di Depag, atau
- Daya serap dari suatu institusi terbatas sehingga berlebihan apabila melibatkan penasihat jangka panjang, atau
- Penasihat internasional memberikan input kepada MCPM sementara pada saat yang bersamaan mendukung pengembangan kapasitas penasihat nasional/local atau kapasitas dari institusi, seperti dalam hal gender.

Input dari penasihat jangka pendek memerlukan pemeriksaan yang lebih luas dibandingkan input jangka panjang karena terbukti lebih sulit untuk dirancang dan dibuat berkesinambungan. Menempatkan penasihat teknis spesialis dalam suatu institusi dapat memberikan fokus yang lebih tepat atas suatu permasalahan, namun agar perubahan tersebut dapat berkesinambungan maka:

- penasihat harus mengadopsi cara bekerja yang dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas, dan
- penempatan penasihat mungkin harus dilengkapi dengan pendekatan pengembangan kapasitas lainnya.

MCPM telah memformulasikan pendekatannya untuk mengelola penasihat jangka pendek dengan pandangan untuk memastikan peningkatan efektifitas melalui:

- adanya kerangka acuan kerja individual untuk posisi yang ada di dalam AWP yang perlu dikonfirmasi dan disetujui oleh counterpart MCPM, dalam waktu dua minggu sejak penugasan dimulai,
- kerangka kerja tersebut akan memuat uraian singkat mengenai pendekatan pengembangan kapasitas, dan
- masing-masing penasihat akan menyusun laporan penyelesaian, dimana General Manager akan memberikan *exit discussion* dan akan mengedarkan laporan tersebut kepada institusi terkait dan kepada AusAID.

Lampiran H: Kerangka Kerja Individual untuk Penasihat

**Managing Contractor Program Management - AIBEP
Kerangka Kerja Individual untuk Penasihat (periode)**

	<p>Ini diupayakan ada pada tingkat Outcome. Dan Output kedua atau ketiga ada pada tingkat intermediate.</p>	<p>Kegiatan ini disusun oleh penasihat. Dan didiskusikan dalam evaluasi kinerja</p>	<p>Sebagian dari informasi ini diambil langsung dari "Dasar Pemikiran" AWP.</p>	<p>Perbedaan dari cara kerja di Depdiknas dan Depag karena adanya kegiatan ini? Ini bukan 'output' tapi perubahan yang ingin dilihat. Ini lebih dari 'outcome'.</p>	<p>Kedua kolom ini menanyakan tentang bukti. Bukti atas "perubahan" yang diharapkan, dan pada kolom kedua adalah dimana bukti tersebut didapat dan siapa dan bagaimana mengumpulkannya. Contoh: laporan tahunan Depag atau berita acara rapat, laporan audit, dsb. Dikumpulkan secara tahunan, kwartal, dsb.</p>
<p>Bagian 1: Dilengkapi sebelum Penasihat memulai kegiatannya</p>					
<p>Output 1 Produk atau jasa yang akan dihasilkan? (Daftar Outcome / Intermediate Outcome AWP)</p>	<p>Kegiatan – Kegiatan apa yang akan anda lakukan untuk membantu institusi meraih output? Mulainya dan selesainya pekerjaan</p>	<p>Baseline – Bagaimana situasi saat ini terkait dengan output?</p>	<p>Perubahan yang diinginkan – Perubahan apa yang anda harapkan jika output ini tercapai?</p>	<p>Evidence source – Bagaimana anda tahu apakah perubahan tersebut telah tercapai?</p>	<p>Evidence collection & analysis Bagaimana mendapatkannya (oleh siapa dan seberapa sering)?</p>
<p>Tiga kolom ini memberikan masukan terhadap proses penyusunan laporan.</p>					
<p>Bagian 2: Dilengkapi sebelum Kajian Kinerja Penasihat Enam Bulanan</p>					
<p>Kemajuan – kemajuan terhadap upaya pencapaian output ini? (termasuk kesulitan yang dihadapi)</p>		<p>Lessons learned – pelajaran apa yang dapat anda petik? Apakah ada perubahan yang tidak diduga/diharapkan sebelumnya?</p>		<p>Future actions – Sebagai hasil dari lessons learned atau perubahan yang tidak diduga, tindak lanjut apa yang sudah/perlu dilakukan?</p>	
Empty space for data entry					

Section 1: To be completed before adviser starts activity

Output 2 What product or service will be produced? (AWP Log frame Outcome / Intermediate Outcome)	Activities - What activities will you do to help the agency produce this output? Commencement & completion	Baseline - What is the current situation in relation to the output?	Intended change - What change do you expect to see if this output is achieved?	Evidence source - How will you know if these changes have occurred?	Evidence collection & analysis How will this be done (by whom & how often)?
<div data-bbox="210 446 399 673" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Output terakhir harus terkait dengan pengarusutama Gender dalam konteks peran dan fungsi penasihat serta kegiatannya.</p> </div>		<div data-bbox="514 467 1207 625" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Catatan: Meskipun penasihat tidak bertanggungjawab untuk melakukan pekerjaan penasihat Gender, namun isu Gender merupakan tanggungjawab setiap penasihat. Bagian ini berupaya untuk memastikan bahwa setiap penasihat sadar dan bekerja membantu peran MCPM dalam mendukung pengarusutamaan Gender di Depdiknas dan Depag</p> </div>			

Section 2: To be completed prior to Six Monthly Adviser Performance Review

Progress - what progress has been made towards the achievement of this output? (include difficulties encountered)	Lessons learned - what lessons have you learned? What unexpected, if any, changes occurred?	Future actions - As a result of lessons learned or any unexpected changes, what actions have/need to be taken?